



Dr. Taufiqurokhman, A.Ks., S.Sos., M.Si.

PEKERJAAN SOSIAL: PENDIDIKAN, JENJANG DAN PETA KARIR PROFESI



ISBN 978-602-9006-47-6



9 786029 006476

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pengarang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PEKERJAAN SOSIAL: PENDIDIKAN, JENJANG DAN PETA KARIR PROFESI

DR. Taufiqurokhman, S.Sos., M.Si.

Penulis : DR. Taufiqurakhman, S.Sos., M.Si.

Kata Pengantar : DR. Taufiqurakhman, S.Sos., M.Si.

Penerbit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Moestopo Beragama (Pers) Jl.
Hang Lekir I No. 8, Senayan, Jakarta Pusat,
10270 Telp: (021) 7220269, 7252682, 7395333
Fax: 7252682

ISBN 978-602-9006-47-6



DAFTAR ISI

BAB I

A. Eksistensi Profesi Pekerjaan Sosial Di Indonesia

1. Eksistensi Hambatan Dalam Pelayanan Dasar di Masyarakat
2. Konsep Dasar Profesi Pekerjaan Sosial
3. Eksistensi Profesi Pekerjaan Sosial
4. Operasionalisasi Pekerjaan Sosial
5. Komponen Kemampuan Dasar Profesi Pekerjaan Sosial
6. Pekerjaan Sosial Dan Jenjang Karirnya sebagai Profesi

BAB II

A. TANTANGAN KIPRAH PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL DI INDONESIA

1. Pengaruh Eksternal dan Internal Pekerja Sosial
2. Standarisasi Kompetensi Pekerja Sosial

BAB III

A. EKSISTENSI PEKERJA SOSIAL

1. Pekerja Sosial untuk Menjangkau PMKS

- B. EKSISTENSI PEKERJA SOSIAL SEBAGAI SUATU PROFESI
1. Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial
 2. Keberlanjutan Karir Pekerjaan Sosial
 3. Keunikan Pekerjaan Sosial
 4. Tujuan Pendidikan, Kurikulum, dan Kompetensi Pekerjaan Sosial
 - a. Kompetensi 1: Identifikasi
 - b. Kompetensi 2: Penerapan Sosial
 - c. Kompetensi 3: Penerapan Kritis
 - d. Kompetensi 4: Keterlibatan Keanekaragaman dalam Praktik
 - e. Kompetensi 5: Peningkatan HAM serta Keadilan Sosial dan Ekonomi
 - f. Kompetensi 6: Keterlibatan dalam Penelitian
 - g. Kompetensi 7: Penerapan Pengetahuan Perilaku Manusia dan Lingkungan Sosial
 - h. Kompetensi 8: Keterlibatan dalam Praktik Kebijakan untuk Memajukan Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
 - i. Kompetensi 9: Responsif terhadap Konteks dari Bentuk Praktik
 - j. Kompetensi 10: Perjanjian, Assessment, Intervensi, dan Evaluasi dengan Individu, Keluarga, Kelompok Besar, Organisasi, dan Komunitas
 5. Advanced Practice
 6. Bidang Pendidikan

BAB IV

A. PROSPEK DAN TANTANGAN PEKERJAAN SOSIAL

1. Pekerjaan Sosial dan Fungsi Sosial Individu
2. Prospek Karir sebagai Pekerja Sosial
3. Pekerja Sosial, Antara Peluang dan Tantangan
4. Kontribusi Teori dalam Praktik Pekerjaan Sosial

- 1) Teori Psikodinamika
- 2) Teori Motivasi
- 3) Teori Sistem
- 4) Teori Pembelajaran Sosial
- 5) Teori Pertukaran Sosial
- 6) Teori Ekologi
- 7) Teori Feminin

B. KEBIJAKAN PROFESIONALISME PEKERJA SOSIAL

1. Pekerjaan Sosial Sebagai Profesi
2. Konsep Pekerja Sosial Profesional
3. Kualifikasi Pekerja Sosial Profesional

BAB V

A. PEKERJAAN SOSIAL SEBAGAI PILIHAN PROFESI

1. Suatu Profesi Yang Sedang Berkembang
2. Lahirnya Pekerjaan Sosial sebagai Suatu Profesi

- 3.** Badan Sosial Pertama
- 4.** Masyarakat Organisasi Amal
- 5.** Gerakan Rumah Pemukiman

B. MENDEFINISIKAN PEKERJAAN SOSIAL SEBAGAI SALAH SATU PROFESI

- 1.** Sosial Casework
- 2.** Gerakan Psikoanalitik
- 3.** Gerakan Kesejahteraan Umum
- 4.** Sosial Group Work dan Community Organization
- 5.** Dual perspective
- 6.** Reformasi Sosial
- 7.** Pendekatan Ekosistem
- 8.** Munculnya Definisi Pekerjaan Sosial

C. PERSYARATAN BAGI STATUS PROFESIONAL

- 1.** Apakah Pekerjaan Sosial Suatu Profesi?
- 2.** Lahirnya Organisasi Profesi
- 3.** Perkembangan Pendidikan Profesi
- 4.** Pekerjaan Sosial Dewasa ini



EKSISTENSI PROFESI PEKERJAAN SOSIAL DI INDONESIA

1. Eksistensi Hambatan Dalam Pelayanan Dasar di Masyarakat

Eksistensi profesi pekerjaan sosial di Indonesia dalam kondisi dan situasi yang semakin kompleks yang ada di masyarakat, memang terlihat tidak mudah. Karena, pekerjaan sosial sebagai sebuah profesi pertolongan atau seorang pekerja sosial dalam menjalankan tugasnya bukan hanya dapat menyalurkan atau memberikan bantuan semata-mata pada masyarakat yang membutuhkan. Seorang pekerja sosial profesional, dalam melaksanakan tugasnya dan fungsinya, harus didasarkan pada kerangka pekerjaan sosial secara professional di lapangan, yaitu: memiliki ilmu pengetahuan, keahlian atau keterampilan dan nilai-nilai, untuk meningkatkan keberfungsian sosial Klien, seorang Pekerja Sosial harus memahami teknik komunikasi dan berelasi yang baik dalam melaksanakan tugasnya; serta memahami langkah-langkah intervensi. Sehingga permasalahan yang dihadapi di lapangan dapat diselesaikan dengan tepat sasaran.

Oleh karenanya, kehadiran Profesi Pekerjaan Sosial sangatlah dibutuhkan didalam masyarakat dalam kondisi saat

ini, apalagi dengan semakin kompleksnya kehidupan masyarakat, maka akan semakin banyak timbul masalah-masalah baik yang sifatnya individu, ataupun kolektif. Sehingga sebagai seorang profesi pekerja sosial harus memahami beberapa hal, yaitu: Hambatan geografis, misal keterpencilan terhadap fasilitas pelayanan sosial dasar; Eksistensi Profesi Pekerjaan Sosial; Operasionalisasi Pekerjaan Sosial. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan di bawah ini:

a. Eksistensi Hambatan Pekerjaan Sosial,

Perjalanan panjang eksistensi Pekerjaan Sosial di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi tantangan. Masih banyak pihak yang menganggap bahwa Pekerjaan Sosial merupakan sesuatu yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Asal ada benda atau materi, serta kemauan untuk membantu orang lain atau menyelesaikan masalah sosial maka ia disebut Pekerja Sosial. Hal itu yang pada akhirnya membuat jumlah tenaga Pekerjaan Sosial masih minim.

Eksistensi Hambatan Pekerjaan Sosial, yang dimaksud adalah adanya kebutuhan dari masyarakat secara nyata terhadap Pekerja Sosial yang secara profesi atau tenaga ahli lainnya secara signifikan. Bagaimanapun juga, eksistensi terhadap Pekerjaan Sosial tidak begitu saja turun dari langit, melainkan hanya akan dapat diperoleh ketika para Pekerja Sosial dapat menunjukkan karya nyatanya dalam menciptakan Kesejahteraan Sosial bagi masyarakat Indonesia.

Penggunaan istilah Pekerja Sosial Profesional inilah yang membedakan dengan profesi lainnya, dimana gelar tersebut disematkan pada orang-orang yang telah menempuh jenjang pendidikan di Ilmu Kesejahteraan Sosial, adalah masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada, yang dapat menjadi sumber masalah sosial yaitu seperti proses sosial dan bencana alam. Berkembangnya masalah sosial akibat dari krisis, konflik sosial, bencana alam dan gejala disintegrasi sosial, membutuhkan penanganan secara holistik dan komprehensif. Menurut Soerjono Soekanto masalah sosial dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) jenis faktor, yakni antara lain;

- a) faktor ekonomi (kemiskinan, pengangguran, dll).
- b) faktor budaya (perceraian, kenakalan remaja, dll).
- c) faktor biologis (penyakit menular, keracunan makanan, dsb).
- d) faktor psikologis (penyakit syaraf, aliran sesat, dsb).

b. Masalah Sosial

Yang dialami oleh anak, keluarga, komunitas dan masyarakat; yang mengalami hambatan fungsi sosial (disfungsi sosial) atau mengalami masalah struktural dan budaya, antara lain:

- a. Hambatan fisik, misalnya kecacatan fisik, kecatatan mental,
- b. Hambatan ilmu pengetahuan, misalnya kebodohan, kekurangtahuan informasi,

- c. Hambatan keterampilan, misalnya tidak mempunyai keahlian yang sesuai dengan permintaan
- d. lapangan kerja modern,
- e. Hambatan mental/sosial psikologis, misalnya kurang motivasi, kurang percaya diri,
- f. depresi/stres.
- g. Hambatan budaya, misalnya mempertahankan tradisi yang kurang mendukung kemajuan
- h. sosial/modernisasi.
- i. Hambatan geografis, misal keterpencilan terhadap fasilitas pelayanan sosial dasar.

Dalam kondisi demikian, diperlukan intervensi Pekerjaan Sosial bagi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat, agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap **pelayanan sosial dasar** dalam rangka mencapai taraf kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik. Pelayanan Kesejahteraan Sosial didukung dengan kebijakan dan program pembangunan nasional bidang Kesejahteraan Sosial. Dalam hal ini Kementerian Sosial sebagai bagian dari pemerintah pusat yang mempunyai mandat dan tugas pokok serta fungsi di bidang pembangunan.

Kesejahteraan Sosial, adalah kemampuan pemerintah melalui Kementerian Sosial dalam menangani masalah sosial dalam lima tahun terakhir hanya menjangkau rata-rata sekitar 8% dari total.

c. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Atau yang dulu disebut dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dalam situasi dan kondisi perkembangan permasalahan sosial dan tuntutan publik yang semakin kompleks. Serta terhadap orientasi kebijakan dan program pemenuhan pekerja sosial untuk menatasi PPKS, maka rasio jumlah kebutuhan pekerja sosial masih membutuhkan dalam jumlah yang besar. Terlihat rasio Pekerja Sosial (*Social Worker*) dengan PPKS, jika minimal satu berbanding 100. Maka, kebutuhan Pekerja Sosial di Indonesia, paling sedikit sebanyak 155.000 orang. Sedangkan estimasi jumlah PMKS tahun 2019, sebanyak 15,5 juta keluarga. Sedangkan, jumlah Pekerja Sosial saat ini, sekitar 15.522 orang. Berarti masih membutuhkan sekitar 139.478 orang, sebagai seorang porofesi pekerja sosial agar penanganan PPKS bisa dilaksanakan secara ideal di lapangan. Dengan demikian masih diperlukan sekitar 139.000 Pekerja Sosial.

Menurut Walter A. Friedlander dan Robert Z. Apte, menyebutkan pekerjaan sosial, adalah: "*Concepts and Methods of Social work*". *Social work is a professional service, based on scientific knowledge and skill in human relations, which help individuals, groups, or communities obtain social or personal satisfaction and independence*" (Friedlander dan Apte, 1980:4). Artinya, pekerjaan sosial merupakan suatu pelayanan profesional, yang prakteknya didasarkan kepada pengetahuan dan ketrampilan ilmiah tentang relasi manusia, sehingga dapat membantu individu, kelompok

dan masyarakat mencapai kepuasan pribadi dan sosial serta kebebasan.

Sedangkan Zastrow (2004) dalam *Introduction to Social Work and Social Welfare*, mmenyebutkan: "*Social Problems, Services, and Current Issues*" mendefinisikan Pekerjaan Sosial sebagai berikut: "*Social Work is the professional activity of helping individuals, groups, or communities to enhance or restore their capacity for social functioning and to create societal conditions favorable to their goals*" (Zastrow, 1982: 12). Artinya, pekerjaan Sosial merupakan kegiatan profesional untuk membantu individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuan.

Jika mengacu kepada ke dua konsep pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan, bahwa: Pekerjaan Sosial merupakan suatu kegiatan profesional untuk menolong manusia, baik individu, kelompok, dan masyarakat dimana pelayanannya didasarkan kepada pengetahuan dan keterampilan ilmiah tentang relasi manusia, agar mereka (individu, kelompok, dan masyarakat) dapat meningkatkan/memperbaiki kemampuan berfungsi sosialnya. Dengan tujuan, mereka dapat mencapai kepuasan pribadi dan sosial serta kebebasan. Selain, pekerjaan sosial adalah suatu profesi yang membantu manusia mengatasi permasalahannya baik sebagai individu, atau sebagai anggota suatu kelompok dengan teknik relasi manusia. Sesuai hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial dia akan selalu bergantung

dengan manusia lainnya, tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, karena tidak semua masalah yang dihadapinya dapat ditangani sendiri, pasti membutuhkan solusi dari individu lainnya baik anggota keluarga, teman, ataupun siapa saja dari luar dirinya.

2. Konsep Dasar Profesi Pekerjaan Sosial.

Dari pengertian diatas ada beberapa konsep yang mendasari Praktek Pekerjaan Sosial yang dapat dipakai sebagai pedoman bagi Pekerja Sosial dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Beberapa konsep tersebut adalah:

a. Pekerjaan Sosial adalah kegiatan Profesional.

Suatu kegiatan dapat dikatakan sebuah profesi, jika memiliki beberapa unsur pokok profesi pekerjaan sosial adalah :

1. Kegiatan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan, keahlian atau keterampilan, dan nilai-nilai (value). Artinya, kegiatan yang dilakukan dilaksanakan Pekerja Sosial yang telah mendapatkan pendidikan baik teori serta praktek di Sekolah Khusus/Perguruan Tinggi, yang memberikan pendidikan Pekerjaan Sosial. Pendidikan khusus juga Pekerja Sosial diajarkan berbagai teknik-teknik untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Klien sebagai keahlian Pekerja Sosial.
2. Mempelajari nilai-nilai dalam pendidikan Pekerjaan Sosial agar Pekerja Sosial dalam menangani masalah Klien memiliki batasan-batasan, sehingga tidak terjadi

penyimpangan praktek. Praktek Pekerjaan Sosial dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kegiatan untuk kepentingan umum (public interest). Artinya, Suatu kegiatan harus diarahkan untuk semua tanpa memihak kepada golongan tertentu. Pelayanan yang diberikan harus dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat atau bermanfaat bagi kepentingan umum. Tidak boleh membedakan masyarakat tingkat atas, menengah atau bawah. Apabila suatu profesi diperuntukkan hanya bagi golongan tertentu, atau melakukan diskriminasi maka telah melanggar Hakekat Kelahiran dan tanggung jawab sosialnya. Konsep Ilmu Kesejahteraan Sosial, adalah sistem program suatu negara, manfaat, dan layanan yang membantu orang, ekonomi, pendidikan, dan kebutuhan kesehatan yang mendasar untuk pemeliharaan masyarakat. **Reid** (1995) menggambarkan. Kesejahteraan Sosial sebagai "ide, bahwa ide menjadi salah satu dari masyarakat yang layak yang menyediakan kesempatan untuk bekerja, memberikan keamanan yang wajar dari keinginan dan penyerangan, mengutamakan kejujuran dan evaluasi berdasarkan pada jasa individu, dan ekonomi produktif dan stabilitas". (hal. 206). Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan Kesejahteraan Sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial

dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Dari kedua definisi di atas, Kesejahteraan Sosial merupakan terpenuhinya kebutuhan masyarakat, baik itu bersifat fisik maupun nonfisik, yang pada akhirnya akan menciptakan rasa aman, nyaman, serta dapat menjalankan perannya di masyarakat.

b. Praktek Pekerjaan Sosial merupakan kegiatan Pertolongan.

Seperti halnya Profesi lain, Profesi Pekerjaan Sosial juga merupakan Profesi Pertolongan (Helping action). Akan tetapi Konsep Pertolongan Profesi Pekerjaan Sosial berbeda dengan Konsep Profesi lain, Konsep Pertolongan Pekerjaan Sosial adalah *"to help people to help themselves"* (menolong orang agar orang mampu menolong dirinya sendiri). Berlandaskan kepada konsep di atas, maka pertolongan Pekerjaan Sosial mempunyai dua ciri pokok, yaitu:

Orientasi pertolongan Profesi Pekerjaan Sosial dipusatkan terhadap kepentingan Klien/Orang yang ditolong.

Pekerja Sosial selalu bekerja sama dengan Klien (Working with Client).

Klien yang dibantu adalah orang baik individu atau kolektifitas (keluarga, kelompok, organisasi, dan masyarakat). Pekerja Sosial harus memiliki teknik-teknik serta metode-metode untuk membantu klien yang mengalami masalah dalam interaksi sosial dengan lingkungannya. Sehingga memperlemah

fungsi Sosialnya dan menimbulkan masalah.

Intervensi Pekerjaan Sosial dipusatkan kepada peningkatan fungsi sosialnya, yaitu intervensi yang dilakukan oleh Pekerja Sosial harus mengarah kepada kemauan, harapan-harapan, kebutuhan Klien baik fisik dan sosial, serta potensi-potensi yang ada dalam diri Klien.

Untuk mengetahui unsur-unsur diatas Pekerja Sosial harus melakukan asesmen terhadap Klien.

e. **Dasar pengetahuan ilmiah Pekerjaan Sosial**

Dasar pengetahuan ilmiah pekerjaan sosial dapat di kelompokkan kepada tiga jenis, yaitu:

- a) tested,
- b) hypothetical dan
- c) assumptive knowledge.

f. **Pengetahuan-pengetahuan yang diperlukan untuk praktek Pekerjaan Sosial** ditentukan oleh tujuan, fungsi dan permasalahan yang dihadapi.

g. **Internalisasi nilai** dan pengetahuan profesional merupakan kebutuhan vital bagi para Pekerja Sosial Profesional.

h. **Keterampilan profesi Pekerjaan Sosial**, diekspresikan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional, (Skidmore dan Thackeray, 1982: 7).

3. Eksistensi Profesi Pekerjaan Sosial

- a. **Eksistensi Profesi Pekerjaan Sosial** telah memasuki tahapan penting dan strategis dalam rangka memperkuat perkembangan Pekerja Sosial di Indonesia, antara lain:
- 1) Pertama, semakin kuatnya pengaturan Pekerja Sosial Profesional dalam Peraturan Perundang-undangan, seperti dalam UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyebutkan Pekerja Sosial sebagai “the primary profession” dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan UU No. 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini menjadi landasan kuat untuk penyediaan Pekerja Sosial profesional di Indonesia.
 - 2) Kedua, Pekerja Sosial telah memasuki era baru yaitu Sertifikasi Kompetensi Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial yang dicanangkan oleh Menteri Sosial RI pada tanggal 29 November tahun 2012 di Jakarta. Sertifikasi difasilitasi oleh pemerintah melalui Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial (LSPS) yang merupakan pengakuan terhadap Pekerja Sosial dan pada gilirannya menerbitkan lisensi. Demikian juga untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial yang akan di akreditasi oleh badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (BALKS) hal ini dapat memperkuat eksistensi profesi Pekerja Sosial.

- 3) Ketiga, kementerian Sosial memprakarsai penyusunan naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Pekerjaan Sosial yang saat ini sudah di bahas ditingkatpanja Komisi VIII DPR RI yang merumuskan secara legal definisi Pekerjaan Sosial dan praktik Pekerjaan Sosial, persyaratan menjadi Pekerja Sosial, jenjang pendidikan, kedudukan, tugas dan fungsinya, sertifikasi, keberadaan asosiasi profesi, asosiasi pendidikan dan kewajiban lembaga kesejahteraan pelayanan sosial untuk menggunakan Pekerja Sosial bersertifikat dan berlisensi.
 - 4) Keempat, kebijakan saat ini yang menjadi arus utama Kementerian Sosial adalah “one stop services”. Saat ini kebutuhan tenaga profesional di bidang Pekerjaan Sosial masih sangat besar mengingat estimasi jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tahun 2013 atau PPKS UU No 14 Tahun 2019, sekitar 15,5 juta rumah tangga, sedangkan jumlah Pekerja Sosial yang baru sekitar 15.522 orang. Jika ratio ideal misalnya 1 Pekerja Sosial menangani 100 rumah tangga, maka masih dibutuhkan kurang lebih 139.000 orang Pekerja Sosial. Begitu pula dibutuhkan Pekerja Sosial medis di rumah sakit, Pekerja Sosial Industri, Pekerja Sosial Forensik di Lapas/Bapas, Pekerja Sosial Klinis di Lembaga-Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, Pekerja Sosial Spesialis Perlindungan anak, Pekerja Sosial Spesialis Manajemen Bencana dan sebagainya.
- b. Rasio ideal antara jumlah profesi pekerjaan sosial dengan**

PPKS masih jauh dari jumlah ideal, maka dapat memberikan penguatan terhadap rasio kebutuhan profesi Pekerjaan Sosial berupa, Rencana Aksi Nasional atau Roadmap Pengembangan Pekerjaan Sosial di Indonesia.

4. Operasionalisasi Pekerjaan Sosial

Pendidikan Pekerjaan Sosial mempunyai tanggung jawab untuk menanamkan dan mencetak intelektual sebagai kader bangsa yang peduli terhadap penanganan masalah sosial. Utamanya di wilayah Timur Indonesia yang hingga kini masih banyak membutuhkan Pekerja Sosial untuk melakukan pemberdayaan dan menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, merupakan suatu tugas yang mulia bagi tenaga Kesejahteraan Sosial untuk “Membangun sinergisitas dan profesionalitas Pekerja Sosial yang handal guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Timur Indonesia.” Sangat disadari bahwa Pekerjaan Sosial haruslah menjadi dekat dengan konteks di mana Ia diaplikasikan. Oleh karena itu, memaknai dan mempraktekan Pekerjaan Sosial yang berbasis multikultur sesuai dengan karakteristik Bangsa Indonesia adalah tugas yang perlu dilakukan agar Pekerjaan Sosial dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia.

Indonesia sebagai negara kesatuan dengan ribuan pulau besar dan kecil, dihuni oleh penduduk dari berbagai etnik dan suku bangsa. Paling sedikit terdapat 300 etnik atau suku-bangsa di Indonesia. Pekerja Sosial yang mendedikasikan diri dalam konteks Indonesia perlu memahami budaya multikultur.

Kemampuan responsif atas keragaman budaya inilah yang disebut kompetensi budaya dari Pekerja Sosial (Multicultural Social Work).

Untuk mengintegrasikan kompetensi budaya pada Pekerjaan Sosial, maka ada lima prinsip dasar yang perlu dipahami: Menghargai perbedaan dan keragaman budaya;

- a. Menerapkan instrumen penilaian budaya dalam praktek Pekerjaan Sosial;
- b. Melatih kesadaran Pekerja Sosial tentang dinamika yang terjadi pada saat interaksi lintas budaya; Memasukan pengetahuan budaya ke dalam kurikulum pendidikan dan melatih sikap lentur terhadap keragaman budaya;
- c. Melatih kerjasama lintas-budaya, adaptasi budaya, dan pemahaman keragaman budaya. Situasi sebagaimana gambaran tadi memotivasi kita untuk mengembangkan sistem Pekerjaan Sosial dalam konteks Indonesia, yang selaras dengan situasi dan kondisi sosial ekonomi dan budaya Indonesia. Dalam upaya mendukung pengembangan Pekerjaan Sosial sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia, perlu mencermati dilakukan hal-hal sebagai berikut:

Mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan Pekerjaan Sosial berbasis kompetensi generalis dan spesialis
Praktek Pekerjaan Sosial adalah suatu pelayanan profesional yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam relasi kemanusiaan yang bertujuan untuk membantu, baik secara perseorangan, keluarga maupun kelompok

masyarakat untuk mencapai kemandirian secara pribadi dan sosial. Berkembangnya masalah sosial yang semakin kompleks, membutuhkan pengetahuan dan keterampilan Pekerja Sosial yang tidak hanya mampu melaksanakan praktek Pekerjaan Sosial secara generalis, namun mengarah pada spesialisasi kompetensi Pekerjaan Sosial, seperti:

- a. Pekerjaan Sosial dengan anak, keluarga dan sekolah;
- b. Pekerjaan Sosial dalam situasi bencana;
- c. Pekerjaan Sosial medis dan kesehatan publik;
- d. Pekerjaan Sosial dengan disabilitas;
- e. Pekerjaan Sosial forensik/ koreksional; dan lain-lain.

Kebutuhan Pekerja Sosial yang spesialis dapat dipenuhi apabila sistem pendidikan dan pelatihan profesi Pekerja Sosial juga mengembangkan kurikulum pendidikan dan pelatihan Pekerjaan Sosial spesialis.

Mengembangkan Praktek Pekerjaan Sosial berbasis perseorangan, keluarga dan komunitas yang terintegrasi. Kebijakan dan program Kesejahteraan Sosial pada masa lalu cenderung dilaksanakan secara sektoral/fragmentaris, jangkauan pelayanan sosial terbatas, reaktif merespon masalah yang aktual, fokus pada pelayanan berbasis institusi/panti sosial, serta belum adanya rencana strategis nasional yang dijadikan acuan bagi pemangku kepentingan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pada masa yang akan datang diperlukan kebijakan dan program Kesejahteraan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan, serta dapat menjangkau

seluruh warga negara yang mengalami masalah sosial, melalui sistem dan program Kesejahteraan Sosial yang melembaga dan profesional, serta mengedepankan peran dan tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Para Pekerja Sosial dituntut memiliki kompetensi Pekerjaan Sosial yang mengintegrasikan pendekatan dan intervensi kepada perseorangan, keluarga dan komunitas sebagai satu kesatuan entitas praktek Pekerjaan Sosial. Keberadaan institusi panti sosial perlu direvitalisasi sebagai pusat layanan Kesejahteraan Sosial berbasis keluarga dan komunitas.

Mengembangkan organisasi profesi Pekerja Sosial yang mandiri, yaitu keberadaan organisasi profesi Pekerja Sosial memiliki keunikan dan berbeda dengan negara-negara lain. Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia lahir atas semangat para alumni Perguruan Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial untuk berhimpun dan berserikat atas nama organisasi profesi, walaupun sistem pendidikan profesi dan sertifikasi Pekerja Sosial belum lahir. Kehadiran sistem sertifikasi bagi Pekerja Sosial akan melahirkan para Pekerja Sosial sebagai profesi yang diakui dan bersertifikat. Adanya sertifikasi bagi Pekerja Sosial, akan menjadikan profesi Pekerja Sosial memperoleh lisensi/mandat bahkan dapat menyelenggarakan praktek secara mandiri. Oleh karena itu, organisasi profesi yang ada sekarang ini diharapkan dapat merevitalisasi diri sebagai organisasi profesi Pekerja Sosial yang mandiri. Membangun sistem pencegahan secara dini munculnya masalah sosial, penekanan kebijakan untuk menjadikan Kementerian Sosial bukan sebagai “pemadam kebakaran” yang hanya beraksi ketika masalah

sosial telah marak. Kementerian Sosial senantiasa bersinergi menggalang kekuatan dengan masyarakat serta komponen bangsa lain untuk mencegah permasalahan sosial secara dini. Dampak sosial yang ditimbulkan semakin berat jika masalah sosial telah berlangsung dan membawa dampak sosial ekonomi yang kompleks. Oleh karena itu, sangat diperlukan keterlibatan perguruan tinggi lainnya yang mampu menjadi pilar utama dalam pencegahan secara dini munculnya masalah sosial. Hal ini penting karena menurut sebagian kalangan, Perguruan Tinggi tidak boleh lengah mengemban peran sebagai inisiator dalam pengembangan “sistem peringatan dini”. Pentingnya “*early warning system*” bukan hanya untuk mencegah bencana alam, namun juga untuk pencegahan berbagai masalah sosial/bencana sosial. Pekerja Sosial dalam mengemban mandatnya memiliki tugas untuk membangun sistem peringatan dini berbasis keluarga dan komunitas terhadap berbagai ancaman/risiko bencana sosial, budaya, ekonomi, dan politik, sebelum semuanya sudah menjadi begitu buruk. Untuk itu secara sistematis pendidikan Kesejahteraan Sosial dapat menjadi perintis untuk melahirkan pendekatan khas guna mencegah terjadinya atau meluasnya masalah sosial yang dapat diaplikasikan sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia.

Menanamkan kepekaan dan kesalehan sosial, yaitu kepekaan dan kesalehan sosial tidak muncul begitu saja. Ia merupakan hasil dari sosialisasi nilai dan proses belajar. Kepekaan sosial sangat penting mengingat sampai saat ini struktur sosial budaya masyarakat Indonesia masih sangat beragam dalam pencapaian taraf Kesejahteraan Sosial. Kepekaan

dan kesalehan sosial akan menjadi kekuatan yang sangat penting bagi penanganan masalah sosial. Selain khas Indonesia, nilai-nilai ini diyakini masih kuat melekat pada masyarakat Indonesia. Kesenjangan sosial yang tinggi antara kaum kaya dan miskin berisiko terjadi kecemburuan sosial dan munculnya sikap anti sosial/anti kemapanan, bahkan dapat menimbulkan gejolak kerusuhan dan disintegrasi sosial. Dalam kondisi seperti ini, sifat individualistis yang hanya mementingkan diri sendiri sangat tidak cocok di Indonesia. Berdasarkan data BPS tahun 2011, diketahui indeks Gini Ratio sudah mencapai angka 0,41 yang menunjukkan kesenjangan sosial ekonomi semakin tinggi. Pendidikan Kesejahteraan Sosial harus mampu merangsang dan mendorong masyarakat agar mampu meng-implementasikan nilai-nilai kesetiakawanan sosial atau solidaritas sosial sebagai jati diri bangsa Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan. Harapan kita kepada para Pekerja Sosial agar memperkuat kepekaan dan kesalehan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya melalui revitalisasi program/kegiatan pengabdian masyarakat yang lebih terencana, terarah dan terpadu, sambil menginternalisasikan kepekaan dan kesalehan sosial Civitas Academica. Sifat-sifat Sidik, Amanah, Fathonah dan Tablig, selayaknya menjadi citra diri Pekerja Sosial di Indonesia.

Optimalisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu peran Pendidikan Kesejahteraan Sosial dalam perkembangan kehidupan sosial tercermin dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu dharma pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Dengan dharma pendidikan diharapkan perguruan tinggi dapat mencerahkan masyarakat. Dengan

dharma penelitian diharapkan dapat melakukan temuan-temuan inovasi teknologi Pekerjaan Sosial. Adapun dharma pengabdian masyarakat diharapkan mampu mengaplikasikan kompetensi Pekerjaan Sosial dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat. Optimalisasi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi antara lain dengan mengemas substansinya agar relevan dengan kebutuhan masyarakat khususnya dalam rangka mengatasi masalah sosial di masyarakat. Masalah sosial dapat didekati dari sisi akademis untuk dapat diurai dan dipahami, kemudian masalah sosial dapat dikaji, diteliti agar menghasilkan solusi atau model penanganan yang tepat cara dan diterapkan melalui pengabdian masyarakat dalam kesempatan sesegera mungkin

5. Komponen Kemampuan Dasar Profesi Pekerjaan Sosial

a. Memahami Komponenn Dasar Pekerjaan Sosial

Profesi pekerjaan sosial adalah yang pertama dalam pelayanan manusia yang memberikan fokus kepada manusia dalam lingkungan sebagai suatu paradigma dalam melakukan asesmen dan perubahan. Kerangka biopsikososial spiritual pekerjaan sosial menawarkan suatu perspektif yang luas dalam perilaku manusia. Kerangka ini digunakan untuk mengakses berbagai situasi dalam konteks komunitas, keluarga, dan lingkungan sosial yang lebih luas. Situasi dipahami sebagai gabungan anatar faktor-faktor fisik, psikologis, sosial, dan spiritual.

Dengan kata lain, kebutuhan manusia dan sumber-sumber untuk memenuhi kebutuhan tersebut dipandang sebagai kesatuan yang saling terkait. Mengingat akses terhadap sumber-sumber-sumber untuk kelangsungan hidup dan pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan adalah faktor yang sangat penting dalam asesmen, maka intervensi pekerjaan sosial untuk perubahan biasanya difokuskan pada individu, keluarga, komunitas dan lingkungan agar terjadi perubahan dalam alokasi dan ketersediaan sumber-sumber untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Keterampilan intervensi pekerjaan sosial adalah melakukan perubahan pada tingkat mikro dan makro (individu dan komunitas). Pekerja sosial mempelajari keterampilan untuk bekerja dengan individu, keluarga, kelompok kecil, dan komunitas.

Pada tingkat individu dan keluarga, pekerja sosial membantu menangani situasinya dengan mengaitkan mereka pada berbagai sumber dan mendukung kekuatan individu dan keluarga sebagai sumber untuk perubahan. Pada tingkatan komunitas pekerja sosial, hal ini juga membantu mengembangkan sumber dan merencanakan layanan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Keterampilan dan pengetahuan yang harus dimiliki secara konsep teoritis, seperti dijelaskan Enny Supit, Albert R. Robert and Gilbert J. Greene: 2008), menyebutkan:

1) Menguasai Keterampilan Pekerjaan Sosial

Dasar Pekerjaan Sosial Pekerjaan sosial adalah suatu bidang yang melibatkan interaksi diantara orang dengan lingkungan sosialnya, yang menggunakan kemampuan orang untuk menyelesaikan tugas-tugas kehidupan mereka, mengatasi

penderitaan, dan mewujudkan aspirasi-aspirasi serta nilai-nilai mereka.

Pekerjaan sosial yang telah didefinisikan di atas mempunyai tujuan-tujuan seperti yang dikemukakan oleh Soetarto (1993) yang menjelaskan tentang keterampilan yang dimiliki oleh seorang pekerja sosial, yaitu:

- a) Meningkatkan kemampuan orang untuk menghadapi tugas-tugas kehidupannya dan kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.
- b) Mengkaitkan orang dengan sistem-sistem yang dapat menyediakan sumber-sumber pelayanan-pelayanan dan kesempatan-kesempatan yang dibutuhkan.
- c) Meningkatkan kemampuan pelaksanaan sistem-sistem tersebut secara efektif dan berperikemanusiaan.
- d) Memberikan sumbangan bagi perubahan, perbaikan, dan perkembangan kebijakan serta perundang-undangan. Didalam prakteknya pekerjaan sosial didasarkan atas pengetahuan dan keterampilan yang diorientasikan melalui tindakan.

- 2) **Menguasai Pengetahuan pekerjaan sosial**, yaitu : "Human Behavior and social environment, social welfare system, methods of social work, and research". Dengan demikian maka tanggung jawab utama seorang pekerja sosial adalah menerapkan pengetahuan dalam pemecahan masalah. Oleh sebab itu praktek pekerjaan sosial sebagai pelayanan profesional dapat dipertanggungjawabkan, karena pada dasarnya praktek ini menerapkan/mewujudkan pengetahuan (knowledge) dan nilai (value). Untuk dapat mempraktekkan

secara bertanggung jawab, maka diperlukan keterampilan-keterampilan (skills). Naomi I. Brill dan Leonora Serafica de Guzman menyatakan bahwa keterampilan-keterampilan pekerjaan sosial adalah terdiri dari :

- a) *Differential Diagnosis*, keterampilan ini berhubungan dengan kemampuan pekerja sosial untuk memahami keunikan klien serta situasinya serta menyesuaikan tekniknyanya terhadap klien. Disini pekerja sosial diharapkan mampu mendiagnosa perbedaan-perbedaan tersebut, berarti tidak dibenarkan untuk menangani masalah dengan cara yang sama.
- b) *Timing*, manusia pada dasarnya mempunyai masalah terus menerus. Namun didalam menangani atau memecahkan suatu masalah, seorang pekerja sosial dibatasi oleh waktu, disini berarti pekerja sosial harus mempunyai keterampilan untuk merencanakan dan menggunakan waktu secara tepat.
- c) *Partialization*, masalah pada dasarnya kompleks, yaitu luas dan komprehensif. Untuk dapat memahaminya para pekerja sosial harus mempunyai keterampilan untuk memisahkan-misahkan serta membantu klien memikirkan masalah itu dan memutuskan dimana titik mulai penanganan masalah.
- d) *Focus*, masalah sosial mempunyai banyak dimensi dan masing-masing dimensi saling berinteraksi. Untuk itu pekerja sosial harus mampu memfokuskan salah satu dimensi sebagai *point of entry*.
- e) *Establishing Partnership*, Keterampilan ini berhubungan dengan kerja bersama antara pekerja sosial dengan klien

dalam memahami tugas-tugas dan peranan-peranan satu sama lainnya.

- f) Struktur, Keterampilan penstrukturan berhubungan dengan kemampuan pekerja sosial untuk menentukan setting dan batas-batas yang dapat lebih berguna terhadap pekerjaan yang akan dilakukan. Disini ditentukan dapat tidaknya dilakukan, kapan, dan dimana diadakan konsultasi, hal-hal apa yang diperlukan dan sebagainya. (Brill, 1978:128-132 dan Guzman 1983:100-104).

Sedangkan keterampilan-keterampilan dasar yang perlu dimiliki oleh pekerja sosial dikemukakan Armando Morales dan Bradford W. Shear sebagai berikut :

- a) Basic helping skills yaitu keterampilan dasar dari pekerja sosial. Antara lain penerapan skill di dalam berhubungan dengan klien (relationship); cara bertindak yang rasional termasuk kemampuan mengumpulkan data collection, kemampuan mengumpulkan data analisis dan aksi.
- b) Engagement skills, adalah proses melayani orang sebelum menjadi klien, pekerja sosial dapat menjelaskan pelayanan apa yang ada pada lembaga tempat ia bekerja dan calon klien tersebut sebaiknya mengetahui lembaga pelayanan yang ada di luar.
- c) Observation skills, yaitu keterampilan untuk melakukan pengamatan. Pekerja sosial bukan hanya mengamati dengan mata dan telinga tetapi juga dengan hati.
- d) Communication skills, yaitu kemampuan berkomunikasi. 5. Emphaty skills, yaitu keterampilan untuk merasakan apa yang sedang dirasakan orang lain hingga kita

dapat menggunakan akal pikiran kita untuk membantu memecahkan masalah.

Selanjutnya pekerja sosial harus memahami berbagai pendekatan lain di luar keterampilan-keterampilan tersebut di atas dan dapat memilih satu diantaranya yang paling tepat untuk suatu tujuan tertentu. Akan tetapi seringkali pekerja sosial dihadapkan pada satu situasi yang mengandung prasangka-prasangka teoritis; terpaku pada teori-teori ilmiah tertentu yang dapat mempengaruhi usahanya untuk menyusun tugas-tugas dalam pekerjaannya dan juga tujuan-tujuannya. Dengan kata lain, ada suatu anggapan, bahwa terdapat kesenjangan antara teori yang dipelajari dengan praktek yang dilaksanakan dalam proses pemberian bantuan. Dengan demikian, keterampilan pekerjaan sosial perlu diarahkan kepada situasi dan kondisi permasalahan yang sering timbul di masyarakat agar praktek pemberian bantuan dari pekerjaan sosial dapat berfungsi secara taat waktu dan taat asas.

b. Memahami Landasan Sikap Profesional Pekerjaan Sosial.

Dalam praktek pekerjaan sosial sikap pekerja sosial akan selalu dipengaruhi oleh berbagai nilai. Pekerjaan sosial menyatakan pentingnya nilai-nilai sebagai suatu dimensi yang besar dalam praktek profesionalnya. Oleh sebab itu pekerja sosial menempatkan posisi yang didasarkan atas suatu nilai-nilai. Nilai-nilai secara umum dapat diartikan sebagai pusat pandangan setiap orang tentang bagaimana menjalani hidup ini. Artinya nilai-nilai merupakan suatu pedoman tingkah laku bagi setiap orang dalam melakukan tindakan di suatu lingkungan

tertentu guna mencapai tujuan-tujuannya. Praktik pekerjaan sosial selalu berdasarkan pada nilai masyarakat, karena profesi pekerjaan sosial mendapat misi untuk melaksanakan sebagian dari fungsi masyarakat. Oleh sebab itu praktik pekerjaan sosial akan mengambil dan dipengaruhi oleh nilai masyarakat. Jadi suatu profesi harus selaras dengan nilai-nilai masyarakat. Praktik pekerjaan sosial di Indonesia harus yang sesuai dan mendukung nilai masyarakat Indonesia. Pengetahuan pekerjaan sosial dapat diambil dari mana saja, tetapi kita perlu menyaringnya untuk disesuaikan dengan nilai masyarakatnya. Nilai belum tentu merupakan hal yang dipraktikkan di dalam masyarakat atau dengan kata lain apa yang dipraktikkan di dalam masyarakat belum tentu merupakan kegiatan untuk mencapai atau melaksanakan nilai. Jadi nilai masyarakat sebagai salah satu sumber nilai profesi, karena profesi sebenarnya lahir sebagai perwujudan dari pelaksanaan nilai masyarakat. Konsep nilai banyak dibahas didalam literatur pekerjaan sosial, karena nilai mempunyai pengaruh yang sangat besar didalam pelaksanaan praktek pekerjaan sosial. Pekerja sosial dalam melaksanakan tugas-tugasnya selalu dipengaruhi oleh nilai-nilai, menurut Armando Morales dan Bradford W. Sheafor sebagai berikut : Nilai pekerjaan sosial yang meliputi:

1. nilai-nilai personal (personal value)
2. nilai-nilai profesi (profesional value)
3. nilai-nilai pribadi (values of client's)

Nilai lembaga tempat pekerja sosial bekerja, adalah nilai masyarakat dimana praktek pekerjaan sosial dilaksanakan. Nilai-

nilai dasar pekerjaan sosial berasal dari nilai-nilai masyarakat demokratis yang menekankan penghargaan pada martabat dan harga diri manusia, serta antar hubungan yang saling menuntungkan diantara individu dengan masyarakat. Kemudian didalam prakteknya, nilai-nilai tersebut dirunuskan menjadi prinsip-prinsip dasar pekerjaan sosial yang akan menjadi landasan bagi praktek pekerjaan sosial profesional.

Prinsip-prinsip dasar pekerjaan sosial tersebut meliputi :

1. keyakinan akan martabat dan harga diri manusia,
2. keyakinan akan adanya hak manusia untuk menentukan nasibnya sendiri,
3. keyakinan akan adanya hak yang sama bagi setiap manusia,
4. serta keyakinan akan adanya tanggung jawab sosial dalam pelaksanaan tugas-tugas kehidupan setiap manusia termasuk tugas profesionalnya.

Selanjutnya dalam praktek, pekerjaan sosial dituntut untuk mengenali, memahami, serta menginternalisasikan beberapa nilai sebagai berikut :

1. Penerimaan (acceptance)
2. Komunikasi (communication)
3. Partisipasi (participation)
4. Bersikap adil, tidak terlalu memuji ataupun mencela, yaitu terbagi menjadi:

1. menghargai kerahasiaan dari privacy kliennya
2. mawas diri pada pekerja sosial
3. memakai rasio dalam memberikan tanggapan yang objektif
4. fleksibel

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa sikap pekerja sosial yang dilandasi prinsip-prinsip dasar profesional, nilai-nilai masyarakat secara umum serta nilai-nilai masyarakat tempat dilaksanakannya praktek pekerjaan sosial, pada dasarnya sikap profesional tersebut terletak pada pengendalian diri pekerja sosial untuk tetap mampu bersikap objektif tanpa pernah kehilangan sikap sebagai manusia biasa. Dapat pula diartikan, sikap profesional pekerja sosial terutama berarti kemampuannya untuk mengenali dan menggunakan dirinya sendiri dalam suatu hubungan profesional dengan kliennya. Seperti juga hal pekerja sosial harus memilih kemampuan untuk memahami berbagai aspek pada klien serta lingkungan. Pemilikan sikap profesional tersebut merupakan proses dan merupakan hasil belajar dari para pekerja sosial itu sendiri baik dari penelaahannya maupun pengalamannya secara praktis. Pemilikan sikap tersebut tidak diragukan lagi dalam proses pemberian bantuan, sehingga hubungan pemberian bantuan bukan diciptakan oleh teknik-teknik pemberian bantuan melainkan oleh pemberi bantuan itu sendiri dalam hal ini adalah pekerja sosial profesional.

Selanjutnya sebagai petunjuk dan pedoman sikap pekerja sosial dalam praktek profesionalnya, maka harus ada kode etik profesional bagi pekerja sosial yang memberikan tuntutan bagi prakteknya dalam menerapkan pelayanan pekerjaan

sosial profesional. Sedangkan kode etik ini, mengungkapkan standar-standar tingkah laku tertentu bagi pekerja sosial. Dalam hubungan profesionalnya dengan mereka yang dilayaninya. Dalam mematuhi kode etik ini pekerja sosial memandang kewajiban-kewajiban yang tercantum didalamnya sesuai dengan situasi yang dihadapinya, memasukan semua prinsip-prinsip ke dalam pertimbangannya, serta memilih suatu rangkaian kegiatan yang selaras dengan jiwa dan hakekat kode etik tersebut.

Kode etik merupakan rumusan atau standar atau tuntunan tentang perilaku yang dianggap baik dan yang perlu ditunjukkan oleh anggota profesi dalam melaksanakan tugasnya. Tujuan dan fungsi kode etik profesi adalah sebagai berikut:

1. Melindungi reputasi ptofesi dengfan jalan memberikan kriteria-kriteria yang dapat diikuti untuk menghatut tingkah laku anggotanya.
2. Secara terus menerus meningkatkan kompetensi dan kesadaran tanggung jawab bagi para anggotadi dalam melaksanakan praktek.
3. Melindungi masyarakat dari praktek-praktek yang tidak kompeten.

Kode etik pada prinsipnya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan proses pertolongan pekerjaan sosial yasng mengatur komponen-komponen proses pertolongan pekerjaan sosial yaitu: pekerja sosial, klien, teman sekerja, badan sosial tempat pekerja sosial bekerja, profesi pekerja sosial dan masyarakat tempat proses pertolongan diberikan.

Namun demikian, kode etik yang saat ini dipakai dan dijadikan pedoman oleh pekerja sosial di Indonesia adalah kode etik yang berasal dari Amerika Serikat (National Association of Social Welfare), walaupun tetap dapat digunakan sebagai pedoman sikap para pekerja sosial dimanapun.

Dalam hubungannya dengan perumusan dan penetapan kode etik tersebut, pekerjaan sosial di Indonesia sebagai profesi sudah ada, tetapi belum diketahui oleh sebagian besar masyarakat karena belum ada kejelasan praktek profesinya.

Dibandingkan dengan profesi lainnya, profesi kita belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Untuk sementara ini profesi pekerjaan sosial di Indonesia sedang dalam taraf untuk mewujudkan eksistensinya. Oleh karena itu pada saat ini para pekerja sosial Indonesia membutuhkan kode etik untuk melandasi praktek pekerjaan sosial profesional. Dan sedikit demi sedikit sejalan dengan tujuan profesi pekerjaan sosial tersebut. Kemudian dengan telah terbentuknya kode etik tersebut diharapkan dapat merangsang pekerja sosial untuk meningkatkan kualitas praktek pekerjaan sosial profesionalnya. Dan dengan praktek-prakteknya tersebut dapat menyempurnakan kembali kode etik.

Untuk memberikan dasar pembenaran yang kuat bagi intervensi atau praktek yang dilaksanakannya. Maka, pekerja sosial dalam bersikap akan menempati posisinya yang dilandasi oleh suatu nilai yang telah tercermin di dalam prinsip-prinsip umum pekerjaan sosial. Dimana sikap yang mendasari

pekerja sosial dalam memberikan bantuan adalah memiliki rasa cinta sehingga dia memiliki kemampuan dan kepekaan untuk mengenali dan menggunakan dirinya sendiri dalam suatu hubungan profesional dengan kliennya dalam proses pemberian bantuan. Sebagai petunjuk dan pedoman sikap serta tindakan-tindakan dalam praktek profesionalnya, maka terdapat pula kode etik profesional bagi pekerjaan sosial yang memberi tuntunan bagi prakteknya dalam menerapkan pelayanan pekerjaan sosial di masyarakat.

Untuk mengembangkan praktek pekerjaan sosial profesional di Indonesia harus mempunyai sikap yang mendasar, yaitu sikap optimisme juga dalam rangka lebih memperkenalkan profesi pekerjaan sosial tersebut hendaknya para pekerja sosial dapat meningkatkan kualitas prakteknya serta bekerja dalam segala bidang yang mengarah pada usaha kesejahteraan sosial pada umumnya.

Pekerjaan sosial adalah suatu bidang yang melibatkan interaksi-interaksi antara manusia dengan lingkungan sosialnya, yang menggunakan kemampuan orang untuk menyelesaikan tugas-tugas kehidupan mereka, mengatasi penderitaan, dan mewujudkan aspirasi-aspirasi serta nilai-nilai mereka. Di dalam melaksanakan pekerjaannya, pekerja sosial tidak terlepas dari beberapa keterampilan khusus yang didasari oleh ilmu pengetahuan ilmiah serta sikap profesional. Keterampilan-keterampilan khusus tersebut tidak menjamin keberhasilan pekerja sosial dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan tujuan-tujuan pekerjaannya. Hal ini disebabkan, adanya pandangan-

pandangan dan teori-teori ilmiah yang masih berorientasi kepada konsep dari negara barat. Untuk itu dibutuhkan adanya konsep keterampilan pekerjaan sosial tersendiri yang sesuai dengan kondisi negara Indonesia

6. Pekerjaan Sosial Dan Jenjang Karirnya sebagai Profesi

- a. **Deskripsi Karier**, Pekerja sosial (Social worker) merupakan profesi yang memberikan bantuan ataupun pertolongan berupa pelayanan pada individu, kelompok, maupun masyarakat yang membutuhkan. Pekerja sosial juga bisa dimaknai sebagai profesi pelayanan sosial yang bermuara pada kerja kemanusiaan, atau disebut dengan istilah *helping profession*. Hal ini bisa diartikan bahwa pekerja sosial akan menolong orang lain supaya mampu menolong dirinya sendiri (*to help people to help themselves*).
- b. **Kiprah** pekerja sosial bisa dijumpai dalam berbagai situasi. Misalnya, penanganan kemiskinan, penanggulangan bencana, penanganan orang dengan kecacatan, perlindungan anak, pengembangan masyarakat, dan masih banyak lagi. Kenapa pekerja sosial bisa dijumpai dalam segala kondisi? Karena para pekerja sosial punya komitmen untuk mengambil bagian dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera juga lingkungan yang aman dan nyaman. Maka dari itu, para pekerja sosial aktif mendorong perubahan sosial dalam interaksi antara manusia juga lingkungannya. Mengutip Sindonews.com, pekerja sosial

diharapkan mampu melampaui tugas kemanusiaan yang lebih luas. Misalnya, dalam mencegah dan menangani kejahatan lintas negara seperti sindikat human trafficking, penyelundupan narkoba, terorisme, eksploitasi lingkungan hidup yang masif dan sebagainya. Selain itu, seperti disadur dari Sindonews.com, pekerja sosial juga diharapkan dapat secara aktif terlibat dalam mengembangkan kapasitas manusia, melestarikan lingkungan hidup, melakukan pemberdayaan ekonomi, dan pada di proyek pembangunan sosial lainnya.

- c. **Peran dan Tanggung Jawab Pekerjaan Sosial**, adalah membantu individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat dalam mengakses sumber daya yang ada, yaitu peran dan tanggung jawabnya, adalah sebagai berikut:
- a) Mengidentifikasi masalah dan mengembangkan kapasitas sumber daya yang ada agar dapat mengatasi masalah untuk pemenuhan kebutuhannya.
 - b) Menghubungkan individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat dengan lembaga pemberi pelayanan masyarakat.
 - c) Menyampaikan informasi dengan baik dan benar serta mudah diterima oleh individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat yang menjadi sasaran perubahan.
 - d) Mengumpulkan data mengenai masalah sosial yang dihadapi individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat.
 - e) Melakukan analisis terhadap data masalah sosial dan

menyajikan alternatif tindakan yang rasional dalam mengakses sumber daya yang ada.

- d. Pekerja sosial(-social worker) juga harus memiliki **Pengetahuan dan Kemampuan** tentang:

- a) Pengetahuan dan Keahlian
- b) Kemampuan meneliti
- c) Kemampuan melakukan analisis
- d) Kemampuan observasi
- e) Kemampuan berpikir kritis
- f) Kemampuan manajerial
- g) Keterampilan komunikasi
- h) Orientasi layanan
- i) Penguasaan bahasa asing



TANTANGAN KIPRAH PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL DI INDONESIA

A. TANTANGAN KIPRAH PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL DI INDONESIA

1. Pengaruh Eksternal dan Internal Pekerja Sosial

Profesi pekerjaan sosial di Indonesia saat ini tidak dapat terlepas dari pengaruh luar (eksternal) dan pengaruh dalam (internal). Pengaruh luar dimaksud terkait dengan hubungan antar-negara, terutama dengan negara-negara di wilayah ASEAN. Sementara pengaruh dalam dimaksud terkait dengan perkembangan organisasi profesi, pendidikan profesi, dan peraturan-peraturan yang menyangkut profesi pekerjaan sosial.

Salah satu yang cukup berpengaruh terhadap perkembangan profesi pekerjaan sosial di Indonesia yaitu kesepakatan mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Pada Konferensi Tingkat Tinggi di Kuala Lumpur Desember 1997 silam Para Pemimpin ASEAN memutuskan untuk mengubah ASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur, dan sangat kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang adil, dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi (ASEAN Vision 2020).

Selanjutnya pada Konferensi Tingkat Tinggi di Bali pada bulan Oktober 2003, para pemimpin ASEAN menyatakan bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan menjadi tujuan dari integrasi ekonomi regional pada tahun 2020, ASEAN Security Community dan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN dua pilar yang tidak terpisahkan dari Komunitas ASEAN.

Semua pihak diharapkan untuk bekerja secara yang kuat dalam membangun Komunitas ASEAN pada tahun 2020. Konferensi tersebut ditindaklanjuti melalui pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN yang diselenggarakan pada bulan Agustus 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia, yang bersepakat untuk memajukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dengan target yang jelas beserta jadwal pelaksanaannya. Pada KTT ASEAN ke-12 pada bulan Januari 2007, para Pemimpin negara ASEAN menegaskan komitmen mereka yang kuat untuk mempercepat pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 yang diusulkan di ASEAN Vision 2020 dan ASEAN Concord II, dan menandatangani Deklarasi Cebu tentang Percepatan Pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015.

Secara khusus, para pemimpin sepakat untuk mempercepat pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dan mengubah ASEAN menjadi daerah dengan perdagangan bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang lebih bebas. Masyarakat Ekonomi Asean tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional, seperti dokter, pengacara, akuntan, pekerja sosial profesional, dan lainnya.

MEA akan lebih membuka peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia yang tertutup atau minim tenaga asingnya. Terkait dengan MEA sebagai salah satu wujud adanya globalisasi, industrialisasi dan privatisasi telah menyebabkan transformasi pada institusi sosial, komunitas, relasi manusia dan nilai-nilai sosial. Hal ini telah menimbulkan kualitas dan kuantitas masalah sosial yang semakin kompleks dan meningkat. Selama era sentralisasi di Indonesia, banyak hal dilakukan langsung oleh pusat.

Akan tetapi, semakin lama desakan daerah memperjuangkan kemandirian dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat semakin besar. Munculah desentralisasi, penguatan peran masyarakat dan partisipasi swasta. Sementara itu, perkembangan profesi pekerjaan sosial di Indonesia tidak lepas dari keberadaan ikatan profesi pekerjaan sosial. Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI) adalah nama organisasi profesi pekerjaan sosial di Indonesia. Pada Anggaran Dasarnya disebutkan, IPSPI didirikan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 1998 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Tujuan IPSPI sebagaimana disebutkan pada Anggaran Dasarnya adalah:

- 1) Mewadahi Pekerja Sosial Profesional di Indonesia
- 2) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan professional Pekerja Sosial Indonesia
- 3) Memberikan arah bagi standarisasi praktek pekerjaan sosial dan izin praktek bagi pekerjasosial

- 4) Memberikan perlindungan kepada anggota dan masyarakat penerima pelayanan Pekerja Sosial
- 5) Membina kerjasama guna kemajuan dalam pengembangan keilmuan dan profesionalisme anggota melalui pemupukan rasa kekeluargaan sesama anggota dan meningkatkan kerja sama dengan organisasi keilmuan dan profesi lainnya baik di dalam maupun di luar negeri
- 6) Melaksanakan pembangunan nasional Indonesia pada umumnya, serta secara khusus pembangunan sosial dan pelayanan kesejahteraan sosial.

Untuk mencapai tujuan itu, usaha-usaha yang diadakan adalah:

- 1) Melaksanakan registrasi anggota sesuai dengan persyaratan
- 2) Penelitian dan pengembangan pekerjaan sosial. Dalam bidang penelitian, mendorong makin berkembangnya kondisi yang memungkinkan kegiatan penelitian, pembinaan tenaga peneliti dan mengintensifkan publikasi hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah serta mendorong kegiatan penelitian baik melalui kerjasama dengan Lembaga pemerintah maupun swasta baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam bidang pengembangan ilmu dan profesi dilakukan beberapa upaya untuk mengembangkan metoda, kebijakan dan praktek pekerjaan sosial serta di lembaga pemerintah maupun swasta. Kegiatan ini antara lain dilakukan melalui temu ilmiah, seminar ataupun symposium

- 3) Praktek pekerjaan sosial professional yaitu praktek pelayanan baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan metoda praktek pekerjaan sosial
- 4) Pembinaan anggota
- 5) Melaksanakan pengembangan pendidikan dan latihan dalam rangka meningkatkan kemampuan professional, karir dan kesejahteraan anggota
- 6) Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan ilmiah dalam dalam rangka pengembangan profesi maupun untuk memecahkan berbagai permasalahan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat
- 7) Menerbitkan media profesi
- 8) Menyediakan berbagai fasilitas bagi kemudahan praktek pekerjaan sosial bagi para anggotanya
- 9) Melakukan pembinaan terhadap para calon/asisten pekerja sosial dalam rangka meningkatkan standard praktek minimal
- 10) Melaksanakan pembangunan nasional Indonesia pada umumnya, serta secara khusus pembangunan sosial dan pelayanan kesejahteraan sosial. Anggota IPSPI adalah lulusan perguruan tinggi Pekerjaan Sosial/Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Selain itu IPSPI mengatur status keanggotaan lainnya yaitu anggota rekan. Anggota rekan yaitu mereka yang tidak berlatar belakang pendidikan pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial namun berkontribusi dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dan mendaftarkan keanggotaannya di IPSPI.

Keberadaan organisasi profesi sebagai wadah bernaung menjadi langkah penting dalam membangun akuntabilitas pekerjaan sosial sebagai sebuah profesi yang mampu merespon perubahan dan perkembangan lingkungan pada berbagai aspek. Perubahan-perubahan sosio-budaya, ekonomi bahkan politik yang begitu cepat telah memberi implikasi kepada profesi pekerjaan sosial. Demikian pula penerapan ISO yang diberlakukan di negara maju merupakan tantangan yang harus direspon.

Profesi pekerjaan sosial harus didorong terus sehingga mampu menerapkan standard yang bersifat nasional bahkan internasional. Oleh sebab itu, pendidikan dan latihan serta standarisasi dan sertifikasi pekerjaan sosial memainkan peranan yang amat penting dalam membentuk 'direction' dan eksistensi profesi pekerjaan sosial.

Sebagai bentuk upaya meneguhkan keberadaan profesi pekerjaan sosial sebagai profesi yang akuntabel, maka pada tahun 2009 diterbitkan Peraturan Menteri Sosial RI No.18/HUK/2009 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagai salah satu bentuk pengejawantahan dari UU No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.¹⁶ Peraturan Menteri yang telah memberikan payung hukum dan legalitas dan sertifikasi dalam bidang praktek pekerjaan sosial juga tentang pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi.

Oleh karena itu, pekerja sosial didorong untuk merealisasikan amanat tersebut. Isue masalah masyarakat

Indonesia saat ini Perkembangan lingkungan yang terjadi pada tingkat domestik, regional, maupun global berimplikasi terhadap kehidupan bermasyarakat dan mewarnai berbagai bidang kehidupan. Berbagai isue pada beberapa bidang yang terjadi sebagai akibat dari perkembangan domestik, regional, maupun global membawa Indonesia pada situasi yang kritis, yang membutuhkan penanganan dimana pekerja sosial dapat menajdi bagiannya.

Beberapa isue yang teridentifikasi dalam kaitannya dengan perkembangan lingkungan tersebut adalah:

1. Demokrasi, otonomi daerah dan good governance Pada bidang ini, isue-isue yang muncul meliputi permasalahan:
 - a) Issue-issue primordial (krisis kepercayaan, konflik etnik dan kedaerahan).
 - b) Negara (pusat) mendistribusikan tugas dan tanggungjawab pembangunan dan pemecahan masalah sosial kepada daerah.
 - c) Daerah mempunyai otonomi untuk menata struktur pemerintahan, ekonomi dan pembangunan kesejahteraan sosial.
 - d) Politisasi massa.

Selain terjadinya masalah, pada bidang ini pun muncul pula beberapa peluang yang akan berguna bagi pembangunan, yaitu:

- a) Penguatan kelembagaan pemerintah daerah dan institusi lokal untuk menunjang program pembangunan daerah dan nasional.
 - b) Perlu peningkatan kadar dan mutu pelayanan sosial untuk mengatasi masalah sosial.
 - c) Perlu SDM pekerja sosial baik yang terampil maupun yang ahli.
 - d) Ketertiban dan kepatuhan hukum dan Resolusi konflik
 - e) Peningkatan peran pasar dan sektor nirlaba sehubungan dengan perampingan kewenangan dan tugas pemerintah.
2. Akses Informasi Nirbatas. Permasalahan yang muncul dengan semakin mudah dan tidak terbatasnya akses terhadap informasi adalah penyalahgunaan sarana informasi (seperti pornografi dan pornoaksi), pelecehan seksual, serta penyalahgunaan substansi. Selain permasalahan, hal-hal yang muncul dari semakin terbukanya dan tidak terbatasnya akses informasi adalah adanya peluang-peluang yang meliputi:
- a) perluasan jaringan pelayanan social
 - b) peningkatan kualitas pelayanan social
 - c) dukungan terhadap advokasi hak orang-orang terpinggirkan (Community Action)
3. Pasar global dan gejala post-industrialis Permasalahan yang muncul seiring dengan adanya pasar global dan gejala post-industrialis mencakup kondisi dan struktur keluarga serta kehidupan sosialnya. Struktur keluarga

cenderung menjadi keluarga nuklir dan cosmopolitan. Selain itu, terjadi juga alienasi post-modernis yang ditandai dengan adanya keterasingan pada orang-orang yang berada dalam kehidupan masyarakat yang sibuk. Dalam masyarakat yang demikian, fungsi keluarga pun mengalami marginalisasi.

Keluarga yang tadinya diharapkan akan menjadi tempat mencetak calon-calon anggota masyarakat terampil, sehat dan membawa masyarakat ke arah kemajuan, mampu membangun kehidupan sosial dan jaringan sosial yang baik. Adanya daya tarik kota yang kuat membuat warga desa berlomba-lomba untuk dapat memanfaatkan sumberdaya di perkotaan. Ketidaksiapan mereka untuk menjalani hidup di perkotaan dan ketidakmampuan kota menyediakan sumber menyebabkan tumbuhnya kemiskinan di perkotaan.

Kota-kota besar selalu menjadi daerah yang menarik untuk dijadikan tujuan sehingga dibanjiri oleh para urbanisasi. Bila memperhatikan struktur keluarga yang terjadi pada masa kini, maka akan ditemui strukturnya yang semakin ramping. Keluarga-keluarga cenderung hidup sebagai keluarga inti semata.

Mereka seolah-olah terpisahkan dari keluarga besarnya. Segala kebutuhan dan permasalahan yang dialami keluarga akan diatasi secara mandiri oleh keluarga intinya. Keluarga besar tidak memberikan pengaruh yang cukup berarti kepada keluarga inti. Hubungan-hubungan sosial lebih banyak

dibangun melalui kegiatan-kegiatan yang instrumental pada organisasi-organisasi yang sifatnya sekunder.

Pertemuan keluarga besar dilakukan melalui pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan secara semi formal seperti arisan keluarga atau pada saat hari raya keagamaan. Pada sisi yang lain, globalisasi juga membuka peluang untuk berkembangnya berbagai bentuk pelayanan sosial yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan permasalahannya. Indonesia memiliki kesempatan untuk belajar dari negara lain dalam menangani persoalan yang terjadi.

Berbagai bentuk pelayanan sosial yang sudah dikembangkan di negara lain dapat diadopsi untuk dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan di Indonesia. Globalisasi juga membuka pemikiran baru dalam melihat permasalahan dan penyelesaiannya. Pengkajian komponen sosial dengan disiplin ilmu lain.

Dengan dukungan ilmu sosial interpretif dan ilmu sosial kritik yang tidak “mengharamkan” nilai dalam penelitian dan analisisnya, dapat mendukung pengembangan dan penguatan landasan keilmuan, dan kerangka teori pekerjaan sosial. Komunikasi dan informasi yang semakin terbuka dengan semakin canggihnya teknologi dan media komunikasi. Dengan teknologi komunikasi yang semakin baik, maka seolah-olah setiap orang dapat melakukan komunikasi setiap saat tanpa terbatas. Seolah-olah tidak ada batas diantara pihak-pihak yang berinteraksi.

Batas negara tidak lagi menjadi halangan bagi mereka untuk berkomunikasi. Berbagai kemungkinan bentuk informasi yang berasal dari luar akan masuk dan bersentuhan dengan kondisi lokal. Informasi yang masuk senantiasa disertai nilai-nilai yang mempengaruhi nilai dan budaya masyarakat. Interaksi dengan budaya masyarakat lain akan menyebabkan perubahan dalam masyarakat.

Di sisi yang lain, komunikasi yang terbuka memberikan kesempatan untuk melakukan pengembangan jaringan/networking dengan sektor-sektor atau lembaga/departemen lain. Kebutuhan penyediaan sumber untuk penyelenggaraan pelayanan akan semakin banyak alternatifnya dengan berjejaring. Sumber-sumber yang tidak dapat disediakan sendiri dapat dengan mudah diperoleh dari pihak lain yang berjejaring dengannya. Pengembangan jaringan juga secara tidak langsung menanamkan kesadaran akan adanya keterbatasan yang dimiliki olehnya dalam memenuhi berbagai kebutuhan penyelenggaraan pelayanan.

4. Ketidaksetaraan sosial-ekonomi Permasalahan yang juga terjadi adalah pada aspek sosial ekonomi dimana terjadi kesenjangan kesenjangan ekonomi atau ketidaksetaraan ekonomi. Permasalahan yang terjadi pada sebagai akibat dari ketidaksetaraan ekonomi adalah terjadinya keterbelakangan, yaitu masyarakat tidak mampu mengikuti perkembangan dan kemajuan sebagaimana yang terjadi pada masyarakat lainnya. Selain itu terjadi

pula keterlantaran, tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar.

Terjadi pula kondisi dimana banyak warga masyarakat yang mendiami rumah yang tidak layak huni. Dalam menghadapi kondisi tersebut, terdapat beberapa peluang ataupun kesempatan untuk memperbaiki kondisi seperti itu. Beberapa pendekatan yang dapat dikembangkan antara lain adalah menyelenggarakan pelayanan yang berbasis masyarakat dengan cara melakukan pengembangan masyarakat.

Selain itu, dapat pula dilakukan penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan sosial dengan mengembangkan program-program pelayanan. Dapat pula menyelenggarakan program-program perlindungan sosial untuk memperbaiki dan menjaga warga masyarakat agar tidak mengalami masalah yang berkelanjutan.

5. Peningkatan Risiko/Kebencanaan Permasalahan yang juga mengancam masyarakat adalah masalah yang bersumber dari kondisi lingkungan. Permasalahan yang terjadi ini bisa disebabkan oleh ulah manusia sendiri yang tidak memiliki kepekaan sosial. Dia tidak bisa melihat bahwa perbuatan manusia terhadap lingkungan yang salah mengakibatkan kerusakan dan melemahkan daya dukung lingkungan terhadap kehidupan masyarakat. Selain itu, permasalahan ini dapat disebabkan kondisi alam yang diluar kendali manusia.

Dampak dari adanya bencana ini adalah korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan yang parah dan melemahkan daya dukung lingkungan terhadap kehidupan masyarakat, kerugian material akibat dari rusaknya lingkungan. Beberapa upaya dapat dilakukan oleh warga masyarakat melalui berbagai fasilitas dan dukungan berbagai pihak. Bentuk upaya tersebut adalah berupa manajemen bencana, peningkatan resistensi dan resiliensi yang sangat bagus.

Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keluarga mengatasi permasalahan dan mendukung anggota keluarga untuk melakukan upaya-upaya penanggulangan.. Pekerjaan Sosial Sebagai Solusi Mencermati perkembangan masalah masyarakat serta berbagai bentuk upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya, pekerjaan sosial dapat menjadi bagian dari upaya penyelesaian masalah tersebut.

Sebagai salah satu profesi pemberian pertolongan, khususnya dalam pertolongan masalah-masalah kemanusiaan, pekerjaan sosial memiliki metode dan pendekatan yang dikembangkan sebagai perangkat dalam pemberian pertolongan. Sebagaimana yang disampaikan oleh IFSW (2000) bahwa:

"The social work profession promotes social change, problem solving in human relationships and the empowerment and liberation of people to enhance well-being. Utilizing theories of human behavior and social systems, social work intervenes at the

points where people interact with their environments. Principles of human rights and social justice are fundamental to social work."

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Pekerja Sosial bukanlah kegiatan "charity", "relief", dan "dole out". Akan tetapi merupakan tenaga yang terdidik, terlatih dan professional untuk turut terlibat mengatasi permasalahan sosial.

Dari definisi tersebut juga nampak bahwa fungsi pekerjaan sosial adalah:

- a) Mendorong perubahan sosial
- b) Pemecahan masalah dalam hubungan kemanusiaan
- c) Pemberdayaan dan pembebasan;
- d) Pencapaian kesejahteraan,

Sebagai sebuah profesi, mekanisme kerja yang dikembangkan pekerjaan sosial didasarkan pada teori-teori dikembangkannya, yaitu teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial khususnya yang berkenaan dengan interaksi manusia dengan lingkungan mereka. Dalam praktiknya, pekerjaan sosial didasarkan pada nilai-nilai yang sangat fundamental bagi praktik pekerjaan sosial, yaitu penghormatan hak-hak asasi manusia dan keadilan sosial. Adapun tujuan dari Pekerjaan Sosial adalah untuk mendorong pembangunan kesejahteraan sosial berkelanjutan.

Untuk merealisasikannya, maka pekerjaan sosial mengupayakan untuk beberapa hal, yaitu:

- a) Meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah;
- b) Membantu memperoleh sumber,
- c) Membuat organisasi responsive dalam memberikan pelayanan sosial;
- d) Memberikan fasilitas interaksi antara individu dengan individu dalam lingkungan mereka;
- e) Mempengaruhi interaksi antara organisasi dengan institusi
- f) Mempengaruhi kebijakan sosial.

Beberapa Kecenderungan Pasar Pekerjaan Sosial Dalam perkembangannya, pekerjaan sosial menjalankan fungsinya dalam berbagai arena. Di Indonesia, mayoritas pekerja sosial dipekerjakan oleh pemerintah, terutama Kementerian Sosial pada beberapa program yang diselenggarakannya seperti menjadi Sakti Peksos dan Pendamping PKH. Selain itu, beberapa arena tempat para pekerja sosial di Indonesia berkiprah adalah Sub-sub sektor konvensional pelayanan kemanusiaan berupa panti-panti.

Fenomena lain yang berkembang beberapa tahun terakhir adalah meningkatnya kebutuhan pekerjaan sosial di sektor swasta untuk pelayanan-pelayanan khusus (HIV/AIDS, NARKOBA, Manula, Hospice), pekerjaan advokasi dan aplikasi dengan LSM, bekerja di LSM lokal, nasional dan internasional. Namun selain itu, para pekerja sosial tidak selalu harus bekerja

untuk pihak lain. Dia dapat bekerja sendiri sebagai “social entrepreneur”.

Relevansi dengan Standarisasi dan Sertifikasi Salah satu ciri dari suatu profesi adalah adanya standarisasi dalam hal kapabilitas dan kompetensi pelakunya. Seperti dinyatakan Mandinberg (dalam Dorita:2010) bahwa standarisasi adalah suatu proses yang tidak terelakan. Standarisasi adalah kepentingan profesi, penting bagi kita untuk memiliki titik persamaan untuk jangka panjang, walaupun standarisasi bukanlah hal yang besar bagi konsumen dan pasar karena bila produk yang dihasilkan memiliki kualitas baik, pasar tidak terlalu melihat standarisasi sebagai ukuran.

2. Standarisasi Kompetensi Pekerja Sosial

Bagi suatu profesi, standarisasi kompetensi yang menjadi dasar untuk melakukan langkah selanjutnya, yaitu sertifikasi adalah untuk:

- 1) Artikulasi dan advokasi profesi
- 2) Tuntutan kualiti (standar)
- 3) Tuntutan akuntabiliti (prinsip)
- 4) Monopoli bidang kerja dan pembatasan pasokan pasar.

Kelebihan sertifikasi profesi: Mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional dan internasional. Meningkatkan peluang karir profesional dan meningkatkan kredibilitas orang tersebut Menambah wawasan baru yang tidak didapat

pada saat menempuh pendidikan formal. Dapat meningkatkan posisi dan juga reputasi si profesional tersebut apabila sudah bekerja di dalam sebuah perusahaan. Memasuki era globalisasi dengan tingkat persaingan yang tinggi diperlukan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja bidang tertentu, professional, berkualitas tinggi, dan mampu bersaing sesuai dengan tuntutan zaman.

Sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing tinggi merupakan suatu tuntutan dunia profesi yang tidak dapat dihindari karena kompetensi tenaga kerja selalu berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehubungan dengan hal dimaksud, perlu disusun Standar Kompetensi Bidang Keahlian Pekerjaan Sosial. Tantangan globalisasi dan peningkatan kuantitas serta kualitas masalah sosial memerlukan SDM yang handal yang memiliki knowledge, skill & attitude agar dapat meningkatkan mutu pelayanan.

SDM Pekerjaan Sosial memainkan peranan penting dalam merespon perubahan tersebut. Kadar dan mutu pelayanan sosial sangat ditentukan oleh kualitas SDM Pekerjaan Sosial. Pendidikan pekerjaan sosial merupakan pencerminan dan bentuk respons terhadap perubahan sosio-ekonomi-budaya bahkan politik sebuah masyarakat.

Kualifikasi dan kompetensi SDM Kesejahteraan Sosial tercermin dari kompetensi pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai. Knowledge + Skills + Values = Competence. Oleh karena itu perlu dikembangkan pendidikan berbasis

kompetensi. Untuk menjamin penyelarasan antara pendidikan dan dunia kerja atau pasar/industry, diperlukan langkah-langkah Link and Match antara pendidikan dengan masalah dan kebutuhan masyarakat/pemerintah sesuai dengan prioritas pembangunan.

Upaya penjaminan ini diperlukan untuk memastikan adanya penyediaan SDM penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang memadai pada semua tingkatan. Kebutuhan SDM tidak hanya dalam konteks lokal, melainkan nasional bahkan internasional. Oleh karena itu, Standar kompetensi harus memperhatikan standar global, regional, nasional maupun lokal. Pendidikan pekerjaan sosial harus melakukan reinventing terhadap perubahan sosial, situasi politik dan budaya tradisional sekalipun.

Lembaga pendidikan tidak dapat mengabaikan perkembangan kebutuhan kualitas pekerja sosial dengan kualitas lulusan yang dihasilkannya. Pendidikan pekerjaan sosial yang diselenggarakan harus mampu bekerja secara efektif sesuai dengan tuntutan permasalahan. Hal ini tentu saja akan berimplikasi luas terhadap sistem penyelenggaraan pendidikan pekerjaan sosial, baik pada aspek infrastruktur maupun suprastrukturnya.

Agar para pekerja sosial mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif sebagai pekerja sosial professional, sistem pendidikan pekerjaan sosial perlu direorganisasi secara mendasar. Reorganisasi bisa mencakup kurikulum,

proses pendidikan, tenaga pengajar, pembimbing praktik lapangan, perpustakaan, buku teks, ataupun laboratorium lapangan pekerjaan sosial tempat para mahasiswa melakukan praktik lapangan.

Departemen Pendidikan Nasional perlu mereview dan mengevaluasi kurikulum pendidikan pekerjaan sosial yang ada dan mereorganisasinya. Untuk kelengkapan standarisasi dan sertifikasi pekerjaan sosial, perlu dikaji dan ditindaklanjuti tentang hal-hal yang berhubungan dengan pemberian lisensi atau ijin praktek, asesor serta uji kompetensi untuk pekerja sosial profesional. Peranan Pemerintah Dalam pengdsayagunaan sumberdaya manusia pekerja sosial peran pemerintah cukup strategis.

Berbagai kebijakan dapat dibuat untuk mengoptimalkan keberadaan pekerja sosial untuk mendukung pembangunan dan penyelesaian masalah sosial. Pemerintah Pusat dan Daerah dapat mengambil peran dan tanggungjawab untuk mendayagunakan SDM Pekerjaan Sosial, untuk berperan dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Salah satu implementasinya adalah penunjukkan pekerja sosial di tingkat kelurahan/desa.

Untuk penyelarasan antara kebutuhan pasar kerja dengan dunia pendidikan, Pemerintah Pusat dan daerah sepatutnya menganalisis kebutuhan SDM secara terperinci yang diperlukan dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Kepada mereka selanjutnya diberikan pendidikan dan pelatihan bagi SDM yang disesuaikan dengan kebutuhan Pusat dan daerah.

Organisasi profesi khususnya di daerah perlu mempergiat advokasi terhadap kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan semangat OTDA.

Dalam Undang-Undang Nomor 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial (sebagai pengganti UU No. 6/1974) tidak ada pasal yang mengatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi pekerja sosial professional. Karena itu perlu dibuat UU khusus tentang pekerjaan sosial yakni siapa pekerja sosial professional, persyaratan, jenjang pendidikan, kedudukan, tugas dan fungsinya, remunerasi pekerja sosial, serta kewajiban bagi lembaga pelayanan sosial menggunakan pekerja sosial professional sesuai dengan jenis dan beban tugas dan jumlah kelayannya.

Hal ini perlu ada demi pelayanan professional bagi warga masyarakat tidak beruntung yang sebagai warga negara berhak atas kehidupan mereka.



EKSISTENSI PEKERJA SOSIAL

A. EKSISTENSI PEKERJA SOSIAL

1. Pekerja Sosial untuk Menjangkau PMKS

Dalam berita sebuah televisi swasta dijelaskan bahwa kemampuan pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dalam menangani masalah sosial dalam lima tahun terakhir hanya menjangkau rata-rata sekitar 8% dari total Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mencapai sebanyak 15,5 juta jiwa. Dari fakta tersebut, maka dibutuhkan suatu profesi yang sangat berperan dalam hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Zastrow (2004) dalam *Introduction to Social Work and Social Welfare*, telah menggambarkan bahwa profesi utama yang paling berperan dalam pembangunan kesejahteraan sosial adalah Pekerjaan Sosial.

Selain itu, Zastrow pun menjelaskan bahwa pekerjaan sosial sebagai suatu profesi memiliki fungsi dan tugas pokok untuk memberikan pelayanan dalam rangka mencapai keberfungsian sosial orang melalui proses interaksi sosial. "Pekerjaan Sosial adalah sebagai profesi terdepan dalam pemberian pelayanan sosial untuk membantu orang, baik secara individual, kelompok, keluarga, maupun masyarakat, dalam memecahkan masalah

sosial yang dihadapinya. Tanggung jawab inilah yang menjadi misi utama Pekerja Sosial.

Misi utama Pekerja Sosial bukan sekedar membantu pemecahan masalah, tetapi juga menciptakan kondisi-kondisi kemasyarakatan pokok yang menunjang pencapaian tujuan itu. Hal tersebut dibutuhkan manusia agar mampu mengarungi kehidupan secara fungsional dalam menghadapi perubahan sosial yang cepat ini.” (Zastrow, 2004: 13) Selain itu, dalam referensi tersebut dipaparkan definisi lainnya. The National Association of Social Work (NASW) mendefinisikan pekerjaan sosial sebagai kegiatan professional membantu individu, kelompok, atau masyarakat meningkatkan atau mengembalikan kapasitas mereka untuk fungsi sosial dan menciptakan kondisi sosial yang menguntungkan untuk tujuan ini.

Praktik kerja sosial terdiri dari profesional penerapan sosial nilai kerja, prinsip, dan teknik untuk satu atau lebih untuk membantu orang mendapatkan pelayanan yang nyata (misalnya, yang melibatkan penyediaan makanan, perumahan, atau pendapatan); memberikan konseling dan psikoterapi dengan individu, keluarga, dan kelompok; membantu masyarakat atau kelompok menyediakan atau meningkatkan pelayanan sosial dan kesehatan; berpartisipasi dalam proses legislatif yang relevan. (NASW, 1973, p. 4-5).

NASW melaporkan bahwa Bob Etheridge (D-N.C.) sebagai wakil rakyat memberi penghormatan kepada pekerja sosial. Ia berbagi dengan pembicara dari DPR AS dan memberikan

komentar sebagai berikut: “Para pekerja sosial mempengaruhi kehidupan kita dalam banyak cara. Pekerjaan mereka menyentuh kita semua sebagai individu dan sebagai seluruh masyarakat. Mereka berpendidikan, sangat terlatih, dan berkomitmen profesional. mereka bekerja dalam pelayanan keluarga dan kesehatan mental masyarakat instansi, sekolah, rumah sakit, panti jompo, dan banyak lembaga swasta dan publik lainnya. Mereka mendengarkan, mereka peduli. Dan yang paling penting, mereka membantu mereka yang membutuhkan.” (Vallianatos, 2012)

Saat ini di Indonesia diperkirakan terdapat lebih dari 36.000 Pekerja Sosial professional lulusan dari 37 Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan Sosial. Sebagian besar dari jumlah Pekerja Sosial professional tersebut tergabung dalam Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI). Banyak dari mereka bekerja di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nasional maupun Internasional. Sebagian besar lagi bekerja di Instansi Pemerintah dan Lembaga pelayanan kesejahteraan sosial baik milik pemerintah maupun masyarakat (swasta).

Berdasarkan data populasi Pekerja Sosial tersebut, diketahui pula data sampai Mei 2013 jumlah Pekerja Sosial fungsional sebanyak 1.154 orang yang bekerja di instansi pemerintah pusat dan daerah. Dalam situasi dan kondisi perkembangan permasalahan sosial dan tuntutan publik terhadap orientasi kebijakan dan program pembangunan kesejahteraan sosial yang bertumpu pada keadilan untuk semua dan melindungi hak asasi

manusia pada masa yang akan datang, dibutuhkan tenaga tenaga profesional pekerjaan sosial.

Jika ratio Pekerja Sosial (Social Worker) dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial minimal satu berbanding 100, maka kebutuhan Pekerja Sosial di Indonesia paling sedikit sebanyak 155.000 orang. Estimasi jumlah PMKS tahun 2014 sebanyak 15,5 juta keluarga, sedangkan jumlah Pekerja Sosial saat ini sekitar 15.522 orang. Dengan demikian masih diperlukan sekitar 139.000 Pekerja Sosial.

Kebutuhan akan pekerja sosial yang terus meningkat untuk menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berjumlah 15,5 juta rumah tangga tidak diimbangi dengan lulusan perguruan tinggi kesejahteraan sosial serta peminat masyarakat untuk mengikuti Pendidikan pekerjaan/ kesejahteraan sosial, hal ini salah satunya dikarenakan masyarakat belum mengenal pekerja sosial sebagai profesi yang profesional, masyarakat lebih mengenal pekerjaan sosial sebagai kegiatan karitas.

Mereka berpandangan bahwa bidang pekerjaan ini sesungguhnya dapat dilakukan oleh siapapun, tidak harus dari lulusan pendidikan pekerjaan sosial. Hal ini pula yang kemudian dapat menyebabkan kualitas pelayanan dan penanganan masalah menjadi tidak optimal dan mencapai hasil yang diharapkan. Hal tersebut diperjelas dalam website P4S Kemsos (2014) bahwa sebutan pekerja sosial profesional ini dimaksudkan untuk membedakan dengan mereka yang bekerja

dalam bidang pekerjaan sosial tapi bukan berasal dari lulusan pendidikan pekerjaan sosial.

Namun, hal ini tidak dapat dihindari karena dalam kenyataannya banyak bidang pekerjaan sosial yang digarap oleh mereka yang bukan berasal dari lulusan pendidikan pekerjaan sosial. Lahan yang seharusnya digarap oleh profesi pekerjaan sosial akan diambil alih oleh profesi lain. Lahan yang dimaksud adalah ranah pekerjaan yang membutuhkan keahlian spesifik dan hanya dapat dilakukan oleh pekerja sosial.

Banyak bidang pekerjaan peksos yang saat ini masih menjadi garapan profesi lain, seperti psikolog, keperawatan dan profesi lainnya. Pekerja sosial memang profesi yang menggunakan hati, tapi RUU akan memperkuat posisi pekerja sosial profesional dan bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban praktik pekerjaan sosial kepada masyarakat luas.

Dalam beberapa kasus bahkan kita menemukan adanya pegiat dalam bidang pekerjaan sosial yang bukan berasal dari pendidikan pekerjaan sosial yang berhasil menyelenggarakan kegiatan pelayanan sosial lebih baik. Kedua kondisi tersebut semakin memperlemah eksistensi pekerjaan sosial sebagai bidang keahlian yang spesifik. Ditambah lagi saat ini jabatan peksos bisa diisi oleh semua jurusan untuk masuk CPNS di beberapa provinsi. Berdasarkan hemat saya, hal ini terjadi antara lain karena tidak adanya regulasi yang mengatur bahwa bidang pekerjaan yang sesungguhnya secara spesifik hanya dapat

dilakukan oleh pekerja sosial tidak dapat diserahkan kepada oleh mereka yang bukan pekerja sosial.

Berdasarkan situs resmi KemenPAN-RB, adapun 11 jabatan yang dapat dilamar oleh sarjana dari semua jurusan masing-masing instansi adalah, Analis Kebijakan, Perencana, Auditor, Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan daerah, Penggerak Swadaya Masyarakat, idyaiswara, Peneliti, Pekerja sosial, Penyuluh sosial, Perekrut, dan Pemeriksa.

"Bagi instansi pemerintah yang belum mengalokasikan formasi untuk 11 jabatan yang bisa dilamar oleh sarjana dari semua jurusan tersebut supaya segera mengalokaskannya," kata Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman.

Sayangnya, sampai sekarang banyak instansi pemerintah pusat maupun daerah yang belum mengalokasikan untuk jabatan 5% yang dapat dilamar oleh sarjana dari semua jurusan. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu, Tarmizi, B.Sc, S.Sos saat dikonfirmasi mengatakan tidak semua jabatan tersebut akan diisi. Hanya dua jabatan yang memungkinkan, yakni Pekerja sosial dan Penyuluh sosial.

"Kalau untuk jabatan lain sudah banyak, seperti auditor. Dan kedua jabatan itu (Pekerja sosial dan Penyuluh sosial), juga tidak begitu spesifik," kata Tarmizi.

(<http://harianrakyatbengkulu.com/> ver3/ 2014/07/25/11-jabatan-cpns-bisa-dilamar-sarjana-semuajurusan/#)

Banyak pilar penting yang telah dibangun untuk mengembangkan praktik Pekerjaan Sosial di Indonesia. Sudah ada UU yang menuntut profesi Pekerjaan Sosial untuk melaksanakan praktik, seperti:

- a) UU No 11 Tahun 2012 tentang system peradilan Pidana Anak yang mengamankan pendampingan Pekerja Sosial bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum
- b) UU tentang Sisdiknas atau peraturan turunannya yang mengharapakan adanya praktik Pekerjaan Sosial di sekolah
- c) UU No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
- d) UU No 5 Tahun 1997 tentang psikotropika; UU No 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Undang-undang No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, menjadi panduan utama dalam penciptaan kerangka sistem kesejahteraan sosial di Indonesia.

UU ini menyebutkan pekerja sosial sebagai “the primary profession” dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sistem kesejahteraan sosial, sebagaimana terkandung dalam UU No 11 Th 2009 ini merupakan arah sistematis dalam mencapai kondisi yang akan dituju. Namun, UU ini mengandung banyak kelemahan. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diamanatkan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial belum mengatur standar Praktik Pekerjaan Sosial di Indonesia.

Adanya kebutuhan terhadap standar registrasi, akreditasi, dan sertifikasi. Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial Indonesia (LSPSI) serta Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial

(BALKS) sebagai pilar pengendali praktik pekerjaan sosial maupun lembaga pelayanan kesejahteraan sosial juga telah terbentuk dan akan terus berkembang.

Maka dari itu, untuk mewujudkannya dibutuhkan beberapa upaya yang harus dilakukan salah satunya melalui penulisan artikel ini diharapkan dapat mengubah paradigma khalayak akan pekerja sosial sebagai suatu profesi begitupun dengan lapangan praktik pekerja sosial akan lebih diakui oleh semua pihak.

B. EKSISTENSI PEKERJA SOSIAL SEBAGAI SUATU PROFESI

1. Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial

Zastrow (2004) dalam *Introduction to Social Work and Social Welfare*, telah menggambarkan bahwa profesi utama yang paling berperan dalam pembangunan kesejahteraan sosial adalah Pekerjaan Sosial. Selain itu, Zastrow pun menjelaskan bahwa pekerjaan sosial sebagai suatu profesi memiliki fungsi dan tugas pokok untuk memberikan pelayanan dalam rangka mencapai keberfungsian sosial orang melalui proses interaksi sosial.

"Pekerjaan Sosial adalah sebagai profesi terdepan dalam pemberian pelayanan sosial untuk membantu orang, baik secara individual, kelompok, keluarga, maupun masyarakat, dalam memecahkan masalah sosial yang dihadapinya. Tanggung

jawab inilah yang menjadi misi utama Pekerja Sosial. Misi utama Pekerja Sosial bukan sekedar membantu pemecahan masalah, tetapi juga menciptakan kondisi-kondisi kemasyarakatan pokok yang menunjang pencapaian tujuan itu.

Hal tersebut dibutuhkan manusia agar mampu mengarungi kehidupan secara fungsional dalam menghadapi perubahan sosial yang cepat ini.” (Zastrow, 2004: 13) Selain itu, dalam referensi tersebut dipaparkan definisi lainnya. The National Association of Social Work (NASW) mendefinisikan pekerjaan sosial sebagai kegiatan profesional membantu individu, kelompok, atau masyarakat meningkatkan atau mengembalikan kapasitas mereka untuk fungsi sosial dan menciptakan kondisi sosial yang menguntungkan untuk tujuan ini.

Praktek kerja sosial terdiri dari profesional penerapan sosial nilai kerja, prinsip, dan teknik untuk satu atau lebih untuk membantu orang mendapatkan pelayanan yang nyata (misalnya, yang melibatkan penyediaan makanan, perumahan, atau pendapatan); memberikan konseling dan psikoterapi dengan individu, keluarga, dan kelompok; membantu masyarakat atau kelompok menyediakan atau meningkatkan pelayanan sosial dan kesehatan; berpartisipasi dalam proses legislatif yang relevan (NASW, 1973,p.4-5).

Di samping itu, kesejahteraan sosial adalah sistem program suatu negara, manfaat, dan layanan yang membantu orang, ekonomi, pendidikan, dan kebutuhan kesehatan yang mendasar untuk pemeliharaan masyarakat. Reid (1995) menggambarkan

kesejahteraan sosial sebagai “ide, bahwa ide menjadi salah satu dari masyarakat yang layak yang menyediakan kesempatan untuk bekerja, memberikan keamanan yang wajar dari keinginan dan penyerangan, mengutamakan kejujuran dan evaluasi berdasarkan pada jasa individu, dan ekonomi produktif dan stabilitas”. (hal. 206).

Lalu, bagaimana kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial terkait? Sederhananya, pekerjaan sosial berfungsi untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat. Fokus pekerja sosial bukan satu-satunya dalam bidang kesejahteraan sosial masyarakat saja. Namun, hal ini berarti mencakup kesehatan, pendidikan, rekreasi, jasa, dan keamanan masyarakat.

2. Keberlanjutan Karir Pekerjaan Sosial

Ada berbagai cara untuk melihat kemajuan melalui karir pekerjaan sosial. Beberapa kemajuan pekerja sosial melalui serangkaian tingkatan.. Derajat dalam pekerjaan sosial meliputi sarjana muda, master, dan doktor. Pekerjaan sosial adalah kegiatan profesional untuk membantu individu, kelompok, atau masyarakat meningkatkan atau memulihkan kemampuan mereka untuk berfungsi sosial dan menciptakan kondisi sosial yang menguntungkan untuk tujuan ini.

Kesejahteraan sosial adalah sistem suatu negara program, manfaat, dan layanan yang membantu orang bertemu orang-orang sosial, ekonomi, kebutuhan pendidikan, dan

kesehatan yang penting untuk pemeliharaan masyarakat. Bidang praktik pekerjaan sosial Bidang praktek dalam pekerjaan sosial termasuk anak-anak dan keluarga, lansia, disabilitas, kesehatan, kesehatan mental, penyalahgunaan zat, sekolah, dan koreksional.

Konteks lain untuk praktek pekerjaan sosial adalah pekerjaan sosial pedesaan, polisi pekerjaan sosial, dan forensik pekerjaan sosial. Pekerjaan Sosial dan Disiplin Lainnya Dasar dari pekerjaan sosial profesional adalah pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai. Pengetahuan tidak hanya dari pekerja sosial tetapi juga dari berbagai disiplin ilmu yang berfokus pada pemahaman kebutuhan dan perilaku masyarakat. Hal ini termasuk psikologi, sosiologi, ilmu politik, ekonomi, biologi, psikiatri, konseling, dan antropologi budaya.

Para pekerja sosial menggunakan pengetahuan yang diambil dari masing-masing bidang, dalam hubungannya dengan keterampilan kerja sosial dan nilai-nilai, untuk membantu individu, keluarga, kelompok, organisasi, dan masyarakat memecahkan masalah dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

3. Keunikan Pekerjaan Sosial

Bidang lainnya melakukan beberapa fungsi yang sama sebagai pekerjaan sosial. Misalnya, kesehatan mental dokter di bidang psikologi, psikiatri, dan konseling menggunakan keterampilan wawancara, dan beberapa juga menggunakan sebuah rencana pendekatan. Semuanya, memiliki kesamaan inti dari wawancara dan konseling keterampilan. Namun, pekerjaan

sosial melibatkan lebih dari hanya duduk dengan individu, kelompok, atau keluarga dan memecahkan beberapa masalah.

Pekerjaan Sosial memiliki setidaknya lima dimensi utama yang membuatnya unik.

- a) Pertama, pekerja sosial dapat fokus pada masalah atau kelompok masalah yang kompleks dan sulit. pekerja sosial tidak menolak untuk bekerja dengan klien atau merujuk mereka ke tempat lain karena klien-klien memiliki karakteristik. Misalnya, mungkin ada sebuah keluarga di mana pelecehan seksual terjadi, dan penyalahgunaan yang harus dihentikan. Demikian juga, mungkin ada komunitas di mana tingkat kejahatan remaja adalah merajalela, dan sesuatu harus dilakukan. Tidak setiap masalah dapat diselesaikan, tetapi beberapa dapat menjadi-atau setidaknya diringkankan. Praktisi kerja sosial dilengkapi dengan repertoar keterampilan untuk membantu mereka mengidentifikasi dan memeriksa masalah. Mereka kemudian membuat pilihan tentang di mana usaha mereka bisa menjadi yang terbaik untuk diarahkan.
- b) Dimensi kedua yang membuat pekerjaan sosial yang unik adalah bahwa hal itu sering menargetkan lingkungan meliputi klien, dan bukan klien sendiri untuk perubahannya. Kadang-kadang layanan tidak tersedia atau sulit untuk mendapatkan, kebijakan yang tidak adil, atau orang-orang ditindas oleh orang lain. Administrator dan orang yang berkuasa tidak selalu memiliki motivasi atau wawasan untuk

memulai perubahan yang diperlukan. Pekerja sosial harus melihat di mana perubahan sangat penting di luar individu dan bekerja dengan lingkungan untuk memberlakukan perubahan tersebut.

- c) Dimensi ketiga yang membuat pekerjaan sosial yang unik terkait dengan penargetan lingkungan: yaitu, pekerja sosial sering merasa perlu untuk mengadvokasi klien mereka. Pembelaan melibatkan secara aktif campur tangan untuk membantu klien mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Paling sering, intervensi ini berfokus pada "hubungan antara klien dan 'sistem' tidak responsif" (Epstein, 1981, p. 8). Klien telah ditentukan kebutuhan, dan lembaga sosial, organisasi. Sistem tidak responsif harus ditekan untuk membuat perubahan sehingga kebutuhan bisa dipenuhi.
- d) Dimensi keempat yang membuat pekerjaan sosial yang unik adalah penekanan pada dan kepatuhan terhadap inti profesional nilai-nilai. Kode Etik NASW berfokus pada hak individu untuk membuat pilihan bebas dan memiliki kualitas hidup (NASW, 1999). Para pekerja sosial tidak memaksa cara berpikir atau bertindak orang tertentu. Sebaliknya, mereka membantu orang membuat keputusan sendiri tentang bagaimana untuk berpikir atau bertindak.
- e) Kelima dimensi membuat pekerjaan sosial yang unik berkaitan dengan inti nilai-nilai pekerjaan sosial yakni betapa pentingnya untuk klien dalam membuat keputusan mereka sendiri. Para pekerja sosial tidak melacak cara

spesifik berpikir atau bertindak seseorang. Sebaliknya, mereka berlatih dalam suatu kemitraan dengan klien, membuat dan melaksanakan rencana bersama-sama. Kebanyakan profesi lain menekankan otoritas dan keahlian profesional, pada satu tangan, dan status bawahan klien sebagai penerima jasa.

4. Tujuan Pendidikan, Kurikulum, dan Kompetensi Pekerjaan Sosial

Selanjutnya, muncullah pertanyaan utama: “Bagaimana dengan identitas pekerja sosial?” Pengetahuan dan kemampuan apa yang mereka miliki? Kedua faktor berperan dalam menetapkan identitas dan merupakan pertanyaan dasar bertanya dari banyak profesi. Tentu saja, masyarakat juga ingin tahu apakah mereka layak legitimasi.

Reiner Wendt, wakil dari Ekologis Teori Sosial dalam IUC Jurnal of Social Work bertanya:

Bagaimana kita menciptakan identitas pekerjaan sosial, jika dalam citra diri professional setiap bidang pekerjaan menjelaskan dirinya sebagai bidang khusus pekerjaan sosial? Konseling, pelayanan sosial klinis, karya sosial masyarakat, semua mengklaim identitas tertentu. Apakah mereka memiliki kesamaan? Apa jenis pola dasar yang dapat menggambarkan dari pekerja sosial? Bagaimana seorang pekerja sosial melihat identitasnya sendiri?

Dr. Heiko Kleve, anggota dari DBSH menunjukkan bahwa identitas ini adalah identitas pekerjaan sosial. Keterbukaan, kerapuhan, dan ambivalensi adalah karakter pekerjaan sosial. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada citra idealis. Intinya adalah bahwa kita tidak bisa memiliki identitas seragam - tetapi jika hal ini tidak mungkin, dan diskusi tidak akan berhenti, maka akan tetap sulit untuk menciptakan landasan profesionalisme untuk seorang pekerja sosial.

Salah satu cara untuk memahami pekerjaan sosial yakni dengan meninjau konten dan harapan dalam akreditasi program kurikulum pekerjaan sosial. Dewan Pendidikan Pekerjaan Sosial (CSWE) adalah organisasi akreditasi program kerja sosial di seluruh Amerika Serikat. Akreditasi adalah sebutan resmi oleh yang berwenang tubuh (dalam hal ini, CSWE) bahwa pendidikan Program memenuhi standar yang ditentukan.

Hal ini biasanya diperlukan dalam berlisensi sebagai pekerja sosial. Kebijakan Pendidikan CSWE dan Standar Akreditasi (EPAS) menekankan bahwa program kerja sosial harus mencerminkan nilai-nilai tertentu seluruh kurikulum mereka. EPA menyatakan bahwa "layanan, keadilan sosial, martabat dan nilai seseorang, pentingnya hubungan manusia, integritas, kompetensi, hak asasi manusia, dan penelitian ilmiah adalah salah satu nilai-nilai inti pekerjaan sosial" (CSWE, 2008b, hal. 2).

EPA juga menetapkan 10 daerah yang lulusan dari program pekerjaan sosial harus mempunyai kompetensi. Kompetensi adalah "perilaku praktek terukur yang terdiri dari pengetahuan

yang cukup, keterampilan, dan nilai-nilai, serta memiliki tujuan untuk berlatih secara efektif. Bagian berikut menjelaskan setiap kompetensi dan mengidentifikasi bidang dalam kurikulum tradisional pekerjaan sosial. Lima kompetensi pertama melibatkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang jelas seluruh kurikulum pekerjaan sosial. Lima terakhir kompetensi berhubungan dengan bidang isi tradisional atau kursus dalam program-sosial pekerjaan sosial penelitian, perilaku manusia dan lingkungan sosial, kebijakan sosial kesejahteraan, serta praktek pekerjaan sosial (kompetensi 9 dan 10).

a. Kompetensi 1: Identifikasi

Sebagai pekerja Pekerja Sosial profesional harus “melayani sebagai wakil profesi, misinya, dan nilai-nilai inti” (CSWE, 2008b, hal. 3). Mereka harus memiliki pengetahuan tentang sejarah dan perkembangan pekerjaan sosial. Mereka harus melakukan sendiri dalam etika, secara profesional, memberikan pelayanan yang efektif untuk klien dan menghormati hak klien untuk menentukan nasib sendiri. Dalam prakteknya, pekerja sosial harus mengadvokasi atas nama ketika layanan klien mereka atau kebijakan peningkatan penyediaan layanan pemerintahan diperlukan. Mereka harus terus mengembangkan keterampilan mereka dan memperoleh pengetahuan baru sepanjang karier mereka untuk melayani klien. Akhirnya, mereka harus mencari bantuan dari pengawas dan konsultan bila diperlukan.

b. Kompetensi 2: Penerapan Sosial

Anda mungkin telah memperhatikan bahwa nilai-nilai pekerjaan sosial dan etika sangat penting untuk praktek pekerjaan sosial. Mereka membantu para praktisi menilai apa yang penting atau benar dalam situasi dan memberikan panduan untuk membuat keputusan dan penilaian yang baik. Pekerja sosial profesional harus menunjukkan kompetensi dalam mengenali nilai-nilai pribadi. "Prinsip-prinsip penalaran etis untuk tiba di berprinsip keputusan "(CSWE, 2008b, hal. 4). Dalam kode etik NASW disebutkan sebelumnya mengenai beberapa pedoman dasar bagi para praktisi pekerjaan sosial, seperti halnya Asosiasi Internasional Pekerja Sosial Internasional / Sekolah Etika Pekerjaan Sosial di Pekerjaan Sosial.

c. Kompetensi 3: Penerapan Kritis

Pentingnya berpikir kritis, hal ini didefinisikan sebagai (1) pengawasan hati-hati apa yang dinyatakan sebagai benar atau apa yang tampaknya menjadi benar dan ekspresi yang dihasilkan dari pendapat atau kesimpulan berdasarkan pengawasan itu, dan (2) perumusan kreatif pendapat atau kesimpulan ketika disajikan dengan pertanyaan, masalah, atau isu. Sebaliknya, berpikir kritis memerlukan menggunakan analisis kreatif pengandaian untuk menentukan sendiri apa yang benar-benar benar atau apa pilihan terbaik di antara alternatif yang ada. Hal ini juga menyangkut kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tertulis.

d. Kompetensi 4: Keterlibatan Keanekaragaman dalam Praktik

Keanekaragaman mengacu pada berbagai perbedaan karakteristik orang. Fokus dari profesi pekerjaan sosial meliputi kelompok yang dibedakan dengan “usia, kelas, warna, budaya, kecacatan, etnis, gender, identitas gender dan ekspresi, status imigrasi, ideologi politik, ras, agama, jenis kelamin, dan orientasi seksual” (CSWE, 2008b, hal. 5). Setiap kali seseorang dapat diidentifikasi sebagai milik kelompok yang berbeda dari sebagian besar orang lain dalam masyarakat. Karena pekerja sosial memiliki berbagai macam klien, menunjukkan hamper setiap jenis kebutuhan dan masalah, mereka harus secara integral akrab dengan konsep keragaman manusia. Adapun empat aspek utama. Pertama, pekerja sosial harus menghargai perbedaan dan fokus pada kekuatan. Kedua, mereka harus peka terhadap dan mengatasi setiap kesulitan dan klien pengobatan negatif mungkin menghadapi karena mereka milik beberapa kelompok yang beragam. Ketiga, mereka harus introspektif menilai sikap mereka sendiri dan berusaha untuk menghilangkan prasangka yang mungkin mereka miliki. Keempat, pekerja sosial harus melihat diri mereka sebagai peserta didik seumur hidup tentang banyak aspek keragaman manusia, khususnya karakteristik klien.

e. Kompetensi 5: Peningkatan HAM serta Keadilan Sosial dan Ekonomi

Konsep hak asasi manusia dan keadilan sosial-ekonomi terkait dengan konsep keragaman manusia. Hak asasi manusia

melibatkan premis bahwa semua orang, terlepas ras, budaya, atau asal negara, berhak untuk hak-hak dasar dan pengobatan. Keadilan sosial adalah gagasan bahwa di dunia yang sempurna semua warga negara akan identik "hak, perlindungan, peluang, kewajiban, dan manfaat sosial" (Barker, 2003, hal. 405). Demikian pula, keadilan ekonomi melibatkan distribusi sumber daya secara adil dan merata. Lulusan pekerja sosial harus menunjukkan kompetensi dalam memahami konsep-konsep dan dasar teoritis mereka; pekerja sosial harus membela atas nama prinsip-prinsip ini dan menggabungkan prinsip ke dalam praktek mereka (CSWE, 2008b, hal. 5). Konsep lain yang penting dalam pekerjaan sosial adalah populasi, kelompok yang terdiri dari beberapa orang diidentifikasi karakteristiknya, beserta risikonya karena praktek pekerjaan sosial melibatkan mendapatkan sumber daya manusia dan membantu mereka memecahkan masalah, pekerja sosial sering bekerja dengan populasi yang berisiko dari deprivations tersebut. Berarti pekerja sosial membutuhkan informasi dan wawasan tentang isu-isu khusus dan kebutuhan orang-orang ini. Oleh karena itu, pekerja sosial mengharuskan kedua teoritis dan konten praktek mengenai dinamika dan hasil diferensial, perlakuan tidak adil. Satu nilai pekerjaan sosial sangat penting adalah "proses peningkatan pribadi pemberdayaan-, interpersonal, atau politik kekuasaan sehingga individu dapat mengambil tindakan untuk memperbaiki situasi kehidupan mereka" (Gutierrez, 2001, hal. 210). Beberapa kelompok orang mengalami stereotip, diskriminasi, dan penindasan. Adalah tugas pekerja sosial untuk memberdayakan klien secara umum dan anggota kelompok tertindas pada khususnya.

f. Kompetensi 6: Keterlibatan dalam Penelitian

Mahasiswa pekerja sosial harus menunjukkan kompetensi dalam research. Ini berarti pekerja sosial harus menggunakan pendekatan dan intervensi dalam praktik mereka bahwa penelitian telah ditentukan efektif. Para pekerja sosial harus menggunakan “temuan penelitian untuk memperbaiki praktik, kebijakan, dan pelayanan sosial” (CSWE, 2008b, hal.5). Para pekerja sosial mungkin juga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam praktek berdasar pada penelitian. Penelitian yang erat ini melibatkan pekerjaan sehari-hari para praktisi berfokus pada pengumpulan data dan hasil yang terkait dengan proses praktek pekerjaan sosial (Tripodi & Lalayants, 2008, p. 518).

Program “Penelitian Pekerjaan Sosial” menjadi urutan program dalam kurikulum mereka. Pengetahuan tentang penelitian pekerjaan sosial adalah penting karena dua alasan mendasar.

- 1) Pertama, dapat membantu pekerja sosial menjadi lebih efektif dalam praktek langsung mereka dengan jelas. Framing intervensi pekerjaan sosial sehingga mereka dapat dievaluasi melalui penelitian memberikan informasi tentang teknik-teknik khusus bekerja yang baik dengan yang bermasalah. Evaluasi praktek di seluruh proses intervensi dapat membantu menentukan apakah seorang pekerja benar-benar membantu klien.

- 2) Kedua, akumulasi penelitian membantu membangun lembaga untuk merencanakan intervensi yang efektif. Pengetahuan dari apa yang telah bekerja terbaik di masa lalu memberikan pedoman untuk pendekatan dan teknik yang akan digunakan di masa sekarang dan di masa depan. Menetapkan penelitian dasar untuk pengembangan program dan kebijakan yang mempengaruhi banyak orang. Pengetahuan tersebut dapat juga dapat digunakan untuk menghasilkan teori-teori baru dan ide-ide untuk lebih meningkatkan efektivitas kerja sosial praktek.

Based-practice merupakan istilah lain yang sering digunakan dalam pekerjaan sosial, yang memiliki arti mirip dengan research-information practice, yaitu praktik berbasis informasi yaitu “hati nurani, eksplisit, dan penggunaan bukti/informasi terbaik saat ini dalam pembuatan keputusan tentang perawatan klien” (Gambrill, 2000, hal. 46; Race, 2008; Rubin, 2008). Gambrill (2000) menjelaskan:

“Ini meliputi keahlian praktek integrasi individu dengan fakta eksternal terbaik yang tersedia dari sistematis penelitian serta mempertimbangkan nilai-nilai dan harapan klien. Temuan penelitian eksternal berkaitan dengan masalah yang diambil jika mereka bersedia dan berlaku untuk klien tertentu mereka. Peksos melibatkan klien sebagai peserta kolaboratif membantu hubungan yang merupakan ciri dari praktek berbasis fakta. Klien sepenuhnya diinformasikan tentang risiko dan manfaat dari layanan yang direkomendasikan serta alternatif (termasuk alternatif melakukan apa).

Istilah praktek evidence-based adalah lebih baik untuk praktik jangka empiris. Istilah yang terakhir sekarang tampaknya diterapkan dalam materi. (pp. 46-47). Kandungan penelitian pekerjaan sosial cenderung turun dalam empat hal berikut (Reid, 1995; Tripodi & Lalayants, 2008).

- a) Pertama, banyak studi melibatkan perilaku individu klien dan interaksi mereka dengan orang lain dekat dengan mereka, termasuk keluarga dan kelompok-kelompok kecil.
- b) Kedua, banyak penelitian berfokus pada bagaimana layanan disediakan untuk klien, layanan apa yang terlibat, dan hasil mereka dalam mencapai tujuan.
- c) Ketiga, beberapa studi mengatasi sikap pekerja sosial dan latar belakang pendidikan, di samping tren utama dalam profesi. Keempat, beberapa penelitian melibatkan studi tentang "organisasi, masyarakat, dan kebijakan sosial" (Reid, 1995, hlm. 2044).
- d) Keempat, menekankan pentingnya lingkungan sosial yang lebih besar dan dampaknya pada perilaku dan kondisi klien.

g. Kompetensi 7: Penerapan Pengetahuan Perilaku Manusia dan Lingkungan Sosial

Pekerja sosial harus berpengetahuan tentang perilaku manusia dan lingkungan sosial. Fungsi masyarakat dalam konteks lingkungan merupakan dorongan penting dari pekerjaan sosial.

Hanya setelah menilai dan pemahaman bahwa fungsi dapat pekerja sosial melanjutkan dengan rencana intervensi. Para pekerja sosial harus memiliki pengetahuan tentang "biologis, sosial, budaya, psikologis, dan pengembangan spiritual" karena hal ini terjadi atas umur (CSWE, 2008b, hal. 6). "Perilaku Manusia dan Lingkungan Sosial" adalah dasar untuk kursus lain atau urutan program tradisional dimasukkan dalam kurikulum pekerjaan sosial. Orang-orang terus-menerus dan dinamis terlibat dalam kegiatan yang sedang berlangsung dan komunikasi dengan orang lain di lingkungan. Penilaian adalah identifikasi dari "sifat dan tingkat kebutuhan klien dan keprihatinan, serta informasi penting tentang sumber daya klien dan mendukung dan faktor lingkungan lainnya" sehingga rencana untuk membantu dapat dirancang dan dilaksanakan (Blythe & Reithoffer, 2000, hal. 551). Asesment pekerja sosial dilakukan untuk menemukan situasi tertentu apa yang menyebabkan masalah untuk melanjutkan perubahan yang diinginkan klien. Berfokus pada lingkungan berarti tidak hanya melihat pada individu itu sendiri tetapi juga pada keterlibatan mereka dengan anggota keluarga, tetangga, pekerjaan kolega, sistem politik, dan lembaga layanan di dalam masyarakat. Berarti bahwa masalah-masalah klien tidak melihat semata-mata sebagai kesalahan milik mereka. Kemiskinan, diskriminasi, tekanan sosial, dan efek dari kebijakan kesejahteraan sosial, semua aspek kehidupan masyarakat yang dapat jatuh dibawah pengawasan.

h. Kompetensi 8: Keterlibatan dalam Praktik Kebijakan untuk Memajukan Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial

Para pekerja sosial harus memahami kebijakan sosial, kesejahteraan, sejarah mereka, dan bagaimana pengaruh pekerjaan terhadap klien. Kebijakan, dalam bentuk yang paling sederhana, dapat dianggap sebagai aturan. Hidup kita dan orang-orang dari klien pekerja sosial diatur oleh aturan tentang bagaimana kita berkendara, ketika kita pergi ke sekolah, bagaimana kita berbicara atau menulis kalimat, dan sebagainya. Kebijakan, pada dasarnya, aturan yang memberitahu kita tindakan antara tindakan kita yang dapat dilakukan dan yang tidak. Kebijakan memandu pekerjaan dan keputusan. Untuk tujuan pemahaman kesejahteraan sosial dan penyediaan kesejahteraan sosial jasa, kebijakan mungkin dibagi menjadi dua kategori utama: kebijakan kesejahteraan sosial dan kebijakan lembaga. Kebijakan kesejahteraan sosial adalah hukum dan peraturan yang mengatur program kesejahteraan sosial mana yang ada, kategori klien apa yang dilayani, dan siapa yang memenuhi syarat untuk program yang diberikan. Mereka juga menetapkan standar tentang jenis layanan yang akan diberikan dan kualifikasi dari penyedia layanan. Selain ranah yang lebih luas kebijakan kesejahteraan sosial, kebijakan lembaga yang standar yang diadopsi oleh organisasi individu dan program yang menyediakan layanan (misalnya, sebuah lembaga pelayanan keluarga, Departemen suatu pelayanan manusia, atau panti jompo). Standar tersebut dapat menetapkan

struktur badan, kualifikasi supervisor dan pekerja, aturan yang mengatur apa yang dapat dilakukan pekerja, dan prosedur yang tepat untuk menyelesaikan penilaian keluarga. Pengetahuan tentang kebijakan sangat penting bagi pekerja sosial. Kebijakan organisasi dapat menentukan berapa banyak liburan yang dimiliki seorang karyawan dan bagaimana kenaikan gaji yang diperoleh. Kebijakan menentukan siapa yang membutuhkan pelayanan dan sumber daya. Para pekerja sosial harus turut berperan aktif dalam membangun dan perubahan kebijakan kesejahteraan sosial bagi kepentingan klien mereka; Kebijakan menentukan bagaimana uang dianggarkan dan dihabiskan, dan di mana sumber yang dibuat tersedia untuk klien. Praktisi harus kompeten dalam melakukan praktek kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan layanan pekerjaan sosial yang efektif bagi masyarakat. Praktek kebijakan melibatkan “upaya untuk mengubah kebijakan, pengaturan lembaga, dan komunitas legislatif, apakah dengan menetapkan kebijakan baru, meningkatkan yang sudah ada, atau mengalahkannya inisiatif kebijakan orang lain” (Jansson, 2011, hal. 15). Kadang-kadang, kebijakan kesejahteraan sosial tidak adil atau menindas kepada klien. Ironisnya, meskipun kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, kadang-kadang malah sebaliknya. Pekerja sosial dapat memutuskan bahwa kebijakan yang etis dan mengadvokasi atas nama klien, mencoba untuk mengubahnya. Praktisi dapat bekerja untuk mengubah kebijakan untuk memajukan keadilan sosial dan ekonomi dan memberikan perlakuan yang adil terhadap berbagai orang.

i. Kompetensi 9: Responsif terhadap Konteks dari Bentuk Praktik

Para pekerja sosial harus menunjukkan kompetensi dalam berbagai konteks dan pengaturan. Mereka harus memahami dinamika dan terlibat dalam lingkungan makro seperti organisasi, masyarakat, dan badan legislatif yang menetapkan kebijakan kesejahteraan sosial. Praktisi harus berfungsi dalam sistem, melayani sebagai pemimpin untuk mengadvokasi atas nama klien. Mereka harus mengikuti perkembangan teknologi baru, perubahan demografi, dan tren sosial dalam rangka untuk menanggapi isu-isu saat ini.

j. Kompetensi 10: Perjanjian, Assessment, Intervensi, dan Evaluasi dengan Individu, Keluarga, Kelompok Besar, Organisasi, dan Komunitas

Ada dua dimensi utama yang melekat dalam Kompetensi 10. Pertama, proses pekerjaan sosial meliputi keterlibatan, penilaian, intervensi, dan evaluasi (CSWE, 2008b; Kirst-Ashman & Hull, 2012b). Keterlibatan/perjanjian adalah periode awal ketika praktisi mengorientasikan diri untuk masalah yang dihadapi dan mulai menjalin komunikasi dan hubungan dengan lain juga mengatasi masalah. Assessment melibatkan penyelidikan dan penentuan variabel yang mempengaruhi identifikasi masalah termasuk kebutuhan dan kekuatan klien. Intervensi adalah perencanaan dan pelaksanaan rencana untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan. Evaluasi adalah

“proses penentuan apakah perubahan yang terjadi bermanfaat.” (Kirst-Ashman & Hull, 2012a, hal. 34). Keterampilan lain yang terlibat dalam praktek pekerja sosial meliputi “memberikan kepemimpinan untuk kebijakan dan jasa serta mempromosikan keadilan sosial dan ekonomi” (CSWE, 2008b, hal. 7). Dimensi penting kedua yang melekat dalam kompetensi 10 adalah bahwa praktek melibatkan bekerja dengan individu, keluarga, kelompok, organisasi (besar dan kecil), dan masyarakat. Keterampilan basis pengetahuan pekerjaan sosial mencakup informasi tentang keterampilan di samping data mengenai masalah dan layanan. seorang pekerja sosial harus tahu keterampilan apa yang paling efektif dalam situasi seperti apa, keterampilan-keterampilan untuk mencari dan menghubungkan orang-orang dengan sumber daya yang mereka butuhkan. Para pekerja sosial dapat memilih dari banyak teknik praktek dan teori. Pengetahuan tentang efektivitas berbagai teknik sangat penting untuk memilih orang-orang yang dapat mencapainya dalam situasi tertentu dan untuk melaksanakan praktik research-information (kompetensi 6). Terlepas dari teknik yang dipilih dan digunakan, penekanan ditempatkan pada kekuatan klien dan pemberdayaan, kolaborasi klien yang sedang berlangsung di semua tahap proses perubahan, dan penghargaan keanekaragaman (Pinderhughes, 1995).

Landasan praktik pekerja sosial adalah praktek generalis. Praktek Generalis Praktek generalis menggabungkan semua 10 kompetensi dan merupakan inti dari Pendidikan dan praktek pekerjaan sosial. Ini membedakan pekerjaan sosial dari profesi lain. Praktik generalis adalah aplikasi dari basis pengetahuan

eklektik, nilai-nilai profesional, dan berbagai keterampilan untuk menargetkan berbagai ukuran sistem untuk perubahan dalam konteks empat primer proses (Kirst-Ashman & Hull, 2012b).

- 1) Pertama, generalis praktek menekankan pemberdayaan klien.
- 2) Kedua, melibatkan bekerja secara efektif dalam sebuah struktur organisasi dan melakukannya di bawah pengawasan.
- 3) Ketiga, memerlukan asumsi lebar berbagai peran profesional. Keempat, melibatkan aplikasi keterampilan berpikir kritis untuk perencanaan proses perubahan (intervensi).

5. Advanced Practice

Mencirikan kurikulum MSW, memberikan konsentrasi khusus yang dibangun berdasarkan landasan praktik generalis. Misalnya, spesialisasi dalam kesehatan mental, pekerja sosial sekolah, bekerja dengan anak-anak dan keluarga, koreksi, kesehatan, pelayanan sosial administrasi, atau organisasi masyarakat.

6. Bidang Pendidikan

Merupakan bentuk pusat instruksi dan pembelajaran di mana sosialisasi profesi untuk melakukan peran praktisi” (CSWE, 2008b, hal. 8). Bidang pendidikan menyediakan pengalaman kehidupan nyata dalam lingkungan kerja sosial di mana pekerja sosial ditempatkan dan dapat berlatih keterampilan mereka di

bawah pengawasan. Pengaturan penempatan dapat bervariasi. Mereka termasuk lembaga pelayanan sosial, rumah sakit, sekolah, lembaga pemasyarakatan, organisasi penempatan seperti kantor cabang NASW negara, penempatan yang berkaitan dengan kebijakan seperti kantor legislatif, atau penempatan dalam organisasi masyarakat.

Setiap dari pengaturan ini harus menyediakan pengawasan kerja sosial yang sesuai. Penempatan BSW memerlukan minimal 400 jam dan MSW penempatan minimum 900 jam. Banyak siswa pekerjaan sosial menemukan pendidikan bidang mereka untuk menjadi titik pengalaman pendidikan mereka. Konsep penting dalam sistem teori dan ekologi merupakan perspektif yang relevan dengan praktik kerja sosial termasuk sistem (mikro, mezzo, dan makro), sistem klien, lingkungan sosial, dan coping.



BAB IV

PROSPEK DAN TANTANGAN PEKERJAAN SOSIAL

A. PROSPEK DAN TANTANGAN PEKERJAAN SOSIAL

1. Pekerjaan Sosial dan Fungsi Sosial Individu

Pekerjaan sosial merupakan profesi pertolongan kamanusiaan yang tujuan utamanya adalah membantu keberfungsian sosial individu, keluarga, dan masyarakat dalam melaksanakan peran-peran sosialnya (Siporin, 1975; Morales dan Sheafor, 1989; Suharto, 1997). Para pekerja sosial, memiliki seperangkat pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai pertolongan yang diperoleh melalui pendidikan (perguruan tinggi).

Seperti halnya profesi lain, misalnya kedokteran dan kependidikan, pekerjaan sosial terlibat dalam menjalankan program-program pembangunan nasional. Namun demikian, berbeda dengan kedokteran dan kependidikan yang concern dengan pembangunan sosial, pekerjaan sosial lebih memfokuskan diri kepada pembangunan kesejahteraan sosial.

Agar mampu mengemban tugas profesionalnya, para calon pekerja sosial, yakni para mahasiswa jurusan kesejahteraan

sosial, dibekali dengan ilmu dan metoda penyembuhan sosial (social treatment) yang umumnya meliputi terapi individu, kelompok dan masyarakat (Zastrow, 1985; Payne, 1991; DuBois dan Miley, 1992).

Secara konvensional, pekerjaan sosial biasanya dipandang sebagai profesi yang menangani permasalahan kesejahteraan sosial baik pada setting lembaga maupun masyarakat. Dalam setting lembaga, pekerja sosial biasanya bekerja pada institusi-institusi pelayanan sosial, seperti lembaga rehabilitasi sosial, pengasuhan anak, perawatan orang tua, penanganan korban narkoba, dan lain-lain. Dalam setting masyarakat, umumnya pekerja sosial menangani permasalahan sosial yang berkaitan dengan pembangunan lokal (pedesaan dan perkotaan), pengentasan kemiskinan atau perancangan proyek-proyek usaha ekonomis produktif.

Karena lembaga pendidikan pekerja sosial, seperti STKS, UNPAD dan UNPAS, membekali mahasiswanya dengan ilmu-ilmu sosial maka selain bekerja di sektor swasta, banyak pekerja sosial yang bekerja di departemen-departemen pemerintah (Depsos, Depdagri/Pemda, Depdikbud dan organisasi-organisasi sejenis pada level-level di bawahnya).

2. Prospek Karir sebagai Pekerja Sosial

Sejalan dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, sasaran, bidang garapan dan intervensi profesi pekerjaan sosial juga semakin luas. Tiga kecenderungan di

bawah ini memberikan peluang bagi profesi pekerjaan sosial untuk memperluas kontribusinya:

Globalisasi dan industrialisasi membuka kesempatan bagi pekerja sosial internasional (international social worker) yang menangani pengungsi, tenaga kerja di luar negeri (TKI); pekerja sosial industri (industrial social worker) yang bekerja di perusahaan-perusahaan swasta untuk menangani kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan kerja, relasi buruh dan majikan, atau perekrutan dan pengembangan pegawai. Lembaga-lembaga internasional yang terbuka bagi pekerja sosial antara lain UNHCR (pengungsi); UNDP (pembangunan); UNICEF (masalah anak), dan ILO (masalah buruh).

Modernisasi dan urbanisasi membuka peluang bagi pekerja sosial untuk berkarya di lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM/NGO) yang menangani sektor informal, pekerja anak, anak jalanan, pengembangan masyarakat, perencanaan wilayah. Beberapa LSM – nasional maupun internasional – yang terbuka bagi pekerja sosial antara lain, DNIKS, YKAI, YIS, Dian Desa, Bina Swadaya, CCF, World Vision, CRS, Save the Children, Care, dan lain-lain.

Meritokrasi adalah prinsip yang memberi peran atau tugas-tugas pekerjaan berdasarkan kemampuan atau keahliannya. Dengan prinsip ini semua orang dan semua bidang profesi memiliki peluang yang relatif sama untuk memperluas kontribusinya dalam beragam bidang, tergantung pada bagaimana orang atau profesi tersebut merespon kesempatan.

Meritokrasi memperluas arena praktek pekerjaan sosial. Lembaga-lembaga seperti rumah sakit, sekolah, peradilan, dan bahkan mass media terbuka bagi para pekerja sosial. Di negara-negara maju, seperti AS, Inggris, Australia dan New Zealand, pekerja sosial medik (medical social worker) dan pekerja sosial sekolah (school social worker), misalnya, merupakan arena pekerjaan sosial yang relatif baru namun kini sangat dikenal masyarakat.

3. Pekerja Sosial, Antara Peluang dan Tantangan

Peluang di atas tentunya memerlukan visi, kesungguhan, dan kerjasama lintas-bidang untuk terus menerus mengembangkan profesi pekerjaan sosial. Sedikitnya ada tiga strategi yang dapat dikembangkan untuk merespon berbagai peluang di atas.

- 1) Mempublikasikan kompetensi dan kontribusi pekerja sosial dalam berbagai arena pembangunan agar semakin dikenal oleh masyarakat luas.
- 2) Mengembangkan pendidikan pekerjaan sosial agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Misalnya, melengkapi mahasiswa dengan keahlian yang spesifik, accountable dan terukur. Spesialisasi dan link and match dalam pendidikan pekerjaan sosial tampaknya semakin penting.
- 3) Memperkuat organisasi-organisasi profesi pekerjaan sosial Indonesia, serta meningkatkan kerjasama di tingkat

nasional, regional dan internasional. Termasuk di sini adalah merumuskan kode etik profesi yang dapat di"legal"kan dan diaplikasikan dalam "praktek" pekerjaan sosial.

4. Kontribusi Teori dalam Praktik Pekerjaan Sosial

Pekerja Sosial menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2019 adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi. Tujuan pekerjaan sosial adalah peningkatan keberfungsian sosial dan membantu pemecahan masalah-masalah sosial. Pekerjaan sosial mempunyai visi yakni terwujudnya kesejahteraan sosial.

Melihat dari pengertian, tujuan serta visi yang ingin dicapai maka pekerja sosial dapat dikatakan sebagai sebuah profesi. Hal tersebut disebabkan karena pekerjaan sosial merupakan sebuah kegiatan pelayanan sosial berdasarkan kerangka body of knowledge, body of value dan body of skills untuk menolong individu, kelompok, dan masyarakat agar mampu berdaya dan menyelesaikan masalah yang dihadapi sehingga dapat terwujud keberfungsian sosial yang mereka miliki sesuai dengan perannya. Salah satu ciri profesi adalah adanya dasar ilmu pengetahuan dan teori dalam pelaksanaan praktik.

Menurut Babbie dan Rubin, (2010) teori adalah seperangkat pernyataan sistematis yang saling terkait dimaksudkan untuk menjelaskan beberapa aspek kehidupan sosial atau memperkaya rasa kita tentang bagaimana orang melakukan dan menemukan

makna dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hal yang sama juga disampaikan oleh Towland (2009) yaitu teori merupakan alat bantu untuk menjelaskan situasi dan kemungkinan bagaimana suatu hal dapat terjadi. Hal senada juga disampaikan oleh Thyer (2001) terkait dengan teori yaitu hal yang berkaitan dengan penjelasan dan memprediksi berbagai aspek perilaku manusia.

Berdasarkan definisi teori yang disampaikan oleh beberapa ahli tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa teori adalah hubungan antara konsep yang dipergunakan sebagai dasar bagi pekerja sosial untuk melakukan intervensi. Oleh sebab itu fungsi dari sebuah teori adalah:

- 1) Menjelaskan, memprediksi dan menilai situasi sosial serta perilaku manusia.
- 2) Menjelaskan hubungan dan pengaruh lingkungan terhadap perilaku manusia
- 3) Memberikan arahan bagi pekerja sosial untuk melakukan intervensi sosial.
- 4) Menjadi pedoman bagi pekerja sosial untuk melakukan perubahan sosial.

Klasifikasi teori dalam pekerjaan sosial memiliki banyak versi. Masing-masing ahli membuat klasifikasi teori yang berbeda-beda. Namun, diantara perbedaan tersebut ditemukan kesamaan. Kesamaan tersebut dapat dicermati dari level teoritik yang merentang dari level mikro, meso sampai makro. Teori-teori pekerjaan sosial yang dijadikan rujukan berasal dari berbagai disiplin ilmu, diantara teori psikologi untuk level mikro,

teori organisasi untuk level meso dan teori sosial untuk level makro, serta perpaduan dari teori-teori tersebut. Berikut adalah penerapan teori yang lazim dipraktikkan dalam pekerjaan sosial:

1) Teori Psikodinamika

Psikodinamika dikembangkan oleh Sigmund Freud, dalam perkembangannya teori ini menjadi dasar bagi pekerjaan sosial tradisional. Teori ini memiliki asumsi bahwa perilaku berasal dari gerakan dan interaksi dalam pikiran orang. Perspektif psikodinamik merupakan bagian dari aliran individualist reformist yang memiliki fokus terhadap perubahan sosial. Secara umum kegunaan teori psikodinamika dalam praktik pekerjaan sosial antara lain:

- a) untuk memahami proses-proses intra-psikis maupun pemahaman internal.
- b) untuk memahami kemampuan adaptasi, motivasi, serta relasi interpersonal.
- c) untuk melakukan assessmen terhadap kekuatan maupun keberfungsian sistem.

2) Teori Motivasi

Motivasi pada dasarnya merupakan alasan untuk bertindak atau dorongan manusia untuk mencapai tujuannya. Motivasi juga merupakan suatu proses untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang diinginkan. Teori motivasi menjelaskan bagaimana suatu alasan dapat

muncul pada diri seseorang. Seseorang dapat bertindak jika dia telah memiliki motivasi. Apabila seseorang tidak bertindak, maka motivasinya terhambat. Ada dua hal yang menyebabkan terhambatnya motivasi seseorang, yaitu ketakutan dan malas. Agar motivasi meningkat, maka hambatan-hambatan tersebut harus dikurangi.

Peran motivasi dalam praktek pekerjaan sosial adalah sebagai pendorong timbulnya tingkah laku atau perbuatan, tanpa motivasi tidak akan timbul satu perbuatan. Sedangkan fungsi motivasi dalam praktek pekerjaan sosial adalah:

- a) Motivasi berfungsi sebagai pengarah, artinya mengarahkan perbuatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- b) Motivasi sebagai penggerak, artinya menggerakkan tingkah laku seseorang.

Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu proses pertolongan yang akan diberikan oleh pekerja sosial untuk mencapai perubahan yang direncanakan.

3) Teori Sistem

Teori sistem adalah suatu model yang menjelaskan hubungan tertentu antara sub-sub sistem dengan sistem sebagai suatu unit. Apabila suatu sub sistem tidak berfungsi, maka sistem tidak akan berjalan maksimal. Intinya, setiap bagian berpengaruh terhadap keseluruhan atau sesuatu tidak dapat ada tanpa keberadaan yang lain.

Teori sistem banyak memberikan sumbangan pada praktek pekerjaan sosial mikro dan makro. Pada praktek mikro teori sistem dapat digunakan untuk menggali masalah anak dengan keluarga. Sedangkan sumbangan teori sistem terhadap praktik pekerjaan sosial makro adalah untuk mengetahui pengaruh dari suatu sub sistem terhadap sub sistem lainnya atau terhadap sistem yang menyebabkan terjadinya permasalahan sosial, baik dilihat dari aspek objektif, seperti masyarakat, maupun aspek subyektif, seperti nilai-nilai budaya, agama, dan lain sebagainya.

4) Teori Pembelajaran Sosial

Teori ini mengatakan bahwa orang dapat mempelajari informasi baru dan perilaku dengan cara melihat orang lain (belajar observasional). Konsep dasar dari teori ini adalah bahwa orang-orang dapat belajar melalui observasi atau pengamatan, kemudian dilanjutkan dengan peniruan. Mereka mengubah perilakunya melalui penyaksian terhadap bagaimana orang lain merespon sebuah stimulus tertentu.

Sumbangan teori ini terhadap praktik pekerjaan sosial mikro adalah pekerja sosial mengubah perilaku individu yang bermasalah melalui proses pemberian informasi, pengamatan dan peniruan. Sedangkan pada tataran makro adalah seorang pekerja sosial dapat mengetahui dan memahami penyebab masyarakat berperilaku dan bagaimana mereka merubah perilakunya sehingga perilaku tersebut berpengaruh terhadap lingkungan sosial. Dengan mengetahui hal-hal tersebut, pekerja sosial mampu membuat pemecahan masalah.

5) Teori Pertukaran Sosial

Teori ini mengatakan bahwa seseorang berhubungan dengan orang lain karena mengharapkan sesuatu yang memenuhi kebutuhannya. Teori pertukaran sosial pun melihat antara perilaku dengan lingkungan terdapat hubungan yang saling mempengaruhi. Di dalam hubungan tersebut, terdapat unsur imbalan, pengorbanan, dan keuntungan. Jadi, perilaku sosial terdiri atas pertukaran paling sedikit antar dua orang berdasarkan perhitungan untung-rugi.

Teori pertukaran sosial penting bagi pekerja sosial, karena berusaha menjelaskan fenomena kelompok dalam lingkup konsep-konsep ekonomi dan perilaku mengenai biaya dan imbalan. Teori ini sangat dibutuhkan oleh pekerja sosial yang bekerja di perusahaan agar pekerja sosial memahami apa yang membuat keadaan sosial tetap baik dan terus kondusif dalam sebuah perusahaan. Hal tersebut seperti yang disebutkan dalam teori, keadaan sosial akan baik jika semua sub sistem atau elemen dalam sistem sosial mendapatkan keuntungan dan saling memberikan keuntungan.

6) Teori Ekologi

Teori ini menekankan bahwa lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan. Ada lima sistem dalam teori ini, yaitu mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Teori ini pada intinya menjelaskan mengenai perilaku manusia sesuai dengan lingkungan dan interaksi antara

manusia dengan lingkungan yang terjadi dalam berbagai level dan fungsinya.

Teori ini juga memberikan sumbangan terhadap praktik pekerjaan sosial makro, yaitu dengan memegang teori ini, seorang pekerja sosial mampu mencari penyelesaian masalah di masyarakat, seperti pengaruh budaya asing terhadap masyarakat Indonesia, berkembangnya gaya hidup modern yang menyebabkan terjadinya masalah sosial, seperti kenakalan remaja, kemiskinan, mental masyarakat yang tidak sehat, dan kerusakan lingkungan.

7) Teori Feminin

Secara umum, permasalahan mengenai gender muncul karena posisi kaum wanita yang dianggap lebih rendah dari kaum pria. Teori feminin menekankan kepada harapan kaum wanita untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak atau sama posisinya dengan laki-laki. Dalam feminis terdapat tiga pendekatan utama, yaitu feminisme liberal, feminisme marxis, dan feminisme radikal.

Teori ini memberikan sumbangan terhadap praktik pekerjaan sosial makro, berupa pemahaman mengenai sebab timbulnya masalah gender yang juga berpengaruh terhadap perubahan sosial. Dengan memahami permasalahan tersebut, seorang pekerja sosial kemudian mampu menyusun cara untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian masalah tersebut dapat dilakukan dengan mendirikan organisasi kemasyarakatan

wanita yang dinamakan National Organization of Women untuk menyetarakan kedudukan wanita dalam bidang politik, ekonomi, dan kehidupan sosial.

Melihat dari kontribusi yang diberikan oleh masing-masing teori terhadap pelaksanaan praktek pekerjaan, maka dapat disimpulkan bahwa teori sangat penting bagi pekerja sosial profesional dalam melaksanakan prakteknya. Apabila praktik pekerjaan sosial dilaksanakan tanpa dasar teori maka usaha pemecahan masalah tersebut akan jadi penyebab munculnya masalah baru. Sementara, masalah sosial yang ada di masyarakat ini bukanlah suatu hal yang dieksperimen pemecahan masalahnya, apalagi objek dalam masalah sosial adalah manusia. Oleh karena itu, praktik haruslah seimbang, karena teori merupakan pedoman untuk memudahkan praktik.

B. KEBIJAKAN PROFESIONALISME PEKERJA SOSIAL

Berbicara tentang rumusan substansial kebijakan tentang profesionalisme pekerja sosial harus bersumber dari pada rumusan ideologi dan konstitusi, yaitu Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Mandat dan amanat konstitusional untuk memajukan kesejahteraan sosial termaktub dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan

Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Dalam rumusan Pembukaan UUD 1945 tersurat sebuah alasan keberadaan Negara Republik Indonesia adalah untuk mensejahterakan rakyat berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

1. Pekerjaan Sosial Sebagai Profesi

Definisi dan konsep tentang tenaga kesejahteraan sosial profesional dirumuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Bab I Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, "Tenagakesejahteraan sosial adalah seseorang yang dididik dan secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.

Sementara definisi dan konsep pekerjaan sosial lamaran dalam Lampiran Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 87 / HUK / 2003 Tanggal 13 November 2003 tentang

Pengembangan Profesi Pekerjaan Sosial di Indonesia, Bab I butir D ayat 2 yang berbunyi, "Pekerjaan sosial adalah:

- a) Profesi utama dalam pelayanan kesejahteraan sosial, baik pelayanan langsung maupun tidak langsung;
- b) Pekerjaan sosial adalah suatu konstelasi nilai, tujuan, pengakuan, pengetahuan, dan metode untuk membantu individu, keluarga, kelompok, organisasi, dan masyarakat melaksanakan kehidupan/fungsionalitas sosial sebaik-baiknya melalui: sistem dan menguasai masalah sosial yang dikenal individu, keluarga, kelompok, organisasi, dan masyarakat yang timbul dari ketidakseimbangan antara diri mereka dan lingkungan sosialnya. Identifikasi kemungkinan timbulnya ketidakseimbangan tersebut dapat mencegahnya; sinyal dan potensi penguatan individu, keluarga, kelompok, organisasi, dan masyarakat secara optimal;
- c) Fungsi utama pekerja sosial adalah mengembangkan kemampuan masalah-masalah sosial individu, keluarga, kelompok, organisasi, masyarakat, dan potensi pengembangan diri mereka;
- d) Mengusahakan beroperasinya secara manusiawi sistem sumber dan pelayanan dalam masyarakat; terhubung individu, keluarga, kelompok, organisasi, dan masyarakat dengan sistem sumber, pelayanan dan peluang; strategi intervensi pekerjaan termasuk: strategi perubahan langsung: strategi perubahan langsung terhadap individu, keluarga, kelompok, organisasi, dan masyarakat; perubahan strategi langsung di lingkungannya; perubahan strategi

tidak langsung terhadap perundangan dan kebijakan kesejahteraan sosial, program kesejahteraan sosial, pengelolaan pelayanan kesejahteraan sosial, serta penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, reformasi, dan pembangunan kesejahteraan sosial;

- e) Kompetensi dalam strategi intervensi langsung: membantu individu, keluarga, kelompok, organisasi, dan masyarakat untuk mencegah timbulnya permasalahan sosial individu, keluarga, kelompok, organisasi, dan masyarakat; membantu perseorangan, kelompok atau komunitas dalam getar, mengerahkan, dan mengatur nilai-nilai dan sumber; kata dan potensi perseorangan, kelompok atau komunitas, yaitu kesadaran sosial, tanggungjawab sosial, kepedulian sosial dan kesetiakawanan sosial masyarakat; membantu perseorangan, kelompok atau masyarakat mengatasi atau memecahkan permasalahan sosial yang dihadapinya serta memperbaiki dan taraf fungsionalitas sosialnya; mendorong, meningkatkan, mengembangkan, dan mengorganisasikan prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pelayanan dan pembangunan kesejahteraan sosial pada khususnya dan kegiatan-kegiatan pembangunan pada umumnya;
- f) Kompetensi dalam strategi intervensi tidak langsung: meningkat, manajer, mengadministrasikan kegiatan dan Lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat; melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang kesejahteraan sosial; melaksanakan pendidikan dan pelatihan profesional pekerjaan sosial; menganalisis dan merumuskan rancangan kebijakan dan menyusun rencana

program kesejahteraan sosial; serta dalam tim antardisiplin ilmu dan antarsektor dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional atau daerah.

Pekerja sosial yang profesional juga disejajarkan dengan pekerja profesional yang lain, terutama dalam lingkungannya dengan tunjangan jabatan fungsional pekerja sosial. Hal ini dirumuskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial, di mana Pasal 1: Peraturan Dalam Peraturan Presiden ini yang dengan Tunjangan jabatan Fungsional Pekerja sosial, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pekerja Sosial adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS) yang dinaikkan dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan Fungsional Pekerja sosial sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan.

Selanjutnya dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 butir 7 dan 8 ditegaskan: Kualifikasi profesional adalah kualifikasi yang bersifat keahlian yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang didapatkan dari Pendidikan berkelanjutan secara sistematis pelaksanaan tugasnya termasuk penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan dan penerapan konsep, teori, ilmu dan senior untuk masalah-masalah serta memberikan perawatannya dan terikat pada etika profesi.

Kualifikasi teknisi atau penunjang profesional adalah kualifikasi yang bersifat keterampilan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang didapatkan dari Pendidikan kejuruan dan pelatihan teknis yang pelaksanaan tugasnya termasuk kegiatan teknis professional berdasarkan prosedur standar operasional serta melatihkannya dan terikat pada etika profesi.

Berkaitan dengan jabatan fungsional keahlian dirumuskan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Pasal

Jabatan fungsional keahlian adalah jabatan fungsional yang pelaksanaan tugasnya: Mensyaratkan kualifikasi professional dengan pendidikan serendah-rendahnya berijazah sarjana (strata 1); Meliputi kegiatan yang terkait dengan penelitian dan pengembangan, peningkatan dan penerapan konsep dan teori serta metoda operasional dan penerapan ilmu pengetahuan yang mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi ilmu pengetahuan yang mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional yang bersangkutan; terikat pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya.

Akan tetapi, sebenarnya tunjangan jabatan fungsional pekerja sosial di lingkungan Kementerian Sosial belum bisa dilaksanakan sebab sampai saat ini belum ada peraturan tentang kualifikasi pekerja sosial yang profesional. Juga belum adanya lembaga akreditasi dan sertifikasi pekerja sosial profesional di Kementerian Sosial sehingga sulit untuk menerapkan tunjangan jabatan fungsional keahlian berdasarkan kualifikasi profesional.

Dalam jabatan pekerja fungsional pekerjasosial dan angka kreditnya, pekerja sosial dikategorikan sebagai profesi. Hal itu Keputusan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tidak. Kep/03/M.PAN/ 1/2004 tentang jabatan fungsional pekerja sosial dan angka kreditnya, Bab I Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, "Pekerja sosial adalah suatu profesi yang melayani untuk membantu orang, baik individu, kelompok atau masyarakat dalam memperbaiki atau meningkatkan kemampuan mencapai keberfungsian sosial secara penuh serta mengupayakan kondisi-kondisi kemasyarakatan tertentu yang menunjang fungsi sosial.

Dalam rumusan ini, secara jelas dinyatakan menyatakan bahwa pekerja sosial profesional itu adalah "pembantu" (helper). Hal ini sejalan dengan rumusan hakikat pekerja sosial profesional untuk membantu atau menolong. Malah, dalam Undang-Undang tentang Kesejahteraan Sosial, kata "membantu" atau "Menolong" tidak muncul sama sekali, tetapi dipakai kata "makan" dan "melayani". Dilihat dari sejarah awalnya, pekerja sosial (pekerja sosial) memang ada untuk membantu atau menolong individu, kelompok, dan masyarakat agar mereka bisa memahami kondisi kehidupannya dan keluar atau bebas dari kesulitan hidup sehingga terciptalah keadilan sosial dan kesejahteraan sosial.

Jadi pekerja sosial hanya sebagai pembantu atau penolong. Definisi dan konsep profesi dalam Lampiran Keputusan Menteri Sosial I Republik Indonesia Nomor 87/HUK/ 2003 Tanggal 13 November 2003 tentang Pengembangan Profesi Pekerjaan Sosial di Indonesia, Bab I butir D ayat 1 yang berbunyi:

- a) Secara sosial, moral, hukum, dan agama sah;
- b) Berdasarkan kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan khusus yang benar;
- c) Berdasarkan kerangka pengetahuan dan kerangka nilai yang diperoleh melalui pendidikan khusus yang sah dan akan menggunakan metode, teknik, dan keterampilan yang dapat dipertanggungjawabkan secara sosial;
- d) Berdasarkan pengangkatan atau perizinan resmi;
- e) Oleh seseorang tentang keberadaan masyarakat dan kemanafaatannya;
- f) Mempunyai kedudukan, kewenangan, dan kekuasaan khusus di bidangnya;
- g) Tidak mendapatkan ketidakseimbangan yang patut atas pelaksanaan tugas profesionalnya dari penerima pelayanan atau dari lembaga.

Dalam peraturan ini, lamaran enam syarat untuk disebut sebagai profesi. Keenam syarat itu adalah:

- 1) Pertama, sah secara sosial, moral, hukum, dan agama. Artinya, pekerjaan itu disebut profesi jika memenuhi kriteria sah secara sosial, moral, hukum, dan agama.
- 2) Kedua, diperoleh melalui pendidikan.
- 3) Ketiga, pekerjaan itu ditempatkan dalam kerangka nilai dan dapat dipertanggungjawabkan secara sosial.
- 4) Keempat, pekerjaan itu disebut profesi jika oleh masyarakat.
- 5) Kelima, mempunyai kedudukan dan kewenangan dalam bidangnya.
- 6) Keenam, pekerjaan itu menghasilkan ketidakseimbangan.

2. Konsep Pekerja Sosial Profesional

Sementara tentang pekerja sosial profesional dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Bab I Pasal 1 ayat 4 yang berbunyi: Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di Lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki pekerjaan dan pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Berdasarkan rumusan ini, pekerja sosial profesional mengandung unsur-unsur yang penting sebagai berikut:

- 1) Seseorang yang bekerja di Lembaga pemerintah atau lembaga swasta;
- 2) Seseorang yang memiliki kompetensi, profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam bidang pekerjaan sosial;
- 3) Seseorang yang memiliki pendidikan, pelatihan, dan pengalaman praktik sebagai pekerja sosial;
- 4) Melayani yang melaksanakan-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa konseptualisasi pekerja sosial dalam rumusan ini mengandung atau memuat unsur tidak termasuk kompetensi profesi pekerja sosial dan kepedulian dalam bidang pekerjaan sosial; memiliki pendidikan, pelatihan dan pengalaman praktik sebagai pekerja sosial dan

melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. Konseptualisasi pekerja sosial profesional dalam rumusan ini mengabaikan unsur fundamental dari hakekat pekerja sosial profesional yang memanfaatkan hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Oleh karena itu, sebenarnya kekurangan mendasar dalam rumusan pemikiran soal pengembangan profesionalisme adalah pada dasar pemikiran tentang pemberdayaan dan perwujudan mandate keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Uraian tersebut sesuai dengan teori pemberdayaan pekerja sosial menurut Dubois, bahwa profesionalisme pekerja sosial adalah untuk membantu orang lain, yakni untuk meningkatkan kemampuan individu dalam masalah masalah; terhubung dengan klien dengan sumber-sumber yang dibutuhkan; meningkatkan jaringan pelayanan sosial; dan meningkatkan keadilan sosial melalui pengembangan kebijakan.

Dapatlah dikatakan singkat bahwa profesionalisme pekerja sosial memiliki kompleksitas nilai, pengetahuan, dan keterampilan. Ada tiga nilai yang harus dimiliki pekerja sosial profesional, yakni nilai tentang orang (values about people), nilai tentang masyarakat (values about society), dan nilai tentang perilaku profesional (values tentang perilaku profesional).

Berdasarkan hal itu, peningkatan dan peningkatan profesi pekerjaan sosial harus benar-benar sungguh-sungguh pentingnya nilai-nilai yang berhubungan dengan individu, masyarakat, dan perilaku profesional. Pekerja sosial dan profesionalisme

pekerja yang telah diuraikan senada dengan yang ditegaskan pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 108/HUK/2009 tentang Sertifikasi Bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kerja Sosial, Pasal 1 Pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa: pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah atau swasta, yang memiliki pekerjaan dan pekerjaan sosial, serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

3. Kualifikasi Pekerja Sosial Profesional

Kualifikasi pekerja sosial profesional dirumuskan pada Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang berbunyi: Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, dan penyuluh sosial pekerja jadi maksud ayat 1 huruf a, b, dan c sekurang memiliki kualifikasi: pendidikan di bidang kesejahteraan sosial; pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan atau pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.

Pasal ini membahas kualifikasi pekerja sosial profesional, yakni:

- a) Pendidikan di bidang kesejahteraan sosial
- b) Pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial
- c) Pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.

Masih tentang kualifikasi ini, dirumuskan dalam Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi: Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, dan penyuluh sosial dimaksud Pasal 33 ayat 1 huruf a, b, c dapat memperoleh: pendidikan, pelatihan, promosi, tunjangan dan atau penghargaan. Jadi dapat dikatakan bahwa pekerja sosial dapat meningkatkan kualitas profesionalnya melalui:

- a) Sebuah pendidikan dan pelatihan
- b) Promosi dan tunjangan
- c) Penghargaan

Pengaturan lebih lanjut mengenai kualifikasi dan kompetensi Pekerja Sosial Profesional pengawasan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 108/HUK/2009 tentang Sertifikasi Bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi "Sertifikasi menentukan kualifikasi dan kompetensi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial.



PEKERJAAN SOSIAL SEBAGAI PILIHAN PROFESI

A. PEKERJAAN SOSIAL SEBAGAI PILIHAN PROFESI

1. Suatu Profesi Yang Sedang Berkembang

Pekerjaan sosial ialah suatu profesi yang secara historis mempertahankan suatu komitmen yang partisan dalam bekerja dengan orang-orang yang miskin atau tidak beruntung. Akan tetapi pandangan para pekerja sosial terhadap klien mereka dan keinginan-keinginan mereka dalam kaitan dengan tindakan-tindakan tertentu berbeda. Banyak pekerja sosial memandang populasi yang kurang beruntung sebagai korban dari ketidakteraturan sosial, ketidakadilan sosial, dan perubahan sosial.

Sebagai pembaharu sosial, mereka menghadapi sebab-sebab akar masalah, struktur-struktur sosial yang diperbaharui, dan terlibat dalam pengadvokasian perubahan-perubahan kebijakan dan perundang-undangan untuk memperbaiki kondisi-kondisi lingkungan dan menciptakan kesempatan-kesempatan. Kelompok pekerja sosial lain memandang populasi yang kurang peuntung sebagai pemohon—tidak berguna, tidak berdaya, dan membutuhkan reformasi pribadi.

Sebagai pekerja amal, mereka menerapkan ukuran-ukuran untuk memperbaiki moral individual dan tanggung jawab sosial. Bab ini menguji perspektif tentang reformasi masyarakat dan reformasi individual yang membentuk perkembangan profesi pekerjaan sosial. Bab ini juga membahas empat pokok bahasan lain yaitu, pertama, penelusuran lahirnya pekerjaan sosial sebagai suatu profesi; kedua, profil persyaratan pekerjaan sosial bagi status profesional, munculnya organisasi profesional, dan perkembangan pendidikan pekerjaan sosial; ketiga, mendeskripsikan landasan umum nilai-nilai pekerjaan sosial, landasan pengetahuan, dan keterampilan; dan keempat, mendeskripsikan prinsip-prinsip yang memandu profesi.

1. Lahirnya Pekerjaan Sosial sebagai Suatu Profesi

Pekerjaan sosial berkembang sebagai suatu kegiatan profesional selama akhir abad ke-19. Akarnya terletak pada kegiatankegiatan badan sosial awal, gerakan organisasi amal, dan Gerakan rumah pemukiman.

2. Badan Sosial Pertama

Sejumlah badan sosial berkembang di Amerika Serikat selama abad ke-19 untuk mengamalkan berbagai isu sosial antara lain New York Society for the Prevention of Pauperism (1818); Associations for Improving the Condition of the Poor (1840-an); berbagai badan sosial penyelamatan anak; dan American Social Science Association (1865), dari mana

beberapa anggotanya tertarik dalam praktek yang digunakan untuk membentuk The Conference of Charities pada tahun 1874 kemudian berubah menjadi The National Conference on Charities and Correction pada tahun 1879. Banyak di antara badan-badan sosial tersebut mensponsori publikasi dan jurnal untuk memberi informasi kepada anggota-anggotanya. Contoh dari jurnal-jurnal awal ialah *Lend A Hand* (1886), *Charities Review* (1891), *Social Casework* (1920), *Child Welfare* (1922), *Social Service Review* (1927), dan *Public Welfare* (1943).

The National Conference on Charities and Correction dibentuk pada tahun 1879 untuk mengalamatkan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, kejahatan, dan keterlantaran. Keanggotaan dari Konferensi Nasional ini, utamanya terdiri dari para pejabat publik dan anggota-anggota relawan dari The State Boards of Charities and Correction, berkepentingan dengan administrasi program-program kesejahteraan yang efektif dan reformasi lembaga-lembaga kesejahteraan kemanusiaan.

Walaupun The National Conference on Charities and Correction sudah lebih tua dari pekerjaan sosial sebagai suatu bidang profesional hampir tiga dasawarsa, tema dari hasil sidang tahunannya mencerminkan akar pekerjaan sosial. Kepedulian terhadap orang miskin, orang cacat, orang yang mengalami gangguan mental, dan yatim piatu di rumah-rumah miskin, panti asuhan, dan tempat penampungan adalah kepentingan sentral pada dasawarsa terakhir abad ke-19.

Sebagai suatu lembaga fundamental bagi American Poor Relief, rumah-rumah miskin “berisi orang sakit, orang miskin, orang sakit jiwa, anak-anak haram dan terlantar, PSK dan ibu-ibu yang tidak menikah, atau orang-orang seperti mereka adalah “kaum miskin yang hina, bukan orang-orang yang dapat mengurus hidupnya” (Van Waters, 1931: 4, dalam DuBois & Miley, 2005: 31).

Ini “era bangunan besar” yang memfokuskan diri dalam memberikan pengasuhan bagi kaum terlantar di dalam masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan khusus anak-anak terlantar dan anak-anak muda nakal; serta pendekatan baru kemanusiaan bagi perlakuan orang-orang yang sakit jiwa, mendorong keanggotaan The National Conference on Charities and Correction untuk menguji pengasuhan terinstitusionalisasi dengan satu mata yang kritis dan untuk mengembangkan metode-metode praktek untuk mengurus orang sakit, orang miskin, anak terlantar, dan anak pelaku kriminal.

3. Masyarakat Organisasi Amal

S. Humphreys Gurteen mendirikan Masyarakat Organisasi Amal (Charity Organization Society, COS) pertama di Amerika Serikat pada tahun 1877 di Buffalo, New York. Gurteen yang adalah seorang pendeta suatu gereja di Inggris terkesan dengan karya The London Society for Organizing Charitable Relief and Repressing Mendicancy. Ia mengusulkan untuk mengadopsi struktur organisasi dari masyarakat amal itu untuk mengatasi kekacauan dan praktekpraktek pemberian bantuan amal yang

indiskriminatif yang terjadi di Buffalo, yang diyakini oleh Gurteen melanggengkan kemiskinan (Lubove, 1965, dalam DuBois & Miley, 2005:31). Dalam beberapa tahun, 25 cabang COS berdiri di seluruh Amerika Serikat untuk mengatasi krisis ekonomi menyusul perang sipil. Pada tahun 1892, cabang COS di Amerika Serikat bertambah menjadi 92 cabang (Brieland, 1995, dalam DuBois & Miley, 2005: 31).

Usaha-usaha gerakan organisasi amal diarahkan secara langsung untuk mengadministrasikan pelayanan-pelayanan sosial melalui kegiatan-kegiatan amal pribadi. COS menggunakan komisi-komisi yang ada di RT/RW yang terdiri dari penduduk lokal dan wakil-wakil badan sosial untuk mengorganisasikan pelayanan-pelayanan kesejahteraan masyarakat (Lubove, 1965, dalam DuBois & Miley, 2005:31). COS mempopulerkan teknik-teknik investigasi dan registrasi orang-orang miskin untuk mengurangi kemiskinan. Metode filantropinya yang ilmiah mendasarkan amal pada investigasi para pemohon dan prosedur yang efisien.

Berdasarkan keyakinan bahwa penerimaan amal mengkorupsi karakter dan motivasi individual, seorang 'petugas bayaran' mengarahkan "para pengunjung yang bersahabat" untuk menemui para pemohon secara teratur. Para pengunjung yang bersahabat memberikan dorongan dan bertugas sebagai model karakter moral (Germain & Gitterman, 1980). Para pekerja organisasi amal mencoba menempatkan sumber-sumber di dalam situasi-situasi keluarga itu sendiri, yang

memberikan bantuan amal sebagai suatu usaha terakhir (Austin, 1985, dalam DuBois & Miley, 2005: 31). Persiapan kerja bagi pekerjaan amal dipandang penting ketika metode-metode casework muncul. Tuntutan akan para pekerja terlatih mengarah kepada penempatan secara bertahap para relawan sebagai staf profesional.

Mary Richmond (1861-1928), seorang pemimpin COS yang berpengaruh, adalah orang pertama yang terlibat dengan pekerjaan amal sebagai staf untuk COS Baltimore. Ia ditunjuk sebagai sekretaris umum COS Philadelphia pada tahun 1900 dan kemudian bekerja untuk Yayasan Russell Sage. Sebagai seorang pemimpin yang berpengaruh dalam kegiatan-kegiatan organisasi amal, Richmond adalah sosok yang sangat penting dalam pembentukan kursus profesi pekerjaan sosial. Bukunya *Social Diagnosis* (1917) menguraikan teknik-teknik asesmen, dan karyanya *What Is Social Case Work?* (1922) memberikan suatu definisi tentang metode casework (Brieland, 1995).

Sejarah COS menunjukkan bahwa pelayanan-pelayanan diberikan hampir secara eksklusif kepada keluarga-keluarga Kulit Putih. "Ada suatu perasaan umum di kalangan anggota staf COS bahwa adalah lebih bijak berkonsentrasi pada masalah-masalah kemiskinan di kalangan orang Kulit Putih, meninggalkan masalah-masalah di kalangan orang Kulit Berwarna demi masa depan" (Solomon, 1976: 75, dalam DuBois & Miley, 2005: 32). Akan tetapi COS Memphis mengoperasikan Badan Amal Kaum Kulit Berwarna (*The Colored Federated Charities*), yang Dewan

Direktornya adalah orang Kulit Berwarna, mengoperasikan para pekerjanya sendiri, dan melaksanakan kegiatan pengumpulan dananya sendiri.

Karya COS juga meliputi kegiatan-kegiatan pengorganisasikan komunitas (Dunham, 1970, dalam DuBois & Miley, 2005: 32). Misalnya, jejaring bagi pendekatan kooperatif untuk mengatasi masalah-masalah kaum miskin dikembangkan, dan banyak kegiatan-kegiatan masyarakat ditujukan untuk mencegah penyakit tuberkulosis, mengalami masalah-masalah perumahan, dan mengurangi usaha-usaha yang mempekerjakan anak. Sebagai suatu kasus, COS New York memulai publikasinya, mendirikan pendidikan tinggi pekerjaan sosial pertama (sekarang Columbia University School of Social Work), dan melaksanakan penelitian lapangan (Warner, Queen, & Harper, 1930, dikutip dari Dunham, 1970, dalam DuBois & Miley, 2005: 32).

Banyak kalangan menyebut respons COS terhadap kebutuhan-kebutuhan individu sebagai asal-mula social casework. Minat dalam memahami relasi keluarga, pemanfaatan "jejaring bantuan alamiah," yang menekankan tanggung jawab pribadi (yang dapat diterjemahkan menjadi self-determination), dan perhatian atas akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan adalah beberapa usaha COS yang memberi sumbangan kepada pekerjaan social (Leiby, 1984, dalam DuBois & Miley, 2005: 32).

4. Gerakan Rumah Pemukiman

Gerakan rumah pemukiman berula di London pada akhir abad ke-19 ketika Samuel Barnett menemukan Toynbee Hall. Ia adalah seorang pendeta di suatu daerah kumuh di London, yang mengubah jemaatnya menjadi suatu kegiatan RT/RW. Ia merekrut mahasiswa universitas untuk tinggal di pusat dan bekerja dengan keluarga-keluarga di RT/RW.

Berdasarkan pengalamannya sendiri di Toynbee Hall, Stanton Coit mengembangkan rumah pemukiman pertama di Amerika Serikat yaitu Neighborhood Guild di New York City. Coit mencirikan tujuan rumah-rumah pemukiman seperti ini: Gagasan fundamental yang terdapat dalam pemukiman ini ialah bahwa, tanpa memandang keyakinan atau ketidakyakinan agama, semua manusia, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, di suatu jalan raya, di jalan raya mana saja di setiap wilayah kelas pekerja ... harus diorganisasikan ke dalam klub yang oleh mereka sendiri, atau dalam persekutuan dengan tetangganya, menjalankan atau mendorong orang lain untuk menjalankan reformasi --domestik, industri, pendidikan, hiburan atau rekraasi— yang dituntut oleh cita-cita masyarakat. Ini adalah ekspresi dari gagasan kerjasama keluarga (Trattner, 1999).

Banyak rumah-rumah pemukiman lain didirikan di kota-kota besar di seluruh Amerika Serikat termasuk Hull House Chicago, yang dimulai oleh Jane Adams dan Ellen Gates pada tahun 1889; The Chicago Commons dimulai oleh Graham Taylor pada tahun 1894; Andover House di Boston yang didirikan oleh

Robert Woods pada tahun 1891; dan Henry Street Settlement di New York yang didirikan oleh Lillian Wald pada tahun 1893. Gerakan rumah pemukiman mengkombinasikan advokasi sosial dan pelayanan-pelayanan sosial untuk merespons disorganisasi sosial yang diakibatkan oleh perkembangan industrialisasi dan urbanisasi serta meningkatnya jumlah imigran ke Amerika Serikat pada abad ke-20.

B. MENDEFINISIKAN PEKERJAAN SOSIAL SEBAGAI SALAH SATU PROFESI

Banyak definisi pekerjaan sosial yang ditemukan dalam kepustakaan profesional menyinggung tentang tema pemberian bantuan individual dan perubahan kondisi-kondisi sosial. Beberapa definisi menekankan manusia, sementara definisi lain menggabungkan interaksi timbal balik antara manusia dan lingkungan sosialnya. Di antara kecenderungan-kecenderungan historis yang mempengaruhi definisi praktek ini ialah munculnya social casework sebagai suatu metodologi pada awal tahun 1900-an, gerakan psikoanalitik pada tahun 1920-an, Gerakan kesejahteraan publik pada tahun 1930-an, diterimanya metodologi social group work dan community organizing pada tahun 1940-an dan 1950-an, kegiatan-kegiatan reformasi sosial pada tahun 1960-an, dan popularitas perspektif sistem sosial dan ekologi pada tahun 1970-an dan 1980-an.

1. Sosial Casework

Dalam *Social Diagnosis* (1917) dan *What Is Social Case Work?* (1922), Mary Richmond mengidentifikasi pertama kali prinsip-prinsip, teori-teori, dan metode-metode social casework atau bekerja dengan individu:

Richmond menegaskan suatu proses yang tentative tetapi konkret dan komprehensif tentang asesmen keberfungsian sosial. Ia mengamati banyak dimensi interaksi sosial yang menyumbang bagi memadai atau tidak memadainya keberfungsian sosial, keadaan pikiran caseworker sebagai suatu faktor dalam asesmen, pentingnya konteks dalam memahami perilaku, dampak keluarga dan peran-peran sosial terhadap kesejahteraan mental, dan esensi proses wawancara termasuk obyektivitas, empati,

pemanfaatan kekuatan-kekuatan individual, dan interaksi individu dan lingkungan sosial. Panduan pertama praktek social casework mencerminkan wilayah bahwa pekerjaan sosial adalah pelopor interaksi antara individu dan masyarakat (Watkins, 1983: 46, dalam DuBois & Miley, 2005: 36).

Menurut Richmond, social casework menggabungkan empat proses: wawasan kepada individu, wawasan kepada lingkungan sosial, tindakan langsung pikiran atas pikiran, dan tindakan tidak langsung melalui lingkungan sosial (Lubove, 1965: 48, dalam DuBois & Miley, 2005: 36). Edith Abbott mengemukakan suatu ucapan yang menarik yang disampaikan kepada Richmond yang mengklarifikasikan posisinya:

“pekerja sosial baik, kata Richmond, tidak berlangsung secara mekanis membantu orang keluar dari suatu selokan. Tetapi ia mulai menemukan apa yang harus dilakukan untuk mengeluarkan orang itu dari selokan itu” (Abbott, 1919: 313, dalam DuBois & Miley, 2005: 36). Walaupun fokus utamanya ialah perubahan individu—“membantu orang keluar dari selokan,” Richmond tidak mengabaikan dampak “selokan”—lingkungan—terhadap keberfungsian individu.

Salah satu perspektif pekerjaan sosial normatif, dinyatakan dalam Laporan Konferensi Milford (American Association of Social Workers, 1929), mencerminkan suatu ketetapan hati untuk memperkuat sifat umum dari identitas pekerjaan sosial (Lubove, 1965: 48, dalam DuBois & Miley, 2005: 36) dan, dalam proses ini, diberi tekanan yang lebih besar pada adaptasi oleh individu. Laporan Konferensi Milford itu mendorong pendidikan pekerjaan sosial profesional untuk memfokuskan diri bagaimana membuat penyesuaian-penyesuaian pada individu-individu yang cacat atau menyimpang.

2. Gerakan Psikoanalitik

Psikoanalitik berfokus pada individu, yang mempertimbangkan faktor-faktor internal seperti kegagalan dan ketidakmampuan menyesuaikan diri, juga dipengaruhi oleh gerakan psikoanalitik, suatu gerakan yang populer pada tahun 1920-an. Perspektif psikodinamika Sigmund Freud lebih menekankan dinamika intrapsikis manusia daripada pengaruh kondisi-kondisi lingkungan terhadap keberfungsian sosial.

Trattner (1999) menyatakan bahwa, "Sekali diingatkan akan pengaruh-pengaruh ketidaksadaran atas motivasi, pekerja sosial psikiatrik merasa bahwa environmentalisme, yang didasarkan atas asumsi bahwa manusia adalah rasional, tidak berkaitan dengan faktor-faktor dinamis dalam perilaku manusia" (h. 261).

Mary Cromwell Jarrett (1877-1961) memprakarsai suatu spesialisasi dalam pekerjaan sosial psikiatrik, mengembangkan suatu kurikulum pendidikan psikiatrik, dan mendirikan Asosiasi Pekerja Sosial Psikiatrik Amerika Serikat. Ia menekankan perubahan pekerjaan sosial yang berfokus psikiatri dari isu-isu lingkungan kepada gangguan internal dan personal. Ia menyimpulkan bahwa proses-proses mental internal adalah determinan utama perilaku (Hartman, 1986a).

Dua faktor tambahan memperkuat tekanan pada perlakuan individu: munculnya gerakan kesehatan mental dan pelayanan-pelayanan kesehatan mental yang diberikan oleh kaum profesional yang bekerja di Palang Merah Amerika Serikat pada waktu Perang Dunia I. Kaum profesional dan awam yang terlibat dalam gerakan kesehatan mental menekankan perbaikan kondisi-kondisi di rumah sakit-rumah sakit jiwa. "Gerakan advokasi awal yang memfokuskan perhatian publik pada perawatan dan perlakuan di setting rumah sakit dan program-program berbasis rumah sakit diperluas untuk mencakup perawatan rumah sakit terspesialisasi dan unit-unit psikiatrik di rumah sakit-rumah sakit umum" (Lin, 1995: 1705). Palang Merah Amerika Serikat memberikan pelayanan-pelayanan casework kepada para veteran Perang Dunia I dan keluarga mereka untuk

mengalamatkan dampak psikologis dari perang (Schriver, 1987, dalam DuBois & Miley, 2005: 36). Pelayanan casework kepada para veteran Perang Dunia I ini merupakan usaha-usaha kepeloporan para pekerja sosial di bidang kesehatan mental (Austin, 1985, dalam DuBois & Miley, 2005: 36)). Dengan gerakan-gerakan ini, landasan diagnostic awal Richmond tentang pekerjaan sosial diperkuat untuk mencerminkan suatu focus yang lebih individual yang kurang menekankan reformasi sosial.

3. Gerakan Kesejahteraan Umum

Gerakan kesejahteraan umum pada tahun 1930-an menekankan dimensi-dimensi sosial, budaya, politik, dan ekonomi dari keberfungsian sosial. Penekanan ini timbul dari dampak resesi besar. Meluasnya pengangguran dan kemiskinan menunjukkan suatu sebab struktural dari masalahmasalah sosial. Akan tetapi kecenderungan terhadap intervensi lingkungan dibayangi oleh gerakan psikoanalitik konservatif yang menekankan pada ketidakmampuan individu dalam menyesuaikan diri dalam suatu model medis dari perubahan psikologis.

Dua pekerja sosial, Harry Hopkins dan Frances Perkins, adalah orang-orang yang memberikan kepemimpinan dalam gerakan kesejahteraan umum. Harry Hopkins (1890-1946), seorang pekerja sosial dari Negara Bagian Iowa yang pindah ke New York untuk bekerja di gerakan rumah pemukiman, memainkan suatu peran yang signifikan dalam pengembangan

kebijakan sosial selama era resesi besar. Sebagai administrator New York State's Temporary Emergency Relief Administration, ia mengembangkan suatu sistem yang memberikan bantuan umum kepada para pengangguran. Pada tahun 1933, ia bergabung dengan program pemerintah pusat Roosevelt untuk mendukung usaha usaha bantuan propinsi dan lokal, mengadvokasi pembentukan program-program bantuan kerja, dan mendorong pengembangan Social Security Act 1935 (Bremer, 1986, dalam DuBois & Miley, 2005: 38).

Sebagai pekerja sosial dan pembaharu sosial, Frances Perkins (1880-1965), adalah perempuan pertama yang menjadi anggota kabinet presiden AS. Sebelum ditunjuk menjadi Menteri Tenaga Kerja pada pemerintahan Franklin D. Roosevelt, ia mengadvokasikan reformasi legislatif di Negara Bagian New York untuk memperbaiki kondisi-kondisi kerja yang membahayakan. Perkins memperoleh suatu pengalaman administratif sebagai komisar industri berskala nasional di New York. Dalam posisinya di kabinet Roosevelt, ia memainkan suatu peran kunci dalam mengembangkan kebijakan jaminan sosial nasional. Sebagai hasil dari pengaruh Perkins, ketentuan-ketentuan bagi kesehatan ibu dan anak, anak cacat, pelayanan kesejahteraan anak, rehabilitasi kerja, kesehatan umum, bantuan kepada anak terlantar, dan asistensi kepada orang cacat dimasukkan dalam perundangundangan ini (Cohen, 1986, dalam DuBois & Miley, 2005: 38).

4. Sosial Group Work dan Community Organization

Metodologi social group work dan community organization memperoleh penerimaan dan pengakuan formal sebagai intervensi pekerjaan sosial pada tahun 1940-an dan 1950-an. Kedua metodologi ini menekankan konteks situasional dari perubahan perilaku. Penerimaan dan pengakuan group work dan community organization sebagai metode pekerjaan sosial yang diterima menandai suatu transformasi yang signifikan dalam profesi pekerjaan sosial. Sebelumnya pekerjaan sosial cenderung dilihat sebagai identik dengan casework (Goldstein, 1973).

Group work menggunakan interaksi kelompok kecil sebagai wahana bagi perubahan sosial. Dalam sejarah awalnya, group work berfokus pada kegiatan-kegiatan pendidikan, rekreasi, dan pembangunan karakter melalui organisasi-organisasi seperti Perhimpinan Pemuda Kristen Amerika Serikat (Young Men Christian Association, YMCA) dan Perhimpinan Pemudi Kristen Amerika Serikat (Young Women Christian Association, YWCA), Pramuka, RT/RW, pemukiman-pemukiman, dan Bala Keselamatan. Fokus social group work termasuk perkayaan, pendidikan, dan reformasi sosial. Sebagai suatu metode pekerjaan sosial, social group work menggunakan saling pengaruh kepribadian dalam prosesproses kelompok untuk mencapai tindakan kelompok yang kooperatif yang mengamatkan tujuan-tujuanbersama.

Grace Coyle (1892-1962) adalah seorang pemimpin awal dalam social group work. Setelah lulus dari Wellesley

College, ia memperoleh sertifikat dari Sekolah Filantropi New York, S2 Ekonomi, dan S3 Sosiologi dari Universitas Columbia. Sebelumnya ia bekerja di suatu rumah pemukiman dan kemudian pindah ke YWCA, dan akhirnya ia menjadi dosen di Universitas Case Western Reserve. Dengan publikasi bukunya, *Social Process in Organized Groups*, ia mulai mengembangkan landasan ilmu sosial dari pekerjaan sosial dalam bekerja dengan individu dan kelompok. Coyle menekankan penggunaan pengalaman-pengalaman kelompok kreatif sebagai suatu wahana bagi perubahan dan menekankan partisipasi anggota-anggota kelompok dan pengendalian yang demokratis (Reid, 1986, dalam DuBois & Miley, 2005: 39).

Community organization menciptakan perubahan-perubahan dalam kelompok-kelompok yang lebih besar dan unit-unit organisasi. Usaha-usaha community organization pada dasarnya menciptakan perubahan dalam situasi-situasi atau dalam lingkungan, yang pada gilirannya mempengaruhi kesejahteraan pribadi. Sebagai contoh, usaha-usaha community organization sebelumnya mengalamatkan masalah-masalah komunitas yang disebabkan oleh Perang Dunia II, seperti kebutuhan akan jaringan pelayanan-pelayanan bagi keluarga-keluarga tentara dan pelayanan-pelayanan rawat siang bagi anak-anak yang ibunya bekerja di satuan tugas ketentaraan.

Salah seorang pemimpin community organization, Eduard Lindeman (1885-1953), mengajar di Sekolah Pekerjaan Sosial Universitas New York dari tahun 1924 hingga 1950. Visinya tentang pekerjaan sosial melampaui teknik-teknik faksional

dari metode psikoanalitik dan menggabungkan suatu filosofi yang menekankan konteks sosial dari pekerjaan sosial: "Ia mengembangkan suatu perspektif terintegrasi, holistik dan lintas disiplin tentang perilaku manusia dan masalah sosial pada suatu saat ketika para pekerja sosial membaginya ke dalam kamp-kamp perang sepanjang garis-garis ideologi, filosofi, dan teoritik" (Davenport & Davenport, 1986: 500, dalam DuBois & Miley, 2005: 39).

5. Dual perspective

Definisi pekerjaan sosial pada tahun 1950-an mulai menangkap kembali dual perspective tentang individu dan lingkungan sosial yang banyak menghiasi sejarah awal profesi ini. Di antara para kontributor terhadap perspektif ini ialah gagasan Bertha Capen Reynolds, laporan Hollis-Taylor, Definisi Kerja Praktek Pekerjaan Sosial, dan tulisan Hollis tentang "manusia-dalam-situasi."

Bertha Capen Reynolds (1885-1978) ialah seorang advokat sosial penting bagi kelas pekerja dan kelompok-kelompok tertekan. Setelah memperoleh ijazah dalam pekerjaan sosial dan spesialisasi psikiatrik lanjutan, Reynolds bekerja di suatu rumah sakit umum di Massachusetts. Perlawanannya terhadap model medis yang populer dan pengetahuannya yang eksplisit tentang pengobatan pakar adalah bukti dalam penekanannya dalam memobilisasikan perubahan-perubahan lingkungan dan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan klien. Dalam karirnya klak, ia bekerja di National Maritime Union dalam suatu program

yang berfungsi sebagai seorang model bagi pekerjaan sosial di perserikatan-perserikatan. Tekanan Reynolds pada keterlibatan konsumen dalam mengarahkan pelayanan-pelayanan sosial membedakan filosofinya tentang penyelenggaraan pelayanan sosial (Freedberg & Goldstein, 1986; Hartman, 1986b, dalam DuBois & Miley, 2005: 39).

Reynolds menulis secara ekstensif tentang kebutuhan bagi para pekerja sosial untuk mendemonstrasikan kepedulian atas keadilan sosial dan isu-isu hak sipil melalui kegiatan-kegiatan politik. Reynolds (1951) mendeskripsikan social casework sebagai membantu "orang-orang untuk menguji dan memahami realitasnya, fisik, sosial, dan emosional, dan untuk memobilisasikan sumber-sumber yang ada di dalam diri mereka dan di dalam lingkungan sosial mereka untuk memenuhi realitas mereka atau mengubahnya" (h. 13). Ia "sedih karena profesi ini telah kehilangan penglihatan akan komitmennya terhadap manusia, terhadap masyarakat, dan terhadap reformasi" (Goldstein, 1990: 34, dalam DuBois & Miley, 2005: 39). Tanggung jawab individu atas perubahan adalah bukti, tetapi elemen-elemen perubahan berada pada manusia dan lingkungan mereka.

Laporan Hollis-Taylor tentang pendidikan pekerjaan sosial (1951) memotret pekerjaan sosial sebagai suatu aktivitas pemberian bantuan, suatu aktivitas sosial, dan suatu aktivitas perantaraan. Berdasarkan pernyataan PBB tentang dimensi internasional dari praktek pekerjaan sosial, laporan ini mendeskripsikan pekerjaan sosial sebagai berikut:

- a) Adalah suatu aktivitas pemberian bantuan yang dirancang untuk memberi asistensi dalam kaitan dengan masalah-masalah yang menghambat individu, keluarga, dan kelompok dalam mencapai suatu standard kesejahteraan sosial dan ekonomi minimum yang diinginkan.
- b) Adalah suatu aktivitas “sosial” yang dilaksanakan bukan untuk keuntungan pribadi oleh para praktisioner privat tetapi di bawah naungan organisasi, pemerintah atau bukan pemerintah, yang dikembangkan untuk keuntungan anggota-anggota dari masyarakat sesuai dengan asistensi yang ditetapkan.
- c) Adalah suatu aktivitas “perantaraaan” yakni orang-orang, keluarga-keluarga, dan kelompok-kelompok yang kurang beruntung dapat menikmati semua sumber-sumber yang tersedia di dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. (h. 58-59).

Definisi Kerja Praktek Pekerjaan Sosial (1958), hasil Sidang Komisi NASW tentang Praktek yang dikepalai oleh Harriet Bartlett, juga menekankan fokus ganda ini:

Metode pekerjaan sosial ialah penggunaan diri yang bertanggung jawab, berkesadaran, dan berdisiplin dalam suatu relasi dengan individu atau kelompok. Melalui relasi ini praktisioner memfasilitasi interaksi antara individu dan lingkungan sosialnya dengan suatu kesadaran yang

berkelanjutan tentang pengaruh timbal balik antara satu sama lain. Relasi ini memfasilitasi perubahan-perubahan:

- a) Di dalam diri individu dalam kaitannya dengan lingkungan sosialnya,
- b) Lingkungan sosial dalam pengaruhnya terhadap individu
- c) Interaksi antara individu dan lingkungan sosialnya. (h. 7, dalam DuBois & Miley, 2005: 40)

Definisi ini memperluas fokus pekerjaan sosial dari bekerja dengan individu menjadi bekerja dengan individu dan kelompok. Definisi ini juga menggambarkan dimensi relasi timbal balik yang interaksional antara individu dan lingkungan sosialnya sebagai suatu sasaran perubahan.

Florence Hollis (1964), seorang profesor pekerjaan sosial terkemuka, menciptakan ungkapan "manusia-dalam situasinya" untuk mendeskripsikan interaksi tiga sisi dari "konfigurasi yang terdiri dari manusia, situasi, dan interaksi di antara keduanya" (h. 10). Metode psikososial Hollis menekankan realitas fisik, sosial, dan psikologis manusia, serta komponen-komponen sosial luar dalam perkembangan dan keberfungsian individu (Grinnell, 1973, dalam DuBois & Miley, 2005: 40). Hollis menyatakan bahwa pekerjaan sosial dibutuhkan untuk memberikan "bobot kepada individu dan situasi sosial" (h. 266). Pandangannya selanjutnya menganjurkan bahwa intervensi terjadi utamanya pada level individu; ia memfokuskan pada intervensi lingkungan sebagai suatu cara untuk memperbaiki keberfungsian individu.

6. Reformasi Sosial

Tahun 1960-an merupakan titik balik lain bagi profesi ini. Dalam banyak hal, kerusuhan tahun 1960-an menyentuh semua institusi sosial, termasuk pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial. Salah seorang aktivis pada periode ini, Whitney Young (1921-1971), memulai karir profesionalnya di Minnesota Urban League setelah meraih S2 Pekerjaan Sosial dari Universitas Minnesota. Pada saat kematiannya, ia adalah direktur eksekutif National Urban League. Sebagai seorang profesor pekerjaan sosial, ia mengajar di Universitas Nebraska, Universitas Creighton, dan dekan Fakultas Pekerjaan Sosial di Universitas Atlanta. Sebagai pemimpin dalam profesi pekerjaan sosial, Young adalah ketua National Conference on Social Welfare (1965) dan NASW (1966). Ia menerima pengakuan nasional atas kegiatan-kegiatannya yang berkaitan dengan hak-hak sipil ketika Presiden Lyndon Johnson menganugerahkannya Medali Kebebasan pada tahun 1969 (Peebles-Wilkins, 1995b, dalam DuBois & Miley, 2005:41). Young memberitahukan kepada para praktisioner di Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial itu bahwa pekerjaan sosial telah kehilangan semangat untuk mendukung reformasi sosial dalam siaran persnya untuk mencapai status profesional. Ia menantang “profesi untuk menuntut Kembali warisan yang hilang para pendahulunya” (Trattner, 1999, h.311).

Suatu ujian atas kegiatan-kegiatan profesional dalam dasawarsa ini menyaksikan bahwa dalam perluasan dan perbaikan pelayanan-pelayanan pada sektor public dan privat, pelayanan-pelayanan pekerjaan sosial baik tradisional

maupun inovatif terus berkembang. The Economic Opportunity Act, perluasan dari jaminan sosial dan pelayanan-pelayanan kesejahteraan publik, perluasan dalam jenis dan jumlah pelayanan-pelayanan keluarga, meningkatnya ketersediaan klinik-klinik kesehatan jiwa dan pusat-pusat rawat siang, aksi masyarakat, dan program-program kemiskinan adalah sedikit dari proyek dan setting yang diasumsikan sebagai suatu peran utama profesi ini. (Goldstein, 1973: 47).

Namun demikian, kegiatan-kegiatan “perang terhadap kemiskinan” yang berasal dari program pemerintah pusat dimaksudkan untuk mengalamatkan masalah-masalah sosial pada level akar rumput, dalam banyak hal kritis dalam profesi pekerjaan sosial dan bahkan berorientasi antiprofesi. Para pembuat kebijakan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang efektivitas pendekatan-pendekatan casework dan group work tradisional. Sekali lagi, profesi ditantang untuk menguji ulang fokusnya (Brieland, 1995).

Tantangan ini dipenuhi oleh orang-orang yang mentransformasikan perangkaian proses dan metode. Daripada memulai dengan metode dan kemudian menguji manusia-dalam-situasi, mereka menganjurkan bahwa titik awal seharusnya manusia-dalam-situasi. Dengan kata lain, masalah-masalah, isu-isu, dan kebutuhan-kebutuhan klien harus mendasari pemilihan metode-metode intervensi. Dengan demikian suatu landasan generik dari fondasi praktek bagi semua kegiatan-kegiatan pekerjaan sosial memperoleh perhatian. Perspektif generalis, yang menekankan system sosial dan perspektif ekologi, memberikan

suatu pendekatan yang seragam terhadap praktek pekerjaan sosial yang berorientasi pemecahan masalah.

7. Pendekatan Ekosistem

Pada tahun 1970-an dan 1980-an, profesi pekerjaan sosial menerima definisi pekerjaan sosial yang memperkenalkan bahasa pendekatan ekosistem. Definisi ini berfokus pada elemen-elemen ekologi dan sistem yang dipadukan oleh Meyer (1970; 1983; 1988) dalam pendekatan ekosistem; Germain dan Gitterman (1980; 1996) dalam model kehidupan ekologis; dan Maluccio (1981) dalam model kompetensi klien.

Paradigma Meyer (1988) tentang variabel-variabel lingkungan yang memandang ekosistem berkaitan dan saling mempengaruhi dengan variabel-variabel manusia, dan dengan demikian intervensi lingkungan harus tercakup di antara pilihan-pilihan perlakuan” (h. 287).

Germain (1979) mendeskripsikan sifat transaksional dari pendekatan manusia-dalam-situasi dalam pekerjaan sosial. “Dalam suatu pandangan ekologis, praktek pekerjaan sosial diarahkan pada memperbaiki transaksi-transaksi antara manusia dan lingkungan untuk memperkaya kemampuankemampuan adaptif dan memperbaiki lingkungan bagi semua manusia yang menjalankan tugas-tugas kehidupan di dalamnya” (h. 7-8).

Praktek yang berorientasi kompetensi yang dikembangkan oleh Maluccio (1981) mengalamatkan kebutuhan untuk

mempertimbangkan kemampuan-kemampuan dan keterampilan-keterampilan, aspek-aspek motivasi, dan kualitas lingkungan sebagai komponen kompetensi ekologi bagi transaksi antara manusia dan lingkungan fisik dan sosialnya. Dengan kata lain, “esensi dari pekerjaan sosial yang berorientasi kompetensi ialah perubahan transaksi antara manusia-lingkungan sehingga mendukung dan/atau memperkaya kompetensi individu, keluarga, dan kelompok untuk berhubungan secara efektif dengan lingkungan” (h. 11).

8. Munculnya Definisi Pekerjaan Sosial

Seratus tahun yang lalu, definisi-definisi pekerjaan sosial mencerminkan lahirnya profesioanalisme, perubahan perspektif teoritik, dan munculnya tren praktek. Walaupun definisi-definisi ini sama dalam mendeskripsikan misi dan tujuan pekerjaan sosial, definisi-definisi ini memperlihatkan beberapa perbedaan yang menyolok dalam bagaimana definisi-definisi ini menggambarkan hakekat kegiatankegiatan profesional. Semua definisi berfokus pada masalah, isu, dan kebutuhan yang muncul dalam transaksi manusia di dalam sistem sosial. Tren mengidentifikasi suatu focus ganda yang mencakup perlakuan individu dan reformasi sosial, daripada memandang individu sebagai titik utama intervensi yang memberi perhatian terbatas pada lingkungan patut diperhatikan.

Secara tradisional, para pekerja sosial berurusan dengan masalah-masalah pribadi yang dialami oleh klien individual. Namun masalah-masalah pribadi individu harus harus dipandang

dalam konteks isu-isu sosial yang lebih luas. “Memperlakukan” orang melalui konseling dan intervensi psikoterapi dapat meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi masalah dan menyesuaikan diri, tetapi ini tidak menyelesaikan masalah-masalah sosial yang kompleks yang terjadi dalam situasi individu. Meluasnya masalah-masalah sosial, memudarnya sikap-sikap sosial, dan terbatasnya kesempatan-kesempatan serta sumber-sumber yang ada pada mereka, menuntut tindakan yang korektif agar orang-orang dapat memaksimalkan potensi mereka. Definisi terbaru pekerjaan sosial menggabungkan secara serentak dua aktivitas pekerja sosial: pemecahan masalah pada relasi-relasi manusia dan terlibat dalam reformasi sosial.

C. PERSYARATAN BAGI STATUS PROFESIONAL

Pertanyaan apakah pekerjaan sosial benar-benar suatu profesi telah menantang para pekerja sosial selama hampir seabad dan bersamaan dengan lahirnya definisi profesi ini. Sejarah pekerjaan sosial mencerminkan usaha-usaha yang sistematis oleh para pelopor sebelumnya untuk memperoleh status profesional, menyatukan organisasi organisasi profesional, dan mengembangkan standard pendidikan.

1. Apakah Pekerjaan Sosial Suatu Profesi?

Status profesional pekerjaan sosial dievaluasi oleh Abraham Flexner pada tahun 1915, dan kesimpulannya bergema di kalangan para pekerja sosial sejak saat itu. Pada tahun 1957, Ernest Greenwood menerapkan kriteria untuk menegaskan

posisi pekerjaan sosial sebagai suatu profesi. Dewasa ini profesi pekerjaan sosial terus menghadapi isu yang berkaitan dengan mempertahankan legitimasi profesionalnya.

Pidato Flexner, "Apakah Pekerjaan Sosial suatu Profesi?" yang diselenggarakan pada pertemuan Baltimore Conference on Charities and Correction pada tahun 1915, ialah suatu peristiwa yang sangat signifikan dalam proses pengembangan landasan rasional bagi pekerjaan sosial sebagai suatu profesi yang terorganisasi (Austin, 1983, dalam DuBois & Miley, 2005: 43). Flexner (1916), seorang pakar terkemuka di bidang pendidikan profesional, menguraikan enam sifat yang ia sebut "ciri-ciri suatu profesi." Menurut Flexner, "Profesi pada dasarnya melibatkan operasi intelektual dengan tanggung jawab individu yang lebih besar, memperoleh bahan bakunya dari ilmu dan pembelajaran, bahan baku ini mereka kerjakan hingga praktis dan menghasilkan kepastian, memiliki suatu teknik yang dapat dikomunikasikan melalui pendidikan, cenderung mengorganisasikan diri sendiri, dan memiliki motivasi yang semakin altruistik" (h. 580). Ciri-ciri ini memberikan suatu kerangka untuk mengases status profesional pekerjaan sosial.

Flexner mengakui evolusi yang pesat dari suatu "kesadaran diri profesional," menyadari bahwa pekerjaan sosial berada pada tahap awal profesionalisasi, dan memuji motivasi altruistik dari para pekerja sosial dan pengabdian mereka kepada "perbuatan yang baik." Akan tetapi ia menyimpulkan bahwa pada tahun 1915, pekerjaan sosial belum lah suatu profesi. Karena pekerjaan sosial bertindak sebagai penengah di antara profesi-profesi lain,

ia tidak memiliki tanggung jawab atau kekuatan suatu profesi yang sejati.

Usaha-usaha pendidikan sudah nampak, tetapi kurangnya spesifisitas dalam tujuan pekerjaan sosial tidak kondusif untuk suatu disiplin pendidikan terspesialisasi yang teratur dan tinggi. Flexner mengamati bahwa walaupun pekerjaan sosial memiliki tubuh pengetahuannya, fakta-fakta, dan gagasan-gagasan dari laboratorium dan seminar, ia tidak dibangun di atas suatu disiplin pendidikan yang terorganisasi secara bertujuan.

Selain itu, karena luasnya lingkup yang mencirikan praktek pekerjaan sosial pada saat itu, pekerjaan sosial tidak memiliki derajat kompetensi terspesialisasi yang tinggi yang disyaratkan bagi status profesional. Dengan kata lain, Flexner tidak melihat metode praktek tunggal yang umum terhadap luasnya bidang pekerjaan sosial. Mempertimbangkan semua faktor ini, Flexner menyimpulkan bahwa pekerjaan sosial belum mencapai status profesional.

Sejak saat Flexner memproklamasikan ke publik bahwa pekerjaansosialbelummemenuhikriteriasuatuprofesiyangsejati, ada suatu kesibukan yang tinggi dengan dan suatu permohonan yang bersemangat untuk memperoleh status profesional (Greenwood, 1957; Hodson, 1925, dalam DuBois & Miley, 2005: 44). Dengan menggunakan kerangka Flexner sebagai model, para pekerja sosial berusaha membuktikan bahwa pekerjaan sosial benar-benar suatu profesi (Austin, 1983). Aktivitas mereka

berfokus pada mengalamatkan kekurangan-kekurangan yang diidentifikasi untuk mengklaim status profesional. Hasil dari kegiatan ini termasuk peningkatan jumlah sekolah-sekolah pekerjaan sosial, membentuk suatu badan akreditasi profesional, menstandarisasi kurikulum pendidikan, mengadvokasikan pelatihan bagi semua pekerja sosial, dan menyelenggarakan serangkaian konferensi untuk menguji sifat tunggal dan generik dari keterampilan-keterampilan pekerjaan sosial yang dapat diterima dalam semua setting (Poppo, 1985, dalam DuBois & Miley, 2005: 44). Setelah memperoleh kemajuan yang berarti dalam mengembangkan metodologi praktek, meningkatkan persiapan pendidikan bagi pekerja sosial, memperluas landasan pengetahuan empiris pekerjaan sosial, dan mengkonsolidasikan serta mensolidifikasi asosiasi-asosiasi profesi, para pekerja sosial menegaskan bahwa pekerjaan sosial benar-benar telah memperoleh status profesional.

Artikel klasik Ernest Greenwood (1957), "Attributes of a Profession," memberikan ciri lain dalam mengevaluasi status profesional dari pekerjaan sosial. Kontinum Greenwood, yang menguraikan perbedaan antara status profesional dan bukan profesional, meliputi indikator status profesional berikut ini:

- a) Suatu profesi memiliki pengetahuan fundamental dan mengembangkan suatu badan teori yang sistematis yang membimbing keterampilan-keterampilan praktek; persiapan pendidikan harus berciri intelektual dan praktis.

- b) Otoritas dan kredibilitas profesional dalam relasi klien dan kaum profesional didasarkan atas penggunaan pertimbangan dan kompetensi profesional.
- c) Suatu profesi memiliki suatu kode etik yang dapat memperkuat, eksplisit, sistematis, dan mengikat yang memandu perilaku etik anggota-anggotanya
- d) Suatu profesi dipandu oleh suatu budaya nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol di dalam suatu jaringan organisasional kelompok-kelompok formal dan informal, melalui mana profesi berfungsi dan melaksanakan pelayanan-pelayanannya.

Dengan menggunakan indikator-indikator ini untuk mengevaluasi status profesional pekerjaan sosial, Greenwood menyimpulkan bahwa "pekerjaan sosial sudah berstatus profesi; pekerjaan sosial memiliki banyak butir kesamaan dengan model yang sebaliknya dapat diklasifikasikan" (h. 438). Ia juga menunjukkan bahwa pekerjaan sosial sedang berusaha mencapai status dalam "jenjang profesional, sehingga pekerjaan sosial juga dapat menikmati prestise, otoritas, dan monopoli maksimum yang akhir-akhir ini dimiliki oleh sedikit profesi penting" (h. 438).

Akhir-akhir ini, status profesional pekerjaan sosial diteliti secara seksama dengan cara mengevaluasi apakah pekerjaan sosial memiliki "monopoli" dalam penyelenggaraan pelayanan-pelayanan pekerjaan sosial seperti yang dimaksudkan oleh

Greenwood. Akan tetapi beberapa pakar menegaskan bahwa adalah penting berjalan melampaui baik ciri maupun proses asesmen tentang status profesional untuk menguji adanya kewenangan dan kendali, yang meliputi faktor-faktor seperti otoritas profesional yang sah, solidaritas keanggotaan, dan monopoli yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan-pelayanan (Lowe, Zimmerman, & Reid, 1989). Beberapa pakar berpendapat bahwa meningkatnya pemberian lisensi dan peraturan akan membatasi orang-orang yang secara hukum dapat mendefinisikan dirinya sebagai pekerja sosial. Tetapi pemberian lisensi gagal mengalamatkan isu kritis tentang penjaminan suatu ranah aktivitas yang unik bagi pekerja sosial, yaitu pelayanan-pelayanan dapat diselenggarakan secara eksklusif oleh para pekerja sosial yang dipersiapkan secara profesional. Ternyata, beberapa pakar berpendapat bahwa kesibukan memberi lisensi akhir-akhir ini menumbangkan isu pendefinisian suatu ranah keahlian praktek profesional: Sebelum profesi pekerjaan sosial dapat mencapai kendali kerja yang dibutuhkan, para pekerja sosial harus menegaskan parameter ranah profesional mereka sendiri.

9. Lahirnya Organisasi Profesi

Untuk melancarkan penempatan kerja bagi para lulusannya, pada tahun 1911 beberapa mahasiswi kolese membentuk suatu organisasi profesi yang disebut Intercollegiate Bureau of Occupations di Kota New York. Salah satu bagiannya, National Social Worker's Exchange, yang tertarik secara khusus dalam standard profesional, memimpin gerakan untuk membentuk

suatu organisasi yang komprehensif, American Association of Social Workers, pada tahun 1921 (Austin, 1983). Suatu cikal bakal selanjutnya bagi pembentukan asosiasi-asosiasi profesi datang dari para dosen pekerjaan sosial yang berusaha untuk memperoleh penerimaan di kalangan komunitas akademik: "Agar pekerjaan sosial diakui sebagai program gelar profesional yang sah, dan dosen pekerjaan sosial sebagai anggota akademi yang sah, adalah sangat penting bahwa status profesional pekerjaan sosial ditegaskan" (h. 361, dalam DuBois & Miley, 2005:43). Ketika bidang-bidang keahlian muncul, asosiasi-asosiasi profesi lain terbentuk, termasuk American Association of Medical Social Workers (1918), National Association of School Social Workers (1919), American Association of Psychiatric Social Workers (1926), American Association of Group Workers (1936), Association for the Study of Community Organization (1946), dan Social Work Research Group (1949).

Sebagai suatu syarat bagi kesatuan profesional, berbagai organisasi pekerjaan sosial bergabung pada tahun 1955 untuk membentuk National Association of Social Workers (NASW). Dengan keanggotaan hampir 150.000 orang, NASW adalah organisasi pekerjaan sosial terbesar di dunia akhir-akhir ini (NASW, 2003). Keanggotaan penuh (biasa) NASW tersedia bagi lulusan program pekerjaan sosial yang diakreditasi oleh Council on Social Work Education (Dewan Pendidikan Pekerjaan Sosial Amerika Serikat). Mahasiswa yang terdaftar dalam program gelar S1 dan S2 Pekerjaan Sosial juga memenuhi syarat menjadi anggota. Keanggotaan luar biasa (associate membership) dalam NASW tersedia bagi para praktisioner pelayanan kemanusiaan

lain. Selain organisasi nasional, ada cabang-cabang di setiap negara bagian dan di District of Columbia, New York City, Puerto Rico, Virgin Islands, Guam, dan Eropa (utamanya bagi orang Amerika yang bekerja di pangkalan militer). Sebagai anggota asosiasi, NASW memberikan dukungan dan sumber-sumber kepada para praktisioner pekerjaan sosial, mempromosikan pengembangan profesional, mengembangkan standardstandard praktek dan kode etik,serta mempromosikan adicita kemanusiaan dan nilai-nilai pekerjaan sosial.

Selain NASW, sejumlah asosiasi profesional yang memiliki minat khusus terbentuk, misalnya kelompok-kelompok profesional khusus, kepentingan-kepentingan khusus, isu-isu advokasi, dan bidang-bidang keahlian. Contoh ini meliputi Association for Community Organization and Social Administration, Canadian Association of Social Workers, International Federation of Social Workers, National Association of Black Social Workers, National Organization of Forensic Social Work, dan Society for Social Work Leadership in Health Care. Asosiasi-asosiasi spesialis ini mempengaruhi perubahan dan stabilitas. Asosiasi-asosiasi ini juga adalah sumber penting bagi identitas dan pembaharuan profesi.

10. Perkembangan Pendidikan Profesi

Para pemimpin terdahulu dalam masyarakat organisasi amal dan gerakan rumah pemukiman menyadari bahwa Pendidikan formal adalah suatu prasyarat bagi keberhasilan lahirnya profesi. Akan tetapi ada debat yang serius apakah fokusnya pada

“pelatihan” atau pada pendidikan berbasis universitas (Pumhprey & Pumhprey, 1961, dalam DuBois & Miley, 2005: 47).

Mary Richmond mendukung pembentukan sekolah-sekolah pelatihan yang secara langsung diafiliasikan dengan badanbadan filantropis, program-program pelatihan yang lebih menekankan praktikalitas daripada teori-teori akademik (Costin, 1983). Program pertama semacam ini ialah kursus pelatihan selama enam minggu yang dilaksanakan pada musim panas tahun 1898 oleh Masyarakat Organisasi Amal New York. Ini diformalisasikan menjadi program pelatihan selama setahun melalui Sekolah Filantropi New York pada tahun 1904.

Dalam merespons kepada tuntutan akan para pekerja sosial terlatih, program-program pekerjaan sosial dikembangkan di kota-kota lain. Di Chicago, kepemimpinan dalam usaha-usaha pendidikan awal datang dari Graham Taylor dari rumah pemukiman Chicago Commons dan Julia Lathrop dari Hull House. Ketika Chicago School of Civics and Philanthropy menjadi School of Social Service Administration, yang berafiliasi dengan Universitas Chicago, usaha pendidikan ini menjadi yang pertama yakni pendidikan pekerjaan sosial dimasukkan dalam suatu struktur universitas koedukasional utama (Costin, 1983). Program-program universitas menekankan pemahaman teoritik dan pengalaman praktis.

Dalam merespons kepada tuntutan akan para pekerja sosial terlatih, program-program pekerjaan sosial dikembangkan di kota-kota lain. Di Chicago, kepemimpinan dalam usaha-

usaha pendidikan awal datang dari Graham Taylor dari rumah pemukiman Chicago Commons dan Julia Lathrop dari Hull House. Ketika Chicago School of Civics and Philanthropy menjadi School of Social Service Administration, yang berafiliasi dengan Universitas Chicago, usaha pendidikan ini menjadi yang pertama yakni pendidikan pekerjaan sosial dimasukkan dalam suatu struktur universitas koedukasional utama (Costin, 1983). Program-program universitas menekankan pemahaman teoritik dan pengalaman praktis.

Pengakuan bahwa standard-standard umum harus diterapkan kepada program-program pendidikan bersamaan dengan pengembangan kurikulum. Semula, American Association of Schools of Social Work, yang diorganisasikan pada tahun 1919, membimbing kebijakan kurikulum (Lowy, Bloksberg, & Walberg, 1971). Pada tahun 1952, asosiasi ini, yang berfokus pada pendidikan professional pada level strata dua, bergabung dengan National Association of Schools of Social Administration, yang mempromosikan pendidikan pekerjaan sosial strata satu, untuk membentuk Dewan Pendidikan Pekerjaan Sosial Amerika Serikat (Council on Social Work Education, CSWE). CSWE adalah organisasi yang menetapkan standard pendidikan pekerjaan sosial di Amerika Serikat Walaupun pada mulanya ditugaskan untuk mengakreditasikan program pendidikan pekerjaan sosial pada strata dua, sejak tahun 1974 CSWE ditugaskan untuk mengakreditasikan program pendidikan pekerjaan sosial pada semua level, termasuk program pendidikan pekerjaan sosial pada strata satu.

Tujuan CSWE ialah mempromosikan pendidikan pekerjaan sosial berkualitas tinggi. Pencapaian tujuan ini dilakukan dengan cara mengakreditasikan program-program, menyelenggarakan konferensi-konferensi bagi para dosen, memelopori kegiatan-kegiatan pengembangan profesi, memprakarsai satuan-satuan tugas pemrograman pendidikan, dan mempublikasikan jurnal (Beless, 1995). Akreditasi —pensertifikasian bahwa standard minimum tertentu telah dipenuhi— ialah suatu alat penjaminan mutu. Banyak negara bagian menyaratkan bahwa para calon harus memiliki suatu ijazah dari suatu program yang disetujui untuk melakukan suatu ujian kualifikasi dalam rangka memperoleh lisensi atau sertifikasi. Juga, ijazah dari suatu program pekerjaan sosial strata satu terakreditasi selalu memperoleh kedudukan yang tinggi dalam program pekerjaan sosial strata dua, suatu praktek yang mengakui bahwa program pekerjaan sosial strata satu terakreditasi memberikan landasan profesional bagi inti praktek, kebijakan, penelitian, dan perilaku manusia. Laporan Hollis-Taylor (1951) menyimpulkan bahwa studi seni dan sains, dasar bagi persiapan profesional, dan konsep dasar pekerjaan sosial, batu pertama bagi pendidikan pekerjaan sosial lanjutan, dapat diperoleh di pendidikan tinggi strata satu.

11. Pekerjaan Sosial Dewasa ini

NASW dan CSWE sama-sama memainkan peran-peran yang vital dalam mendefinisikan misi dan tujuan profesi pekerjaan sosial dan dalam memperbaiki ketepatan kegiatan-kegiatan profesional pada beragam level praktek. Akan tetapi perubahan

tidak terjadi tanpa kontroversi. Pengakuan akan status profesional para pekerja sosial strata satu oleh NASW pada tahun 1970 dan akibat dari akreditasi program strata satu oleh CSWE pada tahun 1974 muncul setelah ada debat yang serius. Ternyata, penerimaan para lulusan program pekerjaan sosial strata satu sebagai anggota biasa dalam NASW berhadapan dengan penolakan terbuka dan bahkan tuduhan bahwa pengakuan para pekerja sosial lulusan strata satu sebagai profesional dianggap mendeprofesionalisasikan praktek pekerjaan sosial.

Penerimaan ijazah pekerjaan sosial strata satu dan para praktisioner pekerjaan sosial strata satu menuntut profesi pekerjaan sosial mengembangkan suatu klasifikasi perbedaan tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan profesional serta mempertegas landasan kompetensi praktek—pengetahuan, keterampilan-keterampilan, dan nilai-nilai—yang harus dimiliki oleh semua pekerja sosial. Menurut CSWE (2001), mahasiswa yang lulus dari program pekerjaan sosial strata satu yang diakreditasikan oleh CSWE dan mahasiswa pekerjaan sosial strata dua setelah menyelesaikan Pendidikan tahun pertama harus dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a) Menerapkan keterampilan-keterampilan berpikir kritis dalam konteks praktek pekerjaan sosial profesional.
- b) Memahami landasan nilai profesi, standard-standard dan prinsip-prinsip etisnya, serta praktek yang berkaitan dengan itu.

- c) Berpraktek tanpa diskriminasi dan dengan kehormatan, pengetahuan, dan keterampilan-keterampilan yang berkaitan dengan usia, kelas, warna kulit, budaya, kecacatan, etnis, struktur keluarga, jender, status marital, kebangsaan asal, ras, agama, jenis kelamin, dan orientasi seksual.
- d) Memahami bentuk-bentuk dan mekanisme-mekanisme penekanan dan diskriminasi serta menerapkan strategi-strategi bagi advokasi dan perubahan sosial yang memajukan keadilan sosial dan ekonomi.
- e) Memahami dan menerjemahkan sejarah profesi pekerjaan sosial dan struktur-struktur serta isu-isu kontempornya.
- f) Menerapkan pengetahuan dan keterampilan-keterampilan praktek pekerjaan sosial generalis dengan sistem-sistem dari semua tingkat pendidikan (level strata satu). Menerapkan pengetahuan dan keterampilan-keterampilan dari suatu perspektif pekerjaan sosial generalis untuk berpraktek dengan sistem-sistem dari semua tingkat
- g) pendidikan (level strata dua).
- h) Menggunakan kerangka teoritik yang didukung oleh bukti empirik untuk memahami perkembangan dan perilaku individu sepanjang masa hidup dan interaksi di antara individu dan individu serta di antara individu dan keluarga, kelompok, organisasi, dan masyarakat.

- i) Menganalisis, merumuskan, dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan sosial.
- j) Mengevaluasi studi-studi penelitian, menerapkan temuan-temuan penelitian ke dalam praktek, dan mengevaluasi intervensi prakteknya sendiri.
- k) Menggunakan keterampilan-keterampilan komunikasi secara berbeda lintas populasi klien, rekan kerja, dan masyarakat.
- l) Menggunakan supervisi dan konsultasi yang sesuai dengan praktek pekerjaan sosial.
- m) Berfungsi di dalam struktur organisasi dan system penyelenggaraan pelayanan serta mengusahakan perubahan organisasi yang diperlukan (h. 9).

Tujuan-tujuan yang dinyatakan oleh CSWE menjamin bahwa para pekerja sosial strata satu mengembangkan kompetensi di dalam suatu landasan pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan-keterampilan yang seragam.